KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 - Faksimili: (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkumham.go.id
E-mail:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W13.PR.04.04 -2 5 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023

Yth. Plh. Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM
di tempat

1. Rujukan:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
   d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
   e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020/2024;
   g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
   h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana data laporan terlampir.

3. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Tembusan:
1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
6. Direktur Jenderal Imigrasi;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM;
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SEMAKIN PASTI REFORMASI HUKUM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah selama Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Capaian kinerja Tahun 2023 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 2020 – 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 menggambarkan Capaian Kinerja Tahun 2023. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Semarang, 5 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selama Tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Perbandingan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 dengan Alokasi Tahun 2022

No	PROGRAM (UNIT ESELON I)	2023	2022
1.	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	Rp. 28,324,432,000	Rp. 24,883,651,000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	Rp. 4,811,600,000	Rp. 3,902,750,000
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)	Rp. 1,344,182,000	Rp. 1,920,260,000
4.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	Rp. 1,497,828,000	Rp. 815,538,000
5.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	Rp. 1,863,881,000	Rp. 1,080,189,000
6.	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Rp. 367,000,000	Rp. 272,000,000
7.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	Rp. 315,238,000	Rp. 313,738,000
8.	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Rp. 6,151,171,000	Rp. 6,190,353,000
9.	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	Rp. 200,351,000	Rp. 197,997,000
	Jumlah	**Rp. 44,875,683,000**	**Rp. 39,576,476,000**

Dari perbandingan Alokasi anggaran Tahun 2023 dan tahun 2022 diatas, terdapat beberapa Program yang mengalami kenaikan dan ada pula Program yang mengalami penurunan. Terdapat 7 (tujuh) alokasi anggaran yang mengalami kenaikan yaitu pada Program (Eselon I): a. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal); b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); c. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian); d. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); e. Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan); f. Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia); g. Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

Sedangkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan yaitu pada 2 (dua) Program (Eselon I): a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); b. Program Pembentukan Regulasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Total realisasi anggaran 9 Petikan DIPA dari unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah 50.36% dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 43,191,218,000,-, dengan total sisa anggaran Rp. 20,633,170,937,-.

Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM (ESELON I)	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)
1	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	28,324,432,000	27,995,666,444	98,84	328,765,556
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	4,811,600,000	4,794,279,920	99,64	17,320,080
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)	1,344,182,000	1,340,399,830	99,72	3,782,170
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	1,497,828,000	1,496,140,645	99,89	1,687,355
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	1,863,881,000	1,854,403,807	99,49	9,477,193
6	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	367,000,000	364,024,678	99,19	2,975,322
7	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	315,238,000	314,519,485	99,77	718,515
8	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	6,151,171,000	6,120,698,738	99,50	30,472,262
9	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	200,351,000	200,324,955	99,99	26,045
	Jumlah	**44,875,683,000**	**44,480,458,502**	**99,12**	**395,224,498**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selalu berusaha mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya.

Di Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melaksanakan 4 Program dari 9 Unit Eselon I yang terdiri dari 23 Sasaran Kegiatan dan 62 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana gambar berikut:

PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI

1. DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM

1. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1. SEKRETARIAT JENDERAL
2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

1. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
2. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
3. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
4. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dari 62 indikator kinerja kegiatan tersebut, ada indikator kinerja kegiatan yang tercapai dengan optimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal, belum tercapainya indikator tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
3. Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung;

Atas kekurangan capaian kinerja dimaksud pada Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan melakukan peningkatan pada Semester II Tahun 2023, antara lain dengan:

1. Melaksanakan kegiatan di semester II secara optimal;
2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, serta mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kata Pengantar 2

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk

menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

1. dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;
3. mewujudkan partisipasi masyarakat ddalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan
4. memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal Ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan),* Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan juga Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di masa yang akan datang.

Berdasarkan 23 sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran yang berasal dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-013.01.2.408742/2023 Tanggal 30 November 2022;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-013.03.2.408743/2023 Tanggal 30 November 2022;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI (Ditjen PAS) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA- 013.05.2.408744/2023 Tanggal 30 November 2022;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI

(Ditjen Imigrasi) Nomor: SP DIPA-013.06.2.408745/2023 Tanggal 30 November 2022;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA- 013.07.2.408746/2023 Tanggal 30 November 2022;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 013.10.2.408749/2023 Tanggal 30 November 2022;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BALITBANG HAM) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.11.2.408750/2023 Tanggal 30 November 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.09.2.408748/2023 Tanggal 30 November 2022; dan
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-013.08.2.408747/2023 Tanggal 30 November 2022.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seoarang Kepala Kantor Wilayah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala Divisi (Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian serta Pelayanan Hukum dan HAM).

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;

3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hokum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatnya pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Pelayanan Pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan)
2. Pelayanan Informasi Keimigrasian
3. Pelayanan Jasa Hukum
   a. Di bidang Kenotariatan (pengambilan sumpah notaris)
   b. Di bidang Fidusia (permohonan sertifikat jaminan fidusia-*online*)
   c. Di bidang kewarganegaraan (Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia)
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual
   Permohonan di bidang Kekayaan Intelektual:
   a. Pendaftaran Merek
   b. Permohonan Hak Cipta
   c. Pendaftaran Paten
   d. Pendaftaran Desain Industri
5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
   Melakukan Mediasi atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dan pemenuhan HAM
6. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
   Menyediakan anggaran Bantuan Hukum cuma-cuma melalui Organisasi Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang sedang berperkara di Pengadilan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;

2. 4 (empat) orang Kepala Divisi:
   a. Kepala Divisi Administrasi,
   b. Kepala Divisi Pemasyarakatan,
   c. Kepala Divisi Keimigrasian dan
   d. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. 2 (dua) orang Kepala Bagian:
   - Bagian Umum dan
   - Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
4. 7 (tujuh) orang Kepala Bidang:
   a. Bidang Pemasyarakatan,
      - Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Tekonologi Informasi; dan
      - Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.
   b. Bidang Keimigrasian
      - Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
      - Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian.
   c. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
      - Bidang Pelayanan Hukum;
      - Bidang Hak Asasi Manusia; dan
      - Bidang Hukum.
5. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian
   - Sub Bagian Program dan Pelaporan
   - Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
   - Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
   - Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
6. 14 (empat belas) orang Kepala Sub Bidang
   - Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
   - Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
   - Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
   - Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Kemanan
   - Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
   - Sub Bidang Informasi Keimigrasian
   - Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
   - Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
   - Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
   - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

- Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah
- Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH
- Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
- Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

Struktur Ogranisasi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

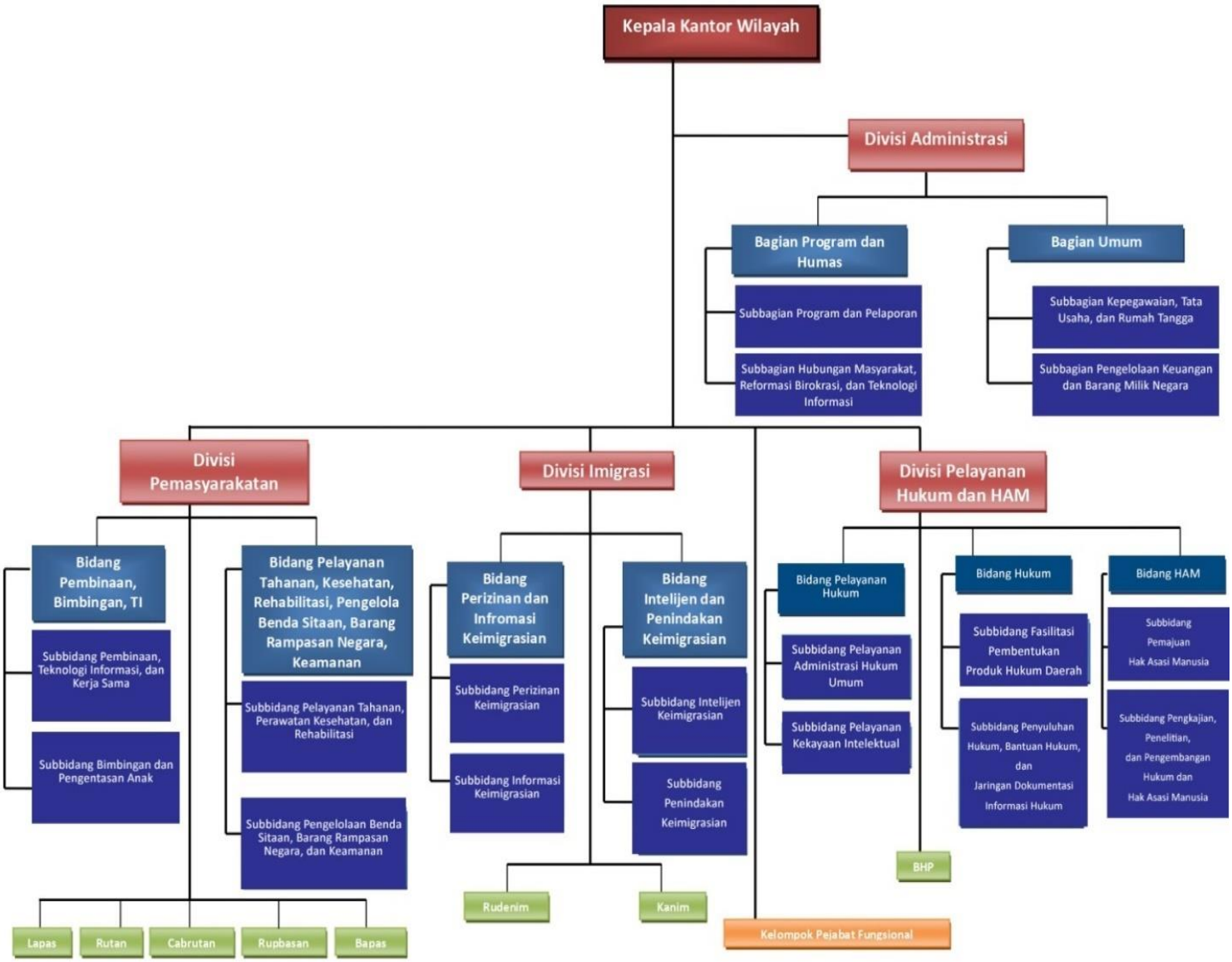

Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah "*Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan* tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya". Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu:

1. Divisi Administrasi;
2. Divisi Pemasyarakatan;
3. Divisi Keimigrasian;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
5. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejumlah 75 UPT yang terdiri dari:
   - 31 (Tiga Peuluh Satu) UPT Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
   - 1 (Satu) UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
   - 18 (Delapan Belas) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
   - 8 (Delapan) UPT Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
   - 8 (Delapan) UPT Rumah Penyimpanan Basan dan Baran (RUPBASAN);
   - 6 (Enam) UPT Kantor Imigrasi;
   - 1 (Satu) UPT Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM); dan
   - 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP).
   - 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selama Tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

Tengah guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

2. Tujuan

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia.

D. Aspek Strategis

Aspek Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hokum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

E. Isu Strategis

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 diantaranya:

1. Adanya kebijakan nomenklatur penganggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan wilayah, berdasarkan surat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.2-HN.02.02-03 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dimana kegiatan pelaksanaan harmonisasi ke kab/kota

disebutkan secara tegas dalam rincian kertas kerja sehingga kurang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan;

2. Maraknya tindak pidana perdagangan orang, sehingga kantor wilayah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya hal tersebut;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberian layanan publik;
4. Keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada kantor wilayah jawa tengah;

F. Sistematika Laporan

Sistematika dalam Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Pelaporan

BAB II Perencanaan Kinerja
- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV Penutup
- A. Simpulan
- B. Saran

Lampiran-lampiran

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya

manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk: menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar Hukum dan HAM; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

1. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

a. mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
b. memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
c. menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
d. memiliki orientasi kepada masa depan
e. mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
f. menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
e. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

a. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
b. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
c. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

d. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
e. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

3. Tata Nilai BerAkhlak

merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu

kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *Employer Branding* ASN yang melayani sepenuh hati.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama". Adapun Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

g. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

4. Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **"PASTI"** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

novatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: No.7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut merupakan rangkuman dari Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan 9 Unit Eselon I yang terdiri dari 4 Program, 23 Sasaran Kegiatan dan 62 Indikator Kinerja Kegiatan:

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Unit Eselon I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan inte1rnal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	Indeks
2	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5	%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86	%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86	%
4	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90	%

5	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82	Indeks
5 6	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	90	%
		2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90	%
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90	%
6 7	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70	%
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99	%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85	%
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85	%
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin	17	%
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31	%
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72	%
7 8	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	80	%
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	80	%
8 9	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	60	%
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55	%
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35	%
9 10	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	80	%
		2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100	%
		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	90	%
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	90	%
10 11	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase Pengaduan Yang diselesaikan	85	%
		2. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib	80	%
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85	%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80	%
11 12	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85	%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80	%
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85	%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80	%

12 13	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80	%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94	%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97	%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80	%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85	%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85	%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80	%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27	%
13 14	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25	Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13	Indeks
14 15	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	548	Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1	Lokus
15	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100	%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2	Lokus
16		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	6	Laporan
17	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80	%
18	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	22	Orang
18 19	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	9	Instansi
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	5	Instansi
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	Instansi
20	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	Rekomendasi
21	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	Kegiatan
21 22	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82	%

	dan informasi hukum masyarakat di wilayah	2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80	%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75	Indeks
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif	20	%
23	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80	%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	Buku

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk masing-masing program di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023:

No	PROGRAM (UNIT ESELON I)	2023	
1.	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	Rp.	26,928,470,000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	Rp.	4,811,600,000
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)	Rp.	1,344,182,000
4.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	Rp.	1,497,828,000
5.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	Rp.	1,863,881,000
6.	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	Rp.	367,000,000
7.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	Rp.	315,238,000
8.	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Rp.	5,862,668,000
9.	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	Rp.	200,351,000
	Jumlah	**Rp.**	**43,191,218,000**

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

Sepanjang Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memperoleh 15 penghargaan yang terdiri dari:

1. Terbaik I Kategori Pemberitaan Positif Terbanyak Tahun 2022 dengan indikator penilaian yaitu pemberitaan positif pada media;
2. Terbaik di bidang Pengelolaan dan Pelaporan Laporan Harian Intelijen (LHI) Keimigrasian Tahun 2022;
3. Terbaik II Penghargaan Penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Tahun 2023;
4. Terbaik I Pengelolaan JDIHN;
5. Terbaik III Penyelenggara IPK-IKM di Tingkat Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2022;
6. Terbaik III Sub Kategori Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Wilayah Indonesia Barat Tahun 2023;
7. Terbaik III Sub Kategori Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal Tervalidasi Tahun 2023;
8. Terbaik II Kategori Strategi dan Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual;
9. Terbaik di Bidang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM);
10. Terbaik II Kanwil dalam Kegiatan Pelatihan Mempergunakan Metode MOOC Kemenkumham;
11. Penghargaan atas Operasionalisasi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah;
12. Terbaik Kategori Produktivitas Konten Kreatif Layanan AHU di wilayah;
13. Pembinaan HAM Terbaik;
14. Terbaik II Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai

dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input, Output,* dan *Outcome.*

1. *Input*: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. *Output*: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegaitan yangdapat berupa fisik dan non fisik
3. *Outcome*: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan realisasi dari rencana kinerja Tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome.*

Realisasi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,88	125,16
2	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5	0	0
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86	90,51	105,24
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86	88,88	103,36
4	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90	81,87	90,97
5	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82	82	100
6	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	90	98,3	109,22
		2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90	100	111,11
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90	93,5	103,88
7	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70	92.44	132.01
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99	92,54	93,47
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85	92,50	108,82
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85	90,24	106,16
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin	17	109,37	643,35
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31	151,9	490
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72	92	127,78
8	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	80	73,87	92,34
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	80	77,06	96,34
9	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	60	98,3	163,84
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55	99,02	180,04
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35	60,78	173,66
10	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	80	93,02	116,28

	Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100	100	100
		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	90	100	111,11
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	90	93	103,33
11	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase Pengaduan Yang diselesaikan	85	100	117,64
		2. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib	80	91,65	114,56
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85	85,26	100
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80	100	125
12	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85	100	117,65
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80	91,65	115
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85	96,61	114,11
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80	100	125
13	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80	100	125
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94	100	106,38
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97	100	103,1
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80	100	125
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85	100	117,65
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85	100	117,65
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80	80	100
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27	36	133,34
14	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25	3,96	121,8
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13	3,63	115,97
15	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	548	650	118,6
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1	2	200
16	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100	100	100

	Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2	2	100
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	6	6	100
17	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80	100	125
18	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	22	21	95,45
19	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	9	36	400
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	5	34	680
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	4	400
20	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	4	133
21	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	2	100
22	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81	91,69	113,19
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80	91,75	114,69
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75	76,96	100,46
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	77,42	110,60
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif	20	74	370
23	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80	100	125
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	1	100

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien

Program Dukungan Manajemen. yang diturunkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 yaitu sebanyak 1 sasaran kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,88	125.16

Sumber data: 3AS Survey Management

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja kegiatan (IKK) Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien pada Kantor Wilayah tercapai sebesar 125,16% dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\sum hasil\ indeks\ kepuasan}{\sum targetindeks\ kepuasan} x100\%$$

$$= \frac{3.88}{3.1} x100\% = 125.16\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,88	125.16

Berdasarkan data hasil survey kepuasan 3AS Survey Management yang dilakukan oleh kantor wilayah melalui halaman https://survei.balitbangham.go.id/home di Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

Mutu		Rentang Nilai
Sangat Baik	A	88.31 - 100
Baik	B	76.61 - 88.3
Kurang Baik	C	65 - 76.6
Tidak Baik	D	0 - 64.99

Dengan nilai indeks sebesar 3.88 untuk kualitas pelayanan (IKM) dan 3.91 untuk perilaku penyimpangan pelayanan (IPK). Nilai kualitas pelayanan (IKM) ≥ 90 yaitu sebesar 97.07 dan nilai perilaku penyimpangan pelayanan (IPK) sebesar 97.82 dikategorikan **sangat baik** (A).

Dengan nilai kepuasan internal sebesar 3,88 yang melebihi target dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023 (target sebesar 3,1) mengindikasikan bahwa pengguna layanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bisa dikatakan Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	3,1	3,69	3,1	3,96	3,1	3,88

Berdasarkan tabel diatas, indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah jawa tengah pada Tahun 2023 mempunyai target indeks yang sama yaitu sebesar 3,1, dimana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 3,96 dan pada Tahun 2023 terlaksana sebesar 3,88 yang mengalami penurunan nilai indeks kepuasan sebesar 0.08 dibandingkan tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 dengan target sebesar 3,1 tercapai sebesar 3,69.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3,1	3,1	3,1	3,1

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah di Renstra Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tabel diatas dapat dilihat bahwa target capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah capaian indeks kepuasan layanan sebesar 3,1 sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran kantor wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam mendukung dan mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2023.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya inovasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu aplikasi HAI PENENGAH. HAI PENENGAH merupakan akronim dari Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah. Aplikasi berbasis web ini terlahir dalam rangka memfasilitasi dan merespon kebutuhan percepatan penyampaian informasi, pelaporan, dan peningkatan kualitas pelayananan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah khususnya pada pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga. Diharapkan halaman ini menjadi penengah atas segala kebutuhan informasi dan pelaporan dalam hal kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

SASARAN KEGIATAN 2

Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5	0	0
	2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86	90,51	105,24

Sasaran kegiatan Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah**
   a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah persentase peningkatan PNBP dari pelayanan administrasi hukum umum di wilayah dengan target perolehan PNBP tahun 2023 sebesar 5% lebih tinggi dari pada perolehan PNBP tahun 2022. Perolehan PNBP di wilayah provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 senilai Rp 51,837,308,124 (Lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu serratus dua puluh empat rupiah). Jika perolehan nilai PNBP Tahun 2023 dibandingkan dengan perolehan PNBP Tahun 2022 senilai Rp 53,662,471,312 (Lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah), nilai perolehan PNBP Tahun 2022 lebih tinggi 3.40% dari pada nilai perolehan PNBP Tahun 2023.

TAHUN 2023		TAHUN 2022	
Volume Layanan	**Jumlah Penerimaan (Rp)**	**Volume Layanan**	**Jumlah Penerimaan (Rp)**
544.931	51.837.308.124	564.077	53.662.471.312

$$= \frac{\sum PNBP\ 2023 - PNBP\ 2022}{\sum PNBP\ 2022} x100\%$$

$$= \frac{25{,}268{,}765{,}375 - 26{,}111{,}677{,}312}{26{,}111{,}677{,}312} x100\% = -3.40\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	0%	0

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	13.41%	5%	0

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan tahun 2020 dan 2021 diatas, capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah pada indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah dengan target sebesar 5% di tahun 2021, 2022, dan 2023 terealisasi sebesar 5% di tahun 2021 dan 13.41% di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 belum dapat memenuhi sesuai target sebesar 5%, diharapkan di periode berikutnya dapat meningkatkan kinerja pelayanan Administrasi Hukum Umum.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah		5%	5%	5%	5%

Perbandingan indikator persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 sebesar 5% sesuai dengan target jangka menengah tahun 2021-2024 telah tercapai sebesar 5% pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan pada tahun 2023 belum tercapai sesuai target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Ketidakberhasilan

Penyebab tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target karena terdapat penurunan jumlah transaksi penggunaan layanan AHU pada tahun 2023 sebagaimana diketahui melaluilaman kanwil.ahu.go.id. Jumlah penerimaan PNBP per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 53.703.571.312, sedangkan pada tahun 2023 per tanggal 31 Desember sebesar Rp.51.837.308.124 atau mengalami penurunan sebesar 3,4% dibandingkan PNBP tahun 2022.

f. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan

Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum

secara langsung di loket pelayanan Kantor Wilayah. Sehingga, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi hukum umum dapat mengalami peningkatan di periode berikutnya

.

2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada indikator Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 98.77%. Hal ini mengindikasikan bahwa Balai Harta Peninggalan Semarang telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan menyelesaikan jumlah layanan yang masuk ke Balai Harta Peninggalan Semarang selama Tahun 2023.

$$= \frac{\sum \%penyelesaian\ layanan\ BHP}{\sum target\ \%} x100\%$$

$$= \frac{90{,}51}{86} x100\% = 105{,}24\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%	90.51%	105.24

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%	84%	84%	98.77%	86%	90.51

Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum tahun 2021 dengan target sebesar 82% tahun 2021 terealisasi sebesar 84%, tahun 2022 dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 98.77%, sedangkan pada Tahun 2023 dengan target sebesar 86% terealisasi 90.51%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum		82%	84%	86%	88%

Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum pada tahun 2021 dengan target sebesar 82% tercapai sebesar 84%, sedangkan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 98.77% lebih besar dari target sebesar 84%, jumlah target pesentase pada tahun 2023 sebesar 86%, dan pada tahun 2024 sebesar 88%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Ketidakberhasilan dalam merealisasikan target kinerja pada Tahun 2023 dikarenakan dasar periode penyusunan LKjIP yang hanya sampai dengan bulan juni 2023, sedangkan target dalam perjanjian kinerja merupakan target dengan periode tahunan, sehingga belum sepenuhnya dapat menggambarkan capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya aplikasi SILANDU (Sistem Informasi Layanan Terpadu) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dimana SILANDU merupakan layanan publik yang dilakukan secara bersama, terpadu, dan transparan dalam satu tempat yang sama oleh 4 (empat) divisi yaitu Pelayanan Hukum dan HAM, Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Administrasi.

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah telah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku yang dilakukan oleh para Notaris terlapor, yakni:

Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris

No.	MPD Notaris	Notaris Terlapor	Status Hukum	Sanksi Administratif
1.	Kota Salatiga	AR	-	Peringatan Tertulis Ketiga
2.	Kota Magelang	ASH	eks-Narapidana	Usulan Pemberhentian dengan Tidak Hormat
3.	Kab.Banyumas dan Kab. Purbalingga	AWY	-	Peringatan Tertulis Pertama
4.	Kab.Banyumas dan	RFD	Narapidana	Usulan Pemberhentian dengan Tidak

	Kab. Purbalingga			Hormat
5.	Kab.Banyumas dan Kab. Purbalingga	PR	-	Peringatan Tertulis Pertama
6.	Kab. Tegal	MT	Tahanan Kota	-
7.	Kota Semarang	DH	-	Peringatan Tertulis Pertama
8.	Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga	ML	-	Usulan Pemberhentian dengan Tidak hormat
9.	Kab. Klaten	AK	-	Peringatan Tertulis Pertama

Kesembilan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah seluruhnya telah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan. Namun, kasus dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris yang dilakukan oleh Notaris MT tidak dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, karena Majelis Pemeriksa Wilayah berpendapat perlu menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap Notaris MT sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa usulan pemberhentian sementara atau usulan pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, dari kesembilan laporan hasil pemeriksaan hanya ada 1 laporan hasil pemeriksaan yang belum diputus oleh Majelis Pemeriksa Wilayah. Dengan demikian, tingkat penyelesaian penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris adalah 83.33% (delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen)..

$$= \frac{\sum Laporan\ yang\ diselesaikan}{\sum Laporan\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ masuk} x100\%$$

$$= \frac{8}{9} x100\% = 88.88\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	88,88	103,36

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	100%	84%	100%	86%	88,88

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah tahun 2021 dengan target 82% terealisasi 100%, pada tahun 2022 dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 100%, sedangkan di Tahun 2023 dengan target 86% terealisasi 88,88%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	84%	86%	88%

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah pada tahun 2021 dengan target sebesar 82% terealisasikan sebesar 100%, sedangkan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target pada Tahun 2023 sebesar 82%, target sebesar 86% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 sebesar 88%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian layanan serta aduan di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya aplikasi SILANDU (Sistem Informasi Layanan Terpadu) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dimana SILANDU merupakan layanan publik yang dilakukan secara bersama, terpadu, dan transparan dalam satu tempat yang sama oleh 4 (empat) divisi yaitu Pelayanan Hukum dan HAM, Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Administrasi.

SASARAN KEGIATAN 4

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien

1. Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum realisasi}{\sum target} x100\%$$

$$= \frac{81{,}87}{90} x100\% = 90{,}97\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%	81,87	90,97

g. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%	100%	-	-	90%	81,87

Persentase Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP tahun 2021 dengan target 90% terealisasi 100%, pada tahun 2022 tidak ada target dalam perjanjian kinerja, sedangkan di Tahun 2023 dengan target 90% terealisasi 81.87%.

h. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP		90%	90%	90%	90%

Persentase Perencanaan Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP pada semester 1 tahun 2023 dengan target sebesar 90% terealisasikan sebesar 81,87%, dibandingkan dengan target yang terdapat rencana startegis 2021-2024 yaitu sebesar 90%.

i. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

j. Penyebab Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam merealisasikan target kinerja pada Tahun 2023 dikarenakan terdapat blokir anggaran sebesar 504.000.000 guna pembelian Kendaraan roda 4, Dimana

telah dilakukan Upaya pengajuan buka blokir anggaran sejak Bulan September, akan tetapi belum ada tindak lanjut, sehingga berpengaruh pada laporan keuangan.

k. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan

Adanya pemblokiran anggaran sebesar 504.000.000 guna pembelian Kendaraan roda 4, sehingga berpengaruh pada laporan keuangan.

SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah

Dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM terdapat 3 sasaran program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang didelegasikan di Kantor Wilayah dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah dengan target sebesar 81 pada Tahun 2023 telah tercapai sebesar 97.59.

$$= \frac{\sum hasil\ indeks\ penyelenggaraan\ pemasyarakatan}{\sum target\ indeks\ penyelenggaraan\ pemasyarakatan} x100\%$$

$$= \frac{82}{82} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	82	82	100

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	80	81	97,59	82	82

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		80	81	82	83

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah pada Tahun 2023 dengan target sebesar 82 terealisasikan sebesar 82. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 80, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 81, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 82 di tahun 2023 dan sebesar 83 di tahun 2024, sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di jawa tengah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Dengan hasil indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah jawa tengah sebesar 80 maka sasaran target kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah telah tercapai 100%, hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah jawa tengah telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar

1. **Persentase Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying***

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ tahanan\ overstaying\ okt\ 2022\ -\ Jumlah\ tahanan\ overstaying\ nov\ 2022}{\sum\ \ Jumlah\ tahanan\ overstaying\ okt\ 2022} x100\%$$

$$= \frac{2821-48}{2821} = 98{,}3\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	90	98,3	109,22

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying*	70%	85%	80	31,30	90	98,3

Persentase Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying* di tahun 2021 dengan target 70% terealisasi 85% sedangkan di Tahun 2023 dengan target 90% terealisasi 98,3%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%

Persentase Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying* pada Tahun 2023 dengan target sebesar 90% terealisasikan sebesar 98,3%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024, sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Tercapainya Target

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di jawa tengah.

f. Analisis Kegiatan Tercapainya Target

koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan APH terkait percepatan data, *mapping* dam konsolidasi data tahanan lebih intensif.

2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Tahanan\ Yang\ Memperoleh\ Layanan\ Penyuluhan\ Hukum}{\sum Jumlah\ tahanan} x100\%$$

$$= \frac{2663}{2663} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90	100	111,11

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	75%	80	76,64	90	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum pada Tahun 2023 dengan target 90 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024, sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Tercapainya Target

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di jawa tengah.

f. Analisis Tercapainya Target

koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan APH terkait percepatan data, *mapping* dam konsolidasi data tahanan lebih intensif.

.

3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 93,5%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Tahanan\ yg\ memperoleh\ fasilitasi\ bankum}{\sum Jumlah\ tahanan} x100\%$$

$$= \frac{2796 - 182}{2796} x100\% = 93{,}5\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90	93,5	103,88

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%	75%	80	25,40	90	93,5

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum pada Tahun 2023 dengan target sebesar 90 terealisasikan sebesar 93,5. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Tercapaianya Target

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di jawa tengah.

f. Analisis Tercapaianya Target

koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan APH terkait percepatan data, *mapping* dam konsolidasi data tahanan lebih intensif.

SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian dengan target sebesar 70% tercapai sebesar 92.44%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum \%Narapidana\ yg\ mndapat\ Nilai\ Baik\ dgn\ Predikat\ Memuaskan}{\sum 70\%\ Narapidana} x100\%$$

$$= \frac{92.44}{100} x100\% = 92.44\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70	92.44	132.01

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	70%	65	94,33	70	92.44

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian pada Tahun 2023 dengan target 70 terealisasi 92.44. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 50, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 65, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 70 di tahun 2023 dan sebesar 75 di tahun 2024, sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan pembinaan kepribadian warga binaan pemasyarakatan oleh unit pelaksana teknis.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya pembinaan kepribadian warga binaan pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah menjadi penunjang keberhasilan.

2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi dengan target sebesar 99% tercapai sebesar 92,54%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Narapidana\ yg\ mendapat\ hak\ remisi}{\sum Jumlah\ Narapidana} x100\%$$

$$= \frac{14.066}{15.199} x100\% = 92.54\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99	92.54	93.47

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	95	88,84	99	92.54

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi pada Tahun 2023 dengan target 99 terealisasi 92.54. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 97, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 98, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 99 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024, sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Tidak Tercapainya Target

Jumlah persentase narapidana yang mendapatkan remisi yaitu 14.066 orang dari jumlah narapidana se Jawa Tengah yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi yaitu 15.199 adalah 92.54%. angka tersebut masih kurang dari target yang diberikan yaitu 99%. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat pengusulan adanya kendala dalam melengkapi persyaratan administrasi, salah satunya adalah pemenuhan syarat pengisian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang dilakukan oleh asesor di Lapas/LPKA/Rutan, terdapat pula narapidana yang melakukan kesalahan di dalam Lapas/LPKA/Rutan sehingga tidak dapat diusulkan Remisi. Sehingga diperlukan beberapa rencana guna mengatasi kendala tersebut, diantaranya adalah mendorong Pegawai Lapas /LPKA/Rutan untuk diusulkan menjadi asesor, dan asesor tersebut diharapkan melakukan pendekatan kooperatif dengan narapidana, sehingga syarat administrasi dapat terpenuhi, operator SDP Lapas/Rutan agar segera

mengusulkan remisi susulan bagi narapidana yang pada saat pemberian remisi terdapat kendala.

f. Analisis Tidak Tercapainya Target

Pemenuhan syarat pengisian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang dilakukan oleh asesor di Lapas/LPKA/Rutan, terdapat pula narapidana yang melakukan kesalahan di dalam Lapas/LPKA/Rutan sehingga tidak dapat diusulkan Remisi. Sehingga diperlukan beberapa rencana guna mengatasi kendala tersebut, diantaranya adalah mendorong Pegawai Lapas /LPKA/Rutan untuk diusulkan menjadi asesor, dan asesor tersebut diharapkan melakukan pendekatan kooperatif dengan narapidana, sehingga syarat administrasi dapat terpenuhi, operator SDP Lapas/Rutan agar segera mengusulkan remisi susulan bagi narapidana yang pada saat pemberian remisi terdapat kendala.

3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan target sebesar 85% tercapai sebesar 92,50%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ narapidana\ yg\ mendapatkan\ hak\ integrasi}{\sum Jumlah\ Narapidana} x100\%$$

$$= \frac{4{,}038}{4{,}365} x100\% = 92{,}50\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85	92,50	108,82

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	85%	80	86,23	85	92,50

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2021 dengan target 75 terealisasi 85 sedangkan di Tahun 2023 dengan target 85 terealisasi 92,50.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Tahun 2023 dengan target 85 terealisasi 92,50. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Tercapainya Target

Meminimalisir narapidana yang melakukan kesalahan di dalam Lapas/LPKA/Rutan sehingga dapat diusulkan hak Integrasi dan belum terpenuhinya syarat subtantif dan administratif.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Pemenuhan syarat pengisian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang dilakukan oleh asesor di Lapas/LPKA/Rutan sesuai dengan pembinaan yang ada di dalam Lapas/LPKA/Rutan, rencana untuk diajukannya hak integrasi tidak ada kendala faktor tersebut diantaranya adalah mendorong Pegawai Lapas /LPKA/Rutan untuk diusulkan menjadi asesor, dan asesor tersebut diharapkan melakukan pendekatan kooperatif dengan narapidana, sehingga syarat administrasi dapat terpenuhi.

4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan dengan target sebesar 85% tercapai sebesar 90,24%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ narapidana\ yg\ mendapatkan\ hak\ pendidikan}{\sum Jumlah\ Narapidana} x100\%$$

$$= \frac{111}{123} x100\% = 90{,}24\ \%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85	90,24	106,16

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	80	89,16	80	90,24

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 90,24. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang telah berjalan dengan baik antara unit pelaksana teknis dengan *stakeholder* terkait.

f. **Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang telah berjalan dengan baik antara unit pelaksana teknis dengan stakeholder terkait.

5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin dengan target sebesar 17% tercapai sebesar 109,37%

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

$$= \frac{\sum Jumlah\ narapidana\ resiko\ tinggi\ yg\ berubah}{\sum Jumlah\ Narapidana\ resiko\ tinggi} x100\%$$

$$= \frac{350}{320} x100\% = 109{,}37\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin	17	109,37	643,35

b. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin	13%	20%	15	55,90	17	109,37

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin		13%	15%	17%	19%

Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin pada Tahun 2023 dengan target 17 terealisasi 109,37. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 13, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 15, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 17 di tahun 2023 dan sebesar 19 di tahun 2024.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan terhadap narapidana yang beresiko tinggi.

f. **Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan**

Keberhasilan tersebut didukung karena adanya kegiatan pembinaan mental warga binaan pemasyaraakatan di unit pelaksana teknis yang memiliki narapidana resiko tinggi.

6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi dengan target sebesar 31% tercapai sebesar 151,9%

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

$$= \frac{\sum Jumlah\ narapidana\ yg\ memperoleh\ pendidikan}{\sum Jumlah\ narapidana} x100\%$$

$$= \frac{2.064}{2580} x100\% = 80\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31	151,9	490

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	25%	28	80,00	31	151,9

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi pada Tahun 2023 dengan target 31 terealisasi 151,9. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 25, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 28, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 31 di tahun 2023 dan sebesar 34 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian layanan serta aduan di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang berjalan baik denhgan *stakeholder* terkait.

7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif dengan target sebesar 72% tercapai sebesar 92%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ narapidana\ yg\ bekerja\ dan\ produktif}{\sum Jumlah\ Narapidana} x100\%$$

$$= \frac{10,615}{11.656} x100\% = 92\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72	92	127,78

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	62%	67	86,81	72	92

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%

Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif pada Tahun 2023 dengan target 72 terealisasi 92. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 62, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 67, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 72 di tahun 2023 dan sebesar 77 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya kegiatan pembinaan, pelatihan kepada warga binaan pemasyarakatan.

SASARAN KEGIATAN 8

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar

1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 73,87%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Basan\ baran\ yg\ terjaga\ kualitas\ dan\ kuantitasnya}{\sum 70\%\ Basan\ baran} x100\%$$

$$= \frac{155}{209{,}8} x100\% = 73{,}87\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	80	73,87	92,34

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	60%	70	99,78	80	73,87

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya		60%	70%	80%	90%

Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya tahun 2021 dengan target 70 terealisasi 85 sedangkan di Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 73,87. Sedangkan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Tidak Tercapainya Target

Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT Rupbasan dalam menjaga kualitas dan kuantitas benda sitaan negara.

Ketidakberhasilan dalam merealisasikan target kinerja pada Tahun 2023 dikarenakan terdapat beberapa nilai rekomendasi baran lelang sebesar Rp 425 juta ada penyusutan nilai barang sebesar 10 juta. Seluruh terkondisikan baik dan lengkap.

f. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana, sumber daya manusia dan anggaran pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di wilayah Jawa Tengah dalam menjaga kualitas dan kuantitas dari benda sitaan dan barang rampasan yang berada di wilayah Jawa Tengah.

2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 77,06%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Basan\ baran\ yg\ dikeluarkan}{\sum 60\%\ Basan\ baran} x100\%$$

$$= \frac{252}{327} x100\% = 77{,}06\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	80	77,06	96,34

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	50%	60	71,42	80	77,06

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap		40%	60%	80%	100%

Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 77,06. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu

pada tahun 2021 sebesar 40, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 60, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Belum Tercapainya Target

Belum tercapainya kinerja sesuai dengan target dikarenakan semua basan yang inkrah dieksekusi karena bergantung pada kesiapan APH (jaksa eksekutor).

f. Analisis Kegiatan penyebab belum tercapainya target

Koordinasi antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dengan aparat penegak hukum (APH) perlu ditingkatkan lagi.

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar

1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga dengan target sebesar 60% tercapai sebesar 98,3%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Klien\ usia\ produktif\ yg\ memperoleh\ pekerhaan\ di\ luar\ lembaga}{\sum 50\%\ Klien\ usia\ produktif} x100\%$$

$$= \frac{6067}{6170} x100\% = 98{,}3\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	60	98,3	163,84

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	50%	50	82,53	60	98,3

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		40%	50%	60%	70%

Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga pada Tahun 2023 dengan target 60 terealisasi 98,3. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 40, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 50, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 60 di tahun 2023 dan sebesar 70 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya Kerjasama yang baik dengan *stakeholder* terkait.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan menjadi penunjang keberhasilan.

2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara dengan target sebesar 55% tercapai sebesar 99,02%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum \%Anak\ Yang\ Mendapatkan\ Putusan\ Pidana\ Penjara}{\sum 50\ \%\ jumlah\ anak} x100\%$$

$$= \frac{101}{102} x100\% = 99{,}02\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55	99,02	180,04

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023

	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	50%	55	77,61	60	99,02

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara		50%	55%	60%	65%

Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara pada Tahun 2023 dengan target 60 terealisasi 99,02. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 50, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 55, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 60 di tahun 2023 dan sebesar 65 di tahun 2024.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait.

f. **Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait.

3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya dengan target sebesar 35% tercapai sebesar 60,78%

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

$$= \frac{\sum \%Klien\ Anak\ Yang\ Terpenuhi\ Hak\ Pendidikannya}{\sum 50\ \%\ jumlah\ klien\ anak} x100\%$$

$$= \frac{62}{102} x100\% = 60.78\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35	60,78	173,66

b. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	45%	30	63,70	35	60,78

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya		25%	30%	35%	40%

Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya pada Tahun 2023 dengan target 35 terealisasi 60,78. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 25, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 30, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 35 di tahun 2023 dan sebesar 40 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum terkait.

SASARAN KEGIATAN 10

Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar

1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 93,02%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum \%Anak\ Yang\ Mengikuti\ Kegiatan\ Pendidikan\ Keterampilan}{\sum jumlah\ anak} x100\%$$

$$= \frac{120}{129} x100\% = 93{,}02\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	80	93,02	116,28

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	70%	75	86,90	75	93,02

Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat tahun 2021 dengan target 70 terealisasi 70 sedangkan di Tahun 2023 dengan target 75 terealisasi 86.90. Sedangkan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat		70%	75%	80%	85%

Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat pada Tahun 2023 dengan target 75 terealisasi 86.90. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 75, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 85 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan apparat penegak hukum terkait.

2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi dengan target sebesar 100% tercapai sebesar 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ Anak\ Yang\ Memperoleh\ Hak\ Integrasi}{\sum jumlah\ Anak} x100\%$$

$$= \frac{75}{75} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100	100	100

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100	100	100	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi		100%	100%	100%	100%

Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi pada Tahun 2023 dengan target target 100 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebesar 100.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya usulan anak yang mendapatkan hak integrasi yang tepat waktu.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya dukungan aplikasi SDP yang memberikan kemudahan dalam pengusulan dan pemantauan.

3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar dengan target sebesar 90% tercapai sebesar 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Anak\ Yang\ Memperoleh\ Hak\ Pengasuhan\ Sesuai\ Standar}{\sum\ \ jumlah\ Anak} x100\%$$

$$= \frac{129}{129} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	90	100	111,11

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	70%	80	96,15	90	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar		70%	80%	90%	100%

Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar pada Tahun 2023 dengan target 90 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan *stakeholder* terkait.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan *stakeholder* terkait.

4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan NonFormal dengan target sebesar 90% tercapai sebesar 93%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Anak\ Yang\ Mengikuti\ Pendidikan\ Formal\ Dan\ Non\ Formal}{\sum jumlah\ Anak} x100\%$$

$$= \frac{120}{129} x100\% = 93\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	90	93	103,33

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	70%	80	82,19	80	93

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal		70%	80%	90%	100%

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 93. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 70, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 90 di tahun 2023 dan sebesar 100 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan *stakeholder* terkait.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya koordinasi yang baik dengan *stakeholder* terkait.

SASARAN KEGIATAN 11

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

1. Persentase Pengaduan Yang diselesaikan dengan target sebesar 85% tercapai sebesar 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Pengaduan\ Yang\ diselesaikan}{\sum jumlah\ pengaduan\ yang\ masuk} x100\%$$

$$= \frac{15}{15} x100\% = 100\%\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pengaduan Yang diselesaikan	85	100	117,64

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pengaduan Yang diselesaikan	75%	75%	80	100	85	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase pengaduan yang diselesaikan		75%	80%	85%	90%

Persentase Pengaduan Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 85 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena penyelasaian aduan yang tepat waktu.

2. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 91,65%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Gangguan\ Kamtib\ yang\ dapat\ dicegah}{\sum Seluruh\ gangguan\ kamtib\ yang\ terjadi} x100\%$$

$$= \frac{6071}{6624} x100\% = 91.65\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pencegahan Gangguan Kamtib	80	91,65	114,56

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase pencegahan Gangguan Kamtib	60%	60%	70	116,67	80	91,65

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase pencegahan gangguan kamtib		60%	70%	80%	90%

Persentase pencegahan Gangguan Kamtib pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 91,65. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 70, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam pencapaian target kinerja tersebut karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam mencegah dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah, dengan komitmen bersama menjadikan Lapas/Rutan bebas Halinar.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

UPT Pemasyarakatan telah melakukan kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, dengan melakukan penggeledahan maupun tes urine sebanyak 3 kali dalam seminggu, dan meningkatkan peran Tim Intelijen dalam mendeteksi dini hal – hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtib. Melaksanakan koordinasi dengan APH terkait dalam mencegah gangguan kemanan dan ketertiban di wilayah Jawa Tengah.

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib dengan target sebesar 85% tercapai sebesar 85,26%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Tahanan/Narapidana/Anak\ pelaku\ gangguan\ kamtib\ yang\ mengulangi\ pelanggarannya}{\sum Pelaku\ Gangguan\ Kamtib} x100\%$$

$$= \frac{434}{509} x100\% = 85{,}26\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85	85,26	100

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	85%	80	96,73	85	85,26

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		75%	80%	85%	90%

Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 96.73. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam pembinaan atas kepatuhan dan kedisiplinan warga binaan pemasyarakatan di wilayah jawa tengah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena adanya pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan di wilayah jawa tengah.

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dengan target sebesar 70% tercapai sebesar 100%

$$= \frac{\sum Pemulihan\ kondisi\ keamanan\ pasca\ gangguan\ kamtib\ secara\ tuntas}{\sum \quad Gangguan\ Kamtib} x100\%$$

$$= \frac{100}{100} x100\% = 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Pemulihan\ kondisi\ keamanan\ pasca\ gangguan\ kamtib\ secara\ tuntas}{\sum \quad Gangguan\ Kamtib} x100\%$$

$$= \frac{100}{100} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80	100	125

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	70	100	80	100

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 70, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya upaya pencegahan terjadinya gangguang keamanan dan ketertiban dan mitigasi risiko di unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah.

f. **Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan**

Deteksi dini yang dilakukan oleh Tim Intelijen Pemasyarakatan dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Mitigasi resiko gangguan keamanan dan ketertiban serta koordinasi dengan APH terkait menjadi penunjang keberhasilan.

SASARAN KEGIATAN 12

Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar

1. Persentase Pengaduan Yang diselesaikan dengan target sebesar 85% tercapai sebesar 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Pengaduan\ Yang\ diselesaikan}{\sum jumlah\ pengaduan\ yang\ masuk} x100\%$$

$$= \frac{15}{15} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pengaduan Yang diselesaikan	85	100	117,65

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pengaduan Yang diselesaikan	75%	75%	80	100	85	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase pengaduan yang diselesaikan		75%	80%	85%	90%

Persentase Pengaduan Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah. Dalam kurun waktu tahun 2023 menerima 11 pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan di UPT Pemasyarakatan, dan langsung ditindak lanjuti oleh Kantor Wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena setiap ada pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi ke UPT Pemasyarakatan yang mendapat pengaduan maupun secara langsung Kantor

Wilayah melakukan klarifikasi, sehingga penyelasaian aduan dapat secara cepat ditindaklanjuti.

2. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib dengan target sebesar 70% tercapai sebesar 91,42%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Gangguan\ Kamtib\ yang\ dapat\ dicegah}{\sum Seluruh\ gangguan\ kamtib\ yang\ terjadi} x100\%$$

$$= \frac{6071}{6624} x100\% = 91.65\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pencegahan Gangguan Kamtib	80	91.65	115

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase pencegahan Gangguan Kamtib	60%	60%	70	116,67	80	91,65

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase pencegahan gangguan kamtib		60%	70%	80%	90%

Persentase pencegahan Gangguan Kamtib pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 91,65. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 70, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam pencapaian target kinerja tersebut karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam mencegah dan menjaga keamanan

dan ketertiban di wilayah, dengan komitmen bersama menjadikan Lapas/Rutan bebas Halinar.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

UPT Pemasyarakatan telah melakukan kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, dengan melakukan penggeledahan maupun tes urine sebanyak 3 kali dalam seminggu, dan meningkatkan peran Tim Intelijen dalam mendeteksi dini hal – hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtib. Melaksanakan koordinasi dengan APH terkait dalam mencegah gangguan kemanan dan ketertiban di wilayah Jawa Tengah.

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 96.73%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Tahanan/Narapidana/Anak\ pelaku\ gangguan\ kamtib\ yang\ mengulangi\ pelanggarannya}{\sum Pelaku\ Gangguan\ Kamtib} x100\%$$

$$= \frac{434}{509} x100\% = 85{,}26\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85	85,26	100

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	85%	80	96,73	85	85,26

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		75%	80%	85%	90%

Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 85,26. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan target menjadi 85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam pembinaan atas kepatuhan dan kedisiplinan warga binaan pemasyarakatan di wilayah jawa tengah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena adanya pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan di wilayah jawa tengah.

4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dengan target sebesar 80% tercapai sebesar 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Pemulihan\ kondisi\ keamanan\ pasca\ gangguan\ kamtib\ secara\ tuntas}{\sum \quad Gangguan\ Kamtib} x100\%$$

$$= \frac{100}{100} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80	100	125

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	70	100	80	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas pada Tahun 2023 dengan target 70 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 70, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya upaya pencegahan terjadinya gangguang keamanan dan ketertiban dan mitigasi risiko di unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Mitigasi risiko gangguan keamanan dan ketertiban serta koordinasi dengan APH terkait menjadi penunjang keberhasilan.

SASARAN KEGIATAN 13

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Penerima\ layanan\ makanan\ bagi\ WBP}{\sum \quad jumlahWBP} x100\%$$

$$= \frac{13.789}{13.789} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80	100	125

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71	75	75	89	80	100

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar yang diselesaikan tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100 sedangkan di Tahun 2021 dengan target 71 terealisasi 75, sementara di Tahun 2022 dengan target 75 terealisasi 89.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 71, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 85 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena monitoring dan evaluasi dilakukan secara teratur sehingga target dapat tercapai.

2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ WBP\ mendapatkan\ layanan\ kesehatan\ (preventif)\ secara\ berkualitas}{\sum \quad jumlah\ WBP} x100\%$$

$$= \frac{13.789}{13.789} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94	100	106,38

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92	100	93	100	94	100

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Yang diselesaikan tahun 2021 dengan target 91 terealisasi 100 sedangkan di Tahun 2023 dengan target 94 terealisasi 100. Sedangkan tahun 2022 dengan target 93 terealisasi 100.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 94 terealisasi 100.

Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 92, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 93, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 94 di tahun 2023 dan sebesar 95 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Ketidakberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi Pemasyarakatan berjalan dengan baik.

3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum layanan\ kesehatan\ maternal}{\sum \quad ibu\ hamil\ dan\ menyusui} x100\%$$

$$= \frac{22}{22} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97	100	103,1

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95	100	96	100	97	100

.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%

Persentase Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 97 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 95, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 97, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 97 di tahun 2023 dan sebesar 98 di tahun 2024.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. **Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi Pemasyarakatan berjalan dengan baik.

4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

$$= \frac{\sum WBP\ mengalami\ gangguan\ mental\ dapat\ tertangani}{\sum \quad jumlah\ WBP\ yang\ gangguan\ mental} x100\%$$

$$= \frac{4}{4} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80	100	125

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60	90	70	100	80	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi Pemasyarakatan berjalan dengan baik.

5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum WBP\ lansia\ yang\ mendapatkan\ layanan\ kesehatan}{\sum\ \ WBP\ lansia\ yang\ membutuhkan\ layanan\ kesehatan} x100\%$$

$$= \frac{157}{157} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85	100	117,65

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75	90	80	95	85	100

.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 85 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi Pemasyarakatan berjalan dengan baik.

6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum(Disabilitas)\ yang\ mendapatkan\ layanan\ kesehatan}{\sum\ (Disabilitas)\ yang\ membutuhkan\ layanan\ kesehatan} x100\%$$

$$= \frac{18}{18} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85	100	117,65

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75	100	80	100	85	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 85 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 75, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 85, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 85 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi Pemasyarakatan berjalan dengan baik.

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum WBP\ yang\ sembuh\ HIV - TB}{\sum \quad WBP\ yang\ positif\ HIV - TB} x100\%$$

$$= \frac{27}{27} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh	80	80	100

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023

dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh	60	80	70	90	80	80

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 60, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 80, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 80 di tahun 2023 dan sebesar 90 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi Pemasyarakatan berjalan dengan baik.

8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ Perubahan\ kualitas\ hidup\ narapidana\ penyalahgunaan\ narkotika}{Jumlah\ Narapidana\ penyalahgunaan\ narkotika\ yang\ mendapatkan\ layanan\ Rehabilitasi} x100\%$$

$$= \frac{1884}{1884} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27	36	133,34

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23	60	25	75	27	36

.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Yang diselesaikan pada Tahun 2023 dengan target 27 terealisasi 36. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 23, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 27, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 27 di tahun 2023 dan sebesar 29 di tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah karena komitmen dan upaya dari unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena BINTORWASDAL (pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian) oleh Divisi Pemasyarakatan berjalan dengan baik.

SASARAN KEGIATAN 14

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Berdasarkan data hasil survey kepuasan 3AS Survey Management yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023 diperoleh nilai indeks IKM sebesar 3,96 (sangat baik), dan nilai indeks IPK sebesar 3.63 (sangat baik).

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah target sebesar 3,25 tercapai sebesar 3,96

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman https://survei.balitbangham.go.id. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	*3.95*	*3.97*	*3.96*	*3.98*	*3.92*	*3.95*	*3.94*	*3.95*	*3.97*	*3.93*	*3.95*	*3.98*
Persyaratan	*3.96*	*3.97*	*3.96*	*3.96*	*3.94*	*3.94*	*3.95*	*3.96*	*3.96*	*3.94*	*3.95*	*3.98*
Prosedur/ Alur	*3.96*	*3.97*	*3.97*	*3.97*	*3.94*	*3.95*	*3.95*	*3.94*	*3.96*	*3.94*	*3.94*	*3.97*
Waktu Penyelesaian	*3.95*	*3.96*	*3.96*	*3.97*	*3.91*	*3.92*	*3.93*	*3.95*	*3.96*	*3.94*	*3.94*	*3.97*
Tarif/ Biaya	*3.97*	*3.96*	*3.97*	*3.97*	*3.90*	*3.93*	*3.95*	*3.95*	*3.95*	*3.94*	*3.94*	*3.97*
Sarana/ Prasarana	*3.95*	*3.97*	*3.94*	*3.97*	*3.90*	*3.94*	*3.94*	*3.93*	*3.96*	*3.93*	*3.94*	*3.96*
Respon	*3.96*	*3.96*	*3.96*	*3.97*	*3.91*	*3.94*	*3.94*	*3.95*	*3.96*	*3.93*	*3.93*	*3.97*
Konsultasi/ Pengaduan	*3.96*	*3.97*	*3.96*	*3.97*	*3.91*	*3.93*	*3.93*	*3.95*	*3.96*	*3.93*	*3.95*	*3.97*
Nilai SKM	*3.96*	*3.96*	*3.96*	*3.97*	*3.91*	*3.94*	*3.94*	*3.95*	*3.96*	*3.94*	*3.94*	*3.97*
Responden	*589*	*808*	*714*	*268*	*307*	*440*	*568*	*435*	*372*	*566*	*532*	*364*

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif pada setiap Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Se Jawa Tengah setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden seluruh Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Se Jawa Tengah pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
Y = Responden
I = Bulan ke …

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar *3.96* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) = \frac{((3{,}96 * 589) + (3{,}96 * 808) + (3{,}96 * 714) + (3{,}97 * 268) + (3{,}91 * 307) + (3{,}94 * 440) + (3{,}94 * 568) + (3{,}95 * 435) + (3{,}96 * 372) + (3{,}94 * 566) + (3{,}94 * 532) + (3{,}99 * 336))}{589 + 808 + 714 + 268 + 307 + 440 + 568 + 435 + 372 + 566 + 532 + 336}$$

$$= \frac{23456.80}{5935}$$

$$= 3.95$$

$$= \frac{\sum Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimigrasian}{\sum Target\ indeks} x100\%$$

$$= \frac{3{,}96}{3{,}25} x100\% = 121.6\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,96	121,8

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Divisi Keimigrasian pada tahun 2023, telah tercapai. Indeks Kepuasan Layanan Internal merupakan data informasi tentang tingkat kepuasaan layanan keimigrasian yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pelayanan yang dilakukan oleh UPT Keimigrasian se-Jawa tengah dalam memperoleh pelayanan dari Kantor Imigrasi penyelenggara pelayanan keimigrasian dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Sesuai Peraturan MenpanRB No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Jajaran Keimigrasian Se Jawa Tengah berada dalam kategori **Sangat Baik.**

Dengan nilai kepuasan internal sebesar 3,96 yang melebihi target dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023 (target sebesar 3,25) mengindikasikan bahwa pengguna layanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bisa dikatakan Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya.

Indeks Kepuasan Layanan Internal merupakan data informasi tentang tingkat kepuasaan layanan keimigrasian yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif

dan kualitatif atas pelayanan yang dilakukan oleh UPT Keimigrasian se-Jawa tengah dalam memperoleh pelayanan dari Kantor Imigrasi penyelenggara pelayanan keimigrasian dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dengan nilai kepuasan internal sebesar 3,96 yang melebihi target dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023 (target sebesar 3,25) mengindikasikan bahwa pengguna layanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bisa dikatakan Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3.49	3.15	3,95	3,25	3,96

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,20	3,25	3,30

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada Tahun 2023 dengan target 3,25 terealisasi 3,96. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 3,15, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 3,20, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 3,25 di tahun 2023 dan sebesar 3,30 di tahun 2024, sehingga kantor wilayah perlu mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 yang salah satunya melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui corpu.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar *3.92*, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada *Divisi Keimigrasian* lebih *besar [0.04]* poin atau capaiannya *[0.7%]* jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian IKM Divisi Keimigrasian	Capaian (%)
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	*[3.92]*	*[3.96]*	*[1.02]*

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya anggaran, sarana dan prasarana, serta komitmen dari unit pelaksana teknis keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian terbaik kepada masyarakat.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasialan pencapaian target kinerja tersebut ditunjang oleh kegiatan penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian pengelolaan SDM, sarana prasarana dan administrasi keuangan serta kegiatan pembinaan, pengendalian berupa internalisasi yang rutin dilaksanakan oleh Kantor Wilayah pada UPT Keimigrasian tentang peningkatan pelayanan publik.

Berbagai upaya telah dilakukan kantor wilayah dan satker keimigrasian dalam meningkatkan kulaitas pelayanan keimigrasian melalui peningkatan sarana prasarana, pelayanan berbasis online, informasi melalui media sosial, dsb. Guna mendukung dan meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat telah dilakukan beberapa inovasi dengan tujuan memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat seperti misalnya dalam hal pembuatan paspor seperti SiSemar Layak yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan paspor, dengan cara mengisi formulir pengajuan secara online dan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan ke aplikasi tersebut. Setelah itu, petugas melakukan pemeriksaan secara daring dokumen tersebut. Ketika semua persyaratan disetujui maka pemohon dapat langsung datang ke Kantor Imigrasi semarang untuk melakukan foto dan pemindaian sidik jari.

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah dengan target sebesar 3,12 tercapai sebesar 3,63

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh

Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden *15*. Responden survei pada *Divisi Keimigrasian* melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. *Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Divisi Keimigrasian*. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	*[4]*
2	Penyidikan	10	*[3.37]*
3	TAK	10	*[3.89]*
4	Pengawasan	20	*[3.77]*
5	Pengaduan	20	*[3.89]*
6	Pencegahan	20	*[3.94]*

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	*[3.35]*
2	Penyidikan dan TAK	20	*[3.50]*
3	Pengawasan	20	*[3.50]*
4	Pengaduan	20	*[3.60]*
5	Pencegahan	20	*[3.30]*

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak *7 responden internal dan 8 responden eksternal* dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian *Divisi Keimigrasian* sebesar *3.85 untuk internal dan 3.45 untuk eksternal*.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IPK} = \frac{(nilai\ internal\ x\ responden\ internal)\ +\ (nilai\ ekternal\ x\ responden\ eskternal)}{jumlah\ total\ responden\ internal\ dan\ eksternal}$$

$$= \frac{[3.85\ x\ 7 + 3.45\ x\ 8]}{[15]}$$

$$= [3.63]$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian *Divisi Keimigrasian* sebesar *[3.63]*. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar *[115.97%]*.

Capaian Kinerja :

$$= \frac{\sum Indeks\ Pengamanan\ Keimigrasian\ di\ Wilayah}{\sum Target\ indeks} x100\%$$

$$= \frac{3{,}63}{3{,}13} x100\% = 115.97\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,63	115,97

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian pada tahun 2023, telah tercapai.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	-	-	3,13	3,77	3,13	3,63

Berdasarkan tabel diatas, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah pada Tahun 2023 mempunyai target indeks yang sama yaitu

sebesar 3,13 dengan tahun 2022, sedangkan 2021 tidak memiliki indikator kinerja kegiatan tersebut.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian pada tahun 2023, telah tercapai. Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3.77, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 0.14 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian masih belum stabil dalam kenaikan atau perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah pada Tahun 2023 dengan target 3,13 terealisasi 3,77. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 3,11, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 3,12, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 3,13 di tahun 2023 dan sebesar 3,14 di tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3.63 indeks atau nilai capaian sebesar 115.6%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Secara struktur, berada di bawah Kanwil Jawa Tengah, dimana juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi keimigrasian dengan Kanwil Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 3.74, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian lebih [kecil] [0.11] poin atau capaiannya [2.94%] dibanding dengan Kanwil Jawa Tengah. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3.71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian lebih [kecil] [0.08] poin atau capaiannya [2.15%] dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi..

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasialan pencapaian target kinerja tersebut ditunjang oleh kegiatan penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian pengelolaan SDM, sarana prasarana dan administrasi keuangan serta kegiatan pembinaan, pengendalian berupa internalisasi yang

rutin dilaksanakan oleh Kantor Wilayah pada UPT Keimigrasian tentang peningkatan pelayanan publik.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Terlaksananya kegiatan rapat Tim Pora di wilayah Jawa Tengah dengan stakeholder terkait menjadi penunjang keberhasilan.

SASARAN KEGIATAN 15

Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dengan indikator kinerja:

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah dengan target sebanyak 548 Permohonan telah tercapai sebanyak 710 layanan permohonan (129.56%) yang difasilitasi oleh kantor wilayah jawa tengah, dengan formulasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum permohonan\ yang\ difasilitasi}{\sum jumlah\ permohonan} x100\%$$

$$= \frac{650}{548} x100\% = 118{,}6\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	548 Permohonan	650	118,6

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	600 Layanan	784 layanan	602 Permohonan	2.600 Permohonan	548 Permohonan	710

Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah tahun 2021 dengan target 600 terealisasi 784, di tahun 2022 dengan target 602 terealisasi 2.600. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 548 terealisasi 650.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah		4800 Layanan	4839 Layanan	5081 Layanan	5335 Layanan

Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah pada Tahun 2023 dengan target 548 terealisasi 650. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 4.800, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan target menjadi 4.839, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 5.081 di tahun 2023 dan sebesar 5.335 di tahun 2024, sehingga diperlukan upaya dan strategi untuk mencapai target kinerja yang optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya komitmen dari jajaran Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan SOP.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan secara tepat waktu menjadi penunjang keberhasilan.

2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah dengan target sebanyak 1 lokus telah tercapai sebanyak 2 lokus (200%) pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual, dengan formulasi:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum jumlah\ kegiatan\ yang\ terlakasan}{\sum jumlah\ pelaksanaan\ kegiatan} x100\%$$

$$= \frac{2}{1} x100\% = 200\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	2	200

2 kegiatan terlaksana yaitu Mobile IP Clinic di Solo. Kerja Sama dengan Instansi Lain 10 Kab/Kota. Purworejo, Klaten, Wonogiri, Magelang, Kariadi, Semarang, Batang, Demak, Kendal, Sogan

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023

	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	18 lokus	1 Lokus	48 lokus	1 Lokus	2

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah tahun 1 dengan target 30 terealisasi 18 di tahun 2022 dengan target 1 terealisasi 48. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 2.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		33 Lokus	33 Lokus	33 Lokus	33 Lokus

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah pada Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 48. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 33 lokus.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja.

f. **Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan**

Keberhasilan tersebut karena adanya kegatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2023.

SASARAN KEGIATAN 16

Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal dengan indikator kinerja:

1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan indikator kinerja 100% telah tercapai sebesar 80%, dengan formulasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ aduan\ yang\ terselesaikan}{\sum Jumlah\ aduan} x100\%$$

$$= \frac{4}{4} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100	100

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	80%	100%	100

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2021 dengan target 100 terealisasi 100, tahun 2022 dengan target 100 terealisasi 80, sedangkan pada Tahun 2023 dengan target 100 terealisasi 100.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%	100%

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual pada Tahun 2023 dengan target 100 terealisasi 80. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 100.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan Tercapainya Target

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja.

f. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan tersebut karena adanya kegatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2023.

2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan indikator kinerja sebanyak 2 Lokus tercapai sebanyak 15 Lokus, dengan formulasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ kegiatan\ yg\ terlaksana}{\sum Jumlah\ target\ kegiatan} x100\%$$

$$= \frac{2}{2} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2	100

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	13 Kegiatan	2 Lokus	15 Lokus	2 Lokus	2

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah tahun 2020 dengan target 2 terealisasi 13, di tahun 2021 dengan target 2 terealisasi 15. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 2 terealisasi 2.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		33 Lokus	66 Lokus	66 Lokus	66 Lokus

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah pada Tahun 2023 dengan target 2 terealisasi 15. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sebesar 1 Lokus (33 Lokus dari 33 Kantor Wilayah), sedangkan di Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 2 Lokus (66 lokus dari 33 Kantor Wilayah).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja.

f. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan tersebut karena adanya kegatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2023.

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan indikator kinerja sebanyak 1 laporan tercapai sebanyak 1 laporan (100%), formulasi:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ laporan\ yg\ terselesaikan}{\sum Jumlah\ target\ laporan} x100\%$$

$$= \frac{6}{6} x100\% = 50\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	6 Laporan	6	100

Terlaksana di 3 lokasi yaitu pasar gede, the park mall sukoharjo, solo grand mall.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	6 Laporan	

Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2021 dengan target 1 terealisasi 1 tahun 2022 dengan target 1 terealisasi 1, sedangkan pada Tahun 2023 dengan target 6 terealisasi 6.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan

Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 1. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 56 laporan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait lainnya, serta pelaksanaan yang sejalan dengan perencanaan kinerja.

f. Analisis Kegiatan Penunjang Tercapainya Target

Keberhasilan tersebut karena adanya kegatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual yang dilakukan kantor wilayah di berbagai daerah selama Tahun 2023.

SASARAN KEGIATAN 17

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Sasaran kegiatan Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah dengan indikator kinerja Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham dengan target sebesar 80% dan telah direalisasikan sebesar 100% rancangan produk hukum daerah yang terfasilitasi, dimana peran dari perancang peraturan perundang-undangan sangat berkontribusi terhadap capaian kinerja kantor wilayah jawa tengah dalam menfasilitasi raperda di wilayah jawa tengah.

Jumlah Raperda yang terfasilitasi oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 yaitu sejumlah 527 Raperda dari 577 permohonan dengan formulasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Raperda\ yg\ terfasilitasi\ Kanwil}{\sum Jumlah\ raperda} x100\%$$

$$= \frac{1625}{1625} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100	125

Dengan capaian sebesar 100% melebihi dari target sebesar 80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham maka bisa dikatakan

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	89,14% (Jumlah permohonan selesai 197 dari total permohonan sebanyak 221)	80%	97% (Jumlah permohonan selesai 364 dari total permohonan sebanyak 375)	80%	100% (Jumlah permohonan selesai 1625 dari total permohonan sebanyak 1625)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan jumlah permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah setiap tahunnya. Hal tersebut dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Jumlah peningkatan secara signifikan terdapat pada tahun 2023 sebanyak 1625 permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan, dengan jumlah selesai sebanyak 1625 Raperda/Raperkada..

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham		80%	80%	80%	80%

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham pada Tahun 2023 dengan target 80 terealisasi 100. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebesar 80.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan dalam SOPAP Nomor W.13-PP.04.02-1 tanggal 4 Januari 2023 yang mempedomani Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta dukungan anggaran pembentukan regulasi dalam upayanya mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2023

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah secara simultan dan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah pada bulan Februari-Maret 2023. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang bertujuan meningktkan kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

SASARAN KEGIATAN 18

Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dengan target sebanyak 22 Orang telah direalisasikan sebanyak 22 Orang (100%) mendapatkan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan yang mengindikasikan kinerja kantor wilayah yang optimal dalam mencapai target kinerja.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Peningkatan\ kapasitas\ pembinaan\ tenaga\ perancang}{\sum Target\ pembinaan} x100\%$$

$$= \frac{21}{22} x100\% = 95.45\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 Orang	21 Orang	95,45

Grafik 3.5. Capaian Kinerja Program Pembentukan Regulasi Tahun 2023

Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui penilaian angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugasnya belum memenuhi capaian. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya sebanyak 21 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melakukan penilaian angka kredit, dari target yang ditetapkan sebanyak 22 orang. Hal ini menjadi perhatian dari Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk segera ditindaklanjuti dengan membuat berita acara penilaian angka kredit yang akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan supervisi dan monitoring penilaian angka kredit oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Juli 2023.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	21 orang

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tahun 2020 dengan target 22 terealisasi 22, di tahun 2021 dengan target 22 terealisasi 40. Sedangkan Tahun 2023 target 22 terealisasi 21.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		618 Orang	618 Orang	618 Orang	618 Orang

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada Tahun 2023 dengan target 22 terealisasi 21. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 618 orang dari 33 Kantor Wilayah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Ketidakberhasilan

Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui penilaian angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugasnya belum memenuhi capaian. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya sebanyak 21 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melakukan penilaian angka kredit, dari target yang ditetapkan sebanyak 22 orang. Hal ini menjadi perhatian dari Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk segera ditindaklanjuti dengan membuat berita acara penilaian angka kredit yang akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan supervisi dan monitoring penilaian angka kredit oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Juli 2023.

f. Analisis Kegiatan penunjang ketidakberhasilan

Koordinasi yang telah berjalan baik dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan menjadi penunjang keberhasilan. Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja kedepannya secara umum antara lain dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah (Kab/Kota) untuk memberikan layanan fasilitasi penyusunan Raperda di wilayah jawa tengah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitasi rancangan produk hukum di daerah melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan dalam mengakses layanan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas serta peran pembinaan perancang peraturan perundang-undangan melalui pelatihan dan pendidikan..

SASARAN KEGIATAN 19

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM dengan target sejumlah 8 instansi pemerintah tercapai sebanyak 36 instansi pemerintah yang terdiri dari 1 Instansi pemerintah provinsi jawa tengah dan 35 instantsi pemerintah kab/kota di wilayah jawa tengah. Hasil tersebut tidak terlepas dari Kerjasama dan koordinasi yang telah terjalin baik antara kantor wilayah dengan instansi pemerintah daerah di wilayah jawa tengah, formulasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ instansi\ pelaksana\ program\ aksi\ HAM}{\sum Jumlah\ target\ instansi\ pelaksana\ program\ aksi\ HAM} x100\%$$

$$= \frac{36}{9} x100\% = 400\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	9 Instansi Pemerintah	36	400

- 36 Kab/Kota mengirimkan pelaporan Capaian Aksi HAM B04
- 5 Kab/Kota tidak mengirimkan Pelaporan Capaian Aksi HAM B04

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	15 Instansi Pemerintah	35 Pemerintah Kab/Kota	8 Instansi Pemerintah	35 PemKab/Kota 1 PemProv	9 Instansi Pemerintah	35 PemKab/Kota 1 PemProv

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM tahun 2021 dengan target 15 terealisasi 35, di tahun 2022 dengan target 8 terealisasi 36. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 9 terealisasi 36.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM pada Tahun 2023 dengan target 9 terealisasi 32. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 109 instansi pemerintah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena koordinasi yang telah berjalan baik dengan pemerintah daerah di wilayah jawa tengah dalam mendukung pelaksanaan program aksi HAM.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan adanya kegiatan koordinasi

dengan pemerintah daerah dalam merealisasikan program aksi HAM di wilayah Jawa Tengah

2. Jumlah kab/kota peduli HAM dengan target sejumlah 5 instansi pemerintah tercapai 34 pemerintah kab/kota. Kinerja kantor wilayah jawa tengah dalam hal mendorong instansi pemerintah daerah mendapat penghargaan predikat kabupaten/kota peduli HAM Tahun 2023 di wilayah jawa tengah dengan capaian tersebut bisa dikatakan optimal dengan mencapai 680% dari yang ditargetkan dalam dokumen perjanjian kinerja, formulasi:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ kab/kota\ peduli\ HAM}{\sum Jumlah\ target\ kab/kota\ peduli\ HAM} x100\%$$

$$= \frac{34}{5} x100\% = 680\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Kab/Kota	34	680

- 35 Kab/Kota mengirimkan pemenuhan indikator KKP HAM
- 34 Kab/Kota mendapatkan predikat KKP HAM
- Hasil penilaian kab/kota Peduli HAM diumumkan pada tanggal 10 Desember 2023 (Peringatan Hari HAM Sedunia)

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Kab/Kota	34 Kab/Kota	5 Kab/Kota	20 Kab/kota	5 Kab/Kota	34 Kab/Kota

Jumlah kab/kota peduli HAM tahun 2021 dengan target 5 terealisasi 34, di tahun 2022 dengan target 5 terealisasi 20. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 5 terealisasi 34.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

jumlah kab/kota peduli HAM		57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah

Jumlah kab/kota peduli HAM pada Tahun 2023 dengan target 5 terealisasi 20. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021

sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 57 instansi pemerintah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena koordinasi yang telah berjalan baik dengan pemerintah daerah di wilayah jawa tengah dalam mendukung kab/kota peduli HAM.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan adanya fasilitasi penilaian kab/kota peduli HAM serta kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kab/kota peduli HAM di wilayah Jawa Tengah Tahun 2023.

3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM dengan target sejumlah 2 instansi pemerintah tercapai sebanyak 4 instansi pemerintah di wilayah jawa tengah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum instansi\ menindaklanjuti\ hasil\ diseminasi\ penguatan\ HAM}{\sum Jumlah\ target\ instansi} x100\%$$

$$= \frac{4}{2} x100\% = 200\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	4	400

- 71 UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah melaksanakan Pencanangan pada 6 Juni 2022
- 2 UPTD Pemerintah Daerah telah mendapatkan penghargaan sebagai UPTD Percontohan P2HAM

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui	1 Instansi Pemerintah	52 satuan kerja	1 Instansi Pemerintah	52 satuan kerja	1 Instansi Pemerintah	4 satuan kerja

pelayanan publik berbasis HAM						

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM tahun 2020 dengan target 1 terealisasi 52, di tahun 2021 dengan target 1 terealisasi 52. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 4.

Terdapat 3 UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dan 1 Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM pada Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 4. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 33 Instansi Pemerintah dari 33 Kantor Wilayah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan adanya dan adanya koordinasi yang berjalan baik dengan pemerintah daerah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 yaitu terdapat 3 UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dan 1 Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah tidak terlepas dari upaya koordinasi dalam pembinaan Lembaga publik berbasis HAM di wilayah Jawa Tengah.

SASARAN KEGIATAN 20

Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum rekomendasi\ perlindungan\ dan\ pemenuhan\ HAM\ di\ wilayah}{\sum Jumlah\ target\ rekomendasi} x100\%$$

$$= \frac{4}{3} x100\% = 133{,}34\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133,34

1. Surat No. W.13-HA.01.01-4 perihal Rekomendasi Penehanan Ijazah;
2. Surat No. W13-HA.01.01-91 perihal Informasi Permasalahan Rumah Dinas PT. KAI;
2) Surat No. W.13-HA.01.01-342 perihal Informasi Permasalahan Tanah Waris;
3) Surat No. W.13-HA.01.01-358 perihal Informasi Permasalahan Anak.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	7 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah tahun 2021 dengan target 3 terealisasi 3, di tahun 2022 dengan target 3 terealisasi 7. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 3 terealisasi 4.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah pada Tahun 2023 dengan target 3 terealisasi 4. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 99 rekomendasi dari 33 kantor wilayah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran dan komitmen dari kantor wilayah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi penunjang keberhasilan.

SASARAN KEGIATAN 21

Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dengan target sebanyak 2 kegiatan telah terlaksana sebanyak 2 kegiatan, dengan formulasi:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ kegiatan\ yg\ terlaksana}{\sum Jumlah\ target\ kegiatan} x100\%$$

$$= \frac{2}{2} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2	100

Dengan capaian sebesar 2 kegiatan dari target sebesar 2 kegiatan menunjukan bahwa Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya. Dua kegiatan dimaksud terdiri dari kegiatan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dan fasilitasi perencanaan penyusunan Program Legislasi Daerah. Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah dan analisis dan evaluasi produk hukum daerah telah selesai dilaksanakan. Dimana untuk kegiatan analisis dan evaluasi hukum telah dilaksanakan dengan kegiatan meliputi persiapan analisis dan evaluasi hukum dan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum, sedangkan untuk kegiatan fasilitasi penyusunan

perencanaan legislasi daerah sudah dilaksanakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2-HN.02.02-03 dan kegiatan Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan Surat Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.3-HN.01.01-03 tanggal 27 Januari 2023, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah telah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya..

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mampu mencapai target pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Pada Tahun 2023 telah dilaksankan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara subtantif maupun teknis. Disamping itu terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimana dari hasil analisis dan evaluasi hukum didapatkan rekomendasi apakah produk hukum daerah yang dimaksud diubah, dicabut ataupun tetap. Hasil analisis dan evaluasi hukum ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan program legislasi daerah. Sedangkan

untuk kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah telah dilaksanakan dimulai dari tahap perencanaan pada bulan Mei dan berakhir dengan penyusunan laporan akhir pada bulan November. Laporan akhir analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah disampaikan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Desember. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2.HN.02.02-03. Surat ini menjadi Petunjuk dalam pelaksanaan Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA). Pedoman ini dikeluarkan setelah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah telah dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah saat ini tengah berlangsung dengan kegiatan Penyusunan rekomendasi pada bulan Juli. Proses pembentukan kelompok kerja telah dilaksanakan pada bulan maret 2023, Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah telah dilaksanakan pada bulan Januari 2023, Forum Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023, Penyusunan rekomendasi analisis dan evaluasi telah dilaksanakan pada bulan agustus 2023 dan laporan akhir analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Pariwisata telah dilaporkan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Desember. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah pada Tahun 2023 dengan target 2 terealisasi 2. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 66 kegiatan dari 33 kantor wilayah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempedomani Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03.08 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah serta dukungan anggaran pembentukan regulasi dalam upayanya mewujudkan layanan internal yang optimal di kantor wilayah Tahun 2023.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya sinergitas dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan adanya komitmen bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah. Melalui upaya tersebut, Kantor Wilayah hadir dalam melakukan pendampingan fasilitasi analisis dan evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah.

SASARAN KEGIATAN 22

Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah

1. **Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

Pada Tahun 2023 jumlah permohonan bantuan hukum litigasi di wilayah yaitu sejumlah 1481, dimana diantaranya 1358 permohonan telah dilayani (91,69%) Kantor Wilayah. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 81% telah tercapai sebesar 91,69% dengan formula sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ permohonan\ bankum\ litigasi\ yg\ terselesaikan}{\sum Jumlah\ permohonan\ bantuan\ hukum\ litigasi} x100\%$$

$$= \frac{1358}{1481} x100\% = 91{,}69\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	91,69	113,19

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 91,69 diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 1.358 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 1.481 permohonan. Sedangkan capaian 113,19% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 91,69 dengan target 81.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	98,14%	81%	88.59%	81%	91,69

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2021 dengan target 77 terealisasi 98.14, di tahun 2022 dengan target 81% terealisasi 88.59%. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 81% terealisasi 91,69%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	81%	81%	81%

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2023 dengan target 81% terealisasi 91,69%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 dengan target sebesar 77%, sedangkan di Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 81%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi penunjang keberhasilan, serta adanya sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait dengan Standar Layanan Bantuan Hukum.

2. Tahun 2023 jumlah permohonan bantuan hukum non-litigasi di wilayah yaitu sejumlah 474, dimana 389 permohonan diantaranya telah dilayani (82.07%) Kantor Wilayah. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 80% telah tercapai sebesar 91,75% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ permohonan\ bankum\ non\ litigasi\ yg\ terselesaikan}{\sum Jumlah\ permohonanbantuan\ hukum\ non-litigasi} x100\%$$

$$= \frac{378}{412} x100\% = 91{,}75\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	91,75	114,69

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 67,23 diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (*reimbursement*) sejumlah 378 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 412 permohonan. Sedangkan capaian 114,69% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 91,75 dengan target 80.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	86,59%	80%	82.07%	80%	91,75

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2021 dengan target 79 terealisasi 86.59, di tahun 2022 dengan target 80% terealisasi 82.07%. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 80% terealisasi 91,75%.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	80 %	80 %	80 %

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2023 dengan target 80% terealisasi 91,75%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 dengan target sebesar 79% sedangkan pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 80%.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, sarana prasarana dan penyelesaian permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani di wilayah yang terselesaikan secara tepat waktu.

f. **Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan**

Kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi penunjang keberhasilan, serta adanya sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait dengan Standar Layanan Bantuan Hukum.

3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dengan target sebesar 76.61% telah tercapai sebesar 76,96% (100,46%) dengan formulasi sebagai berikut:

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,96	100,46

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks kepuasan layanan Bantuan Hukum, dengan angka realisasi 76,96 diperoleh dari jumlah rata-rata nilai monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kepada 836 orang penerima Bantuan Hukum Litigasi. Sedangkan capaian 100,46% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 76,96 dengan target 76,61.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	68,42%	76.61%	71.21%	76,61	76,69

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2021 dengan target 76.61 terealisasi 76,69, di tahun 2022 dengan target 76,61% terealisasi 71.21%. Pada Tahun 2023 dengan target 76,61% terealisasi 78.99%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	76,61%	76,61%	76,61%

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum pada Tahun 2023 dengan target 76,61% terealisasi 76,69%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 76,61%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran dan penyelesaian layanan bantuan hukum yang terselesaikan secara tepat waktu.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan pengawasan dan pelaksanaan bantuan hukum menjadi penunjang keberhasilan, serta adanya sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait

dengan Standar Layanan Bantuan Hukum.

4. Jumlah Desa Sadar Hukum di wilayah jawa tengah yaitu sebanyak 96 sadarkum. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dengan target sebesar 70% telah tercapai sebesar 77,42%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ desa\ sadar\ hukum\ yg\ terbentuk}{\sum Jumlah\ desa\ sadar\ hukum} x100\%$$

$$= \frac{96}{124} x100\% = 77{,}42\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	77,42	110,60

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, pada Semester II Tahun 2022 realisasi 0 karena masih dilaksanakan proses pengumpulan data dukung penilaian sebagai dasar usulan kepada Gubernur, sedangkan pada Semester II Tahun 2023 realisasi 77,42 diperoleh dari perbandingan antara jumlah 96 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang mendapatkan penetapan dari Gubernur untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan jumlah 124 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	85,71%	70%	100.00%	70%	77,42

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah tahun 2021 dengan target 70% terealisasi 85,71%, tahun 2022 dengan target 70% terealisasi 100%, di Tahun 2023 dengan target 70% terealisasi 77,42%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah pada Tahun 2023 dengan target 70% terealisasi 77,42%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 70%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah tidak terlepas dari peran seluruh jajaran Kantor Wilayah, anggaran yang tersedia, sarana prasarana serta dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan OBH terakreditasi di Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung dan mewujudkan sasaran meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah pada Semester II Tahun 2023.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. Adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, sosialisasi dan pengawasan kepada OBH terakreditasi terkait dengan Standar Layanan Bantuan Hukum, serta koordinasi dan komunikasi dengan BPHN selaku pembina kegiatan di wilayah

5. Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif dengan target sebesar 20% telah tercapai sebesar 74%. Dari 100 anggota JDIHN hanya sejumlah 74 anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif, meskipun masih terdapat anggota JDIHN yang belum memiliki pengelola dan membentuk web JDIH; Terdapat anggota JDIHN yang telah membentuk web JDIH namun tidak melaksanakan pengelolaan JDIH karena adanya keterbatasan SDM dan sarana prasarana.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Jumlah\ website\ anggota\ JDIHN\ yg\ terintegrasi}{\sum Jumlah\ anggota\ JDIHN} x100\%$$

$$= \frac{74}{100} x100\% = 74\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif	20%	74	370

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN, Semester II Tahun 2022 dengan angka realisasi 80 diperoleh dari jumlah anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah yang aktif, namun pada Semester II Tahun 2023 jumlah tersebut menurun menjadi realisasi 74 karena beberapa website JDIH dinyatakan sudah tidak aktif dan belum dilaksanakan pengaktifan dan pengintegrasian kembali dengan website JDIHN.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif	20%	100%	20%	80.00%	20%	74

Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif tahun 2021 dengan target 20% terealisasi 100%, pada tahun 2022 dengan target 20% terealisasi 80%, sedangkan di Tahun 2023 dengan target 20% terealisasi 74%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		20%	20%	20%	20%

Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif pada Tahun 2023 dengan target 20% terealisasi 74%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 20%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya monev pengelolaan dan pengembangan JDIH di wilayah Jawa Tengah.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah menjadu penunjang keberhasilan.

SASARAN KEGIATAN 23

Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran kegiatan Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dengan indikator kinerja:

1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dengan target kinerja sebesar 80% telah tercapai sebesar 100% mengindikasikan bahwa kantor wilayah dapat mencapai kinerja yang ditargetkan.

   a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Rekomendasi\ hasil\ kajian\ sebagai\ bahan\ litbang}{\sum Rekomendasi\ yang\ dihasilkan} x100\%$$

$$= \frac{4}{4} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100	125

Kegiatan SIPKUMHAM sudah dilaksanakan di Triwulan I pada tanggal 20 Maret 2023, Triwulan II pada tanggal 20 Juni 2023, Triwulan III pada tanggal 6 September 2023, dan Triwulan IV pada tanggal 7 Desember 2023

   b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	100%	80%	100%	80%	100

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia tahun 2020 dengan target 60% terealisasi

100%, di tahun 2021 dengan target 70% terealisasi 100%. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 80% terealisasi 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	80%	80%	80%

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia pada Tahun 2023 dengan target 80% terealisasi 100%. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 80%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan pengkajian kebijakan hukum dan HAM di Wilayah menjadi pernunjang keberhasilan.

2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah dengan target sebanyak 1 buku tercapai sebanyak 1 buku (100%).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum Hasil\ penelitian\ hukum\ dan\ HAM\ yg\ disosialisasikan}{\sum Target\ \ penelitian\ hukum\ dan\ HAM\ yg\ disosialisasikan} x100\%$$

$$= \frac{1}{1} x100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100

Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah jawa tengah telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023

dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah tahun 2020 dengan target 1 terealisasi 1, di tahun 2021 dengan target 1 terealisasi 1. Sedangkan Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 1.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah pada Tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 1. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebanyak 1 buku.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2023 karena adanya dukungan anggaran, SDM dan sarana prasarana.

f. Analisis Kegiatan penunjang keberhasilan

Kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah menjadi penunjangn keberhasilan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 9 (sembilan) Petikan DIPA dari masing-masing unit Eselon I. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah Antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	PROGRAM (ESELON I)	2023				2022			
		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)
1	Program Dukungan Manajemen (Sekretariat	28,324,432,000	27,995,666,444	98,84	328,765,556	24,662,487,000	24,488,896,818	99.30	173,590,182

NO	PROGRAM (ESELON I)	2023				2022			
		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	SISA TOTAL (RP)
	Jenderal)								
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	4,811,600,000	4,794,279,920	99,64	17,320,080	4,184,000,000	4,157,198,483	99.36	26,801,517
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)	1,344,182,000	1,340,399,830	99,72	3,782,170	1,536,208,000	1,534,666,010	99.90	1,541,990
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	1,497,828,000	1,496,140,645	99,89	1,687,355	1,317,828,000	1,316,551,004	99.90	1,276,956
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	1,863,881,000	1,854,403,807	99,49	9,477,193	1,190,054,000	1,188,069,266	99.83	1,984,734
6	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	367,000,000	364,024,678	99,19	2,975,322	272,000,000	270,968,422	99.62	1,031,578
7	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	315,238,000	314,519,485	99,77	718,515	304,738,000	303,570,370	99.62	1,167,630
8	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	6,151,171,000	6,120,698,738	99,50	30,472,262	4,092,434,000	4,065,876,106	99.35	26,557,894
9	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	200,351,000	200,324,955	99,99	26,045	136,437,000	136,368,700	99.95	68,300
Jumlah		**44,875,683,000**	**44,480,458,502**	**99,12**	**395,224,498**	**37,696,186,000**	**37,462,165,179**	**99.38**	**234,020,821**

Dari perbandingan Alokasi anggaran Tahun 2023 dan tahun 2022 diatas, terdapat beberapa Program yang mengalami kenaikan dan ada pula Program yang mengalami penurunan. Terdapat 7 (tujuh) alokasi anggaran yang mengalami kenaikan yaitu pada Program (Eselon I): a. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal); b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum); c. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian); d. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); e. Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan); f. Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia); g. Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM).

Sedangkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan yaitu pada 2 (dua) Program (Eselon I): a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); b. Program Pembentukan Regulasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Badan

Pembinaan Hukum Nasional).

Total realisasi anggaran 9 Petikan DIPA dari unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah 99,12% dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 44,875,683,000,-, dengan total sisa anggaran Rp. 395,224,498,-.

Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2023 masih kurang jika dibandingkan realisasi di tahun 2022, dimana pada Tahun 2023 dapat terserap sebesar 99,38% dari total anggaran, sementara di tahun 2023 mampu terserap 99,12% dari total anggaran. Jumlah anggaran yang tersisa di akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 395,224,498,-, dan pada tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 234,020,821,-.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam mengukut kinerja anggaran yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah pada Tahun 2023 dapat diukut melalui beberapa capaian nilai diantaranya Capaian Nilai SMART, IKPA, dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)

Grafik 3.8. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) Tahun 2023

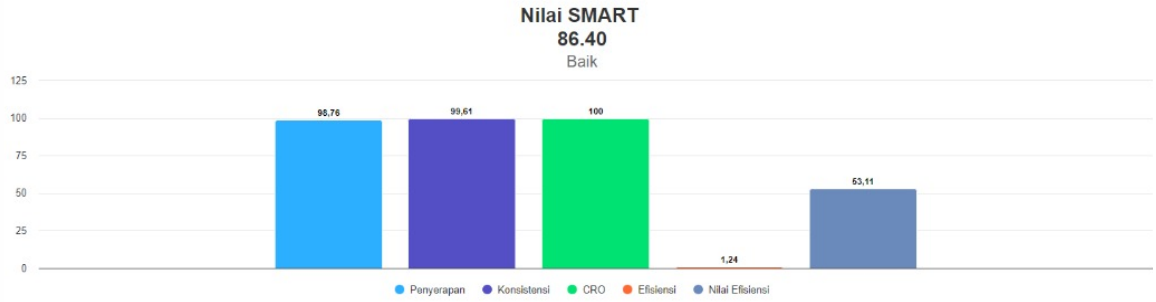

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	14.744.787.000	14.582.181.862	98.90 %
52 Belanja Barang	11.450.839.000	11.261.991.405	98.35 %
53 Belanja Modal	2.128.806.000	2.128.449.488	99.98 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	83.12	96.59	93.33	100.00	97.67	100.00	100.00	96.73	100%	96.73
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.31	19.32	9.33	10.00	9.77	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.56		97.52					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 86,40, dan nilai IKPA sebesar 96,73.

Nilai penyerapan sebesar 93,96, konsistensi sebesar 99,21, CRO sebesar 68,14, efisiensi sebesar -1,51, dan Nilai efisiensi sebesar 46,22.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp. 28,324,432,000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 27,995,666,444,- (98,84%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 328,765,556,-. dengan capaian anggaran tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah di bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)

Grafik 3.9. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) Tahun 2023

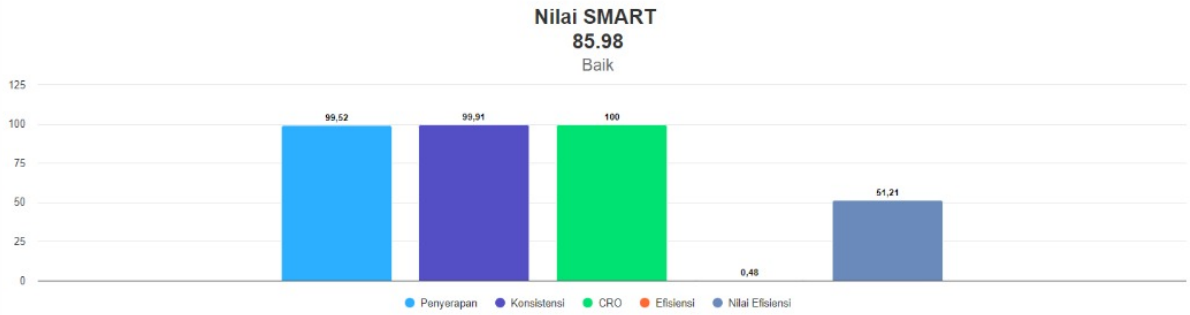

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	4.811.600.000	4.788.379.920	99.52 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408743	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	94.94	98.04	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	89.10	90%	99.00
					Bobot	10	10	20	10	10	0	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.49	19.61	10.00	10.00	0.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	97.47		99.51					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 85,98, dan nilai IKPA sebesar 99.

Nilai penyerapan sebesar 99,52, konsistensi sebesar 99,91, CRO sebesar 27,21, efisiensi sebesar -17,61, dan Nilai efisiensi sebesar 5,96.

Dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.4,811,600,000,- tersebut dapat direalisasikan Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 4,794,279,920,- (99,64%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 17,320,080,-.

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

Grafik 3.10. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Tahun 2023

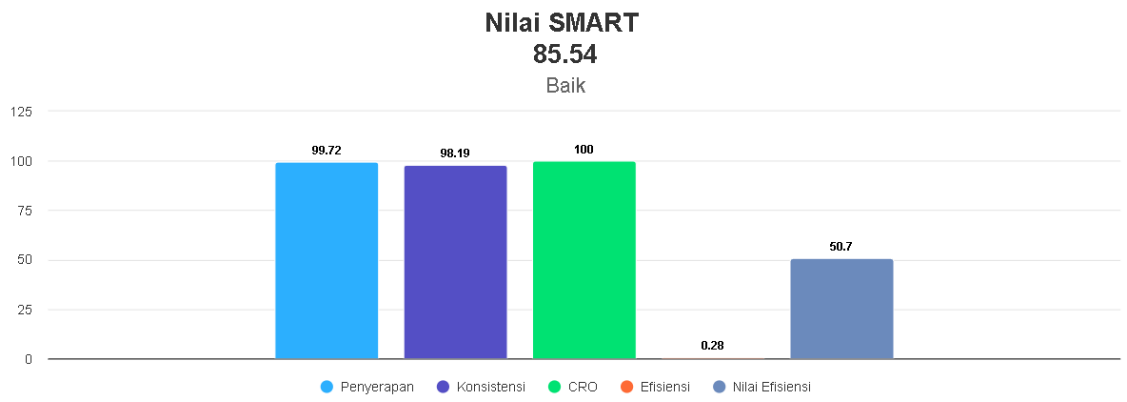

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	1.344.182.000	1.340.399.830	99.72 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408744	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	82.77	99.19	100.00	100.00	98.13	100.00	100.00	97.93	100%	97.93
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.28	19.84	10.00	10.00	9.81	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.39		99.46					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 85,54, dan nilai IKPA sebesar 97,93.

Nilai penyerapan sebesar 99,72, konsistensi sebesar 98,19, CRO sebesar 100, efisiensi sebesar 0.28, dan Nilai efisiensi sebesar 50,7.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.1,344,182,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,340,399,830,- (99,72%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3,782,170,-.

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)

Grafik 3.11. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Imigrasi) Tahun 2023

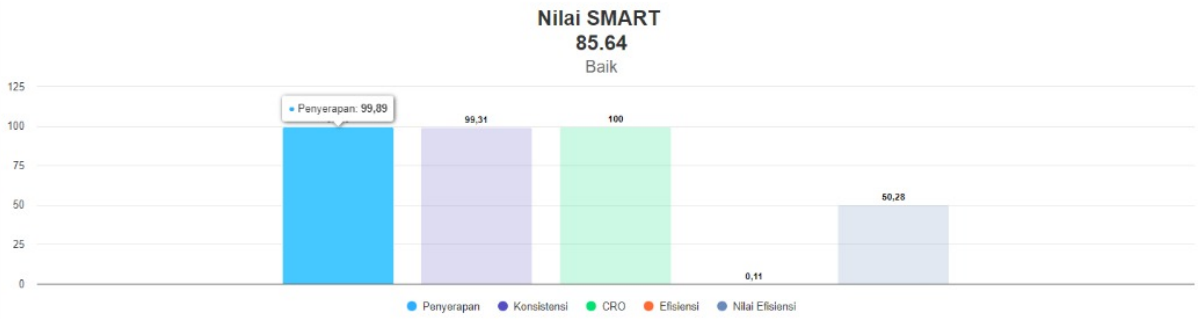

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	1.497.828.000	1.496.140.645	99.89 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408745	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	90.74	99.02	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	68.88	70%	98.40
					Bobot	10	10	20	0	0	0	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.07	19.80	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.37		99.51					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 85,64, dan nilai IKPA sebesar 98,51.

Nilai penyerapan sebesar 99,89, konsistensi sebesar 99,31, CRO sebesar 40,04, efisiensi sebesar -20, dan Nilai efisiensi sebesar 0.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.1,497.828,000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 1,496,140,645,- (99,89%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1,687,355,-.

5. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

Grafik 3.12. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Tahun 2023

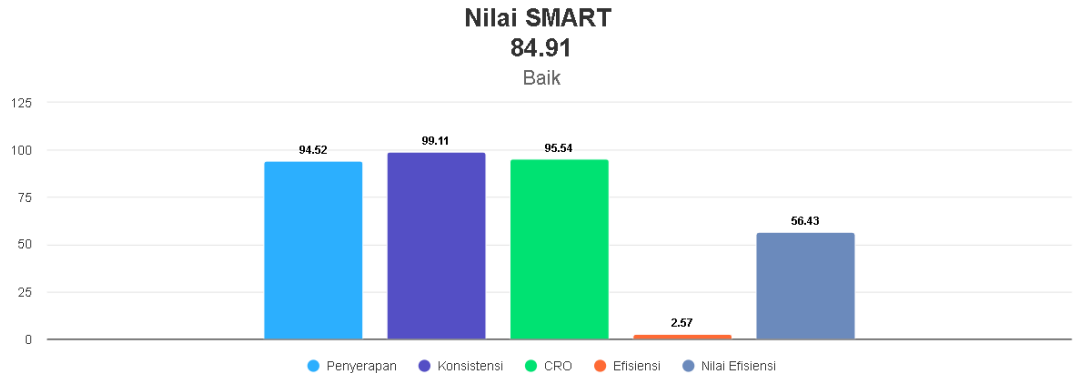

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	1.863.881.000	1.761.824.733	94.52 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408746	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	86.58	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	88.66	90%	98.51
					Bobot	10	10	20	10	10	0	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.66	20.00	10.00	10.00	0.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.29		100.00					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 84,91 (sangat baik), dan nilai IKPA sebesar 98,51.

Nilai penyerapan sebesar 94,52, konsistensi sebesar 99,11, CRO sebesar 95,54, efisiensi sebesar 2,57, dan Nilai efisiensi sebesar 56,43.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.1,863,881,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,854,403,807,- (99,49%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9,477,193,-.

6. Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)

Grafik 3.13. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) Tahun 2023

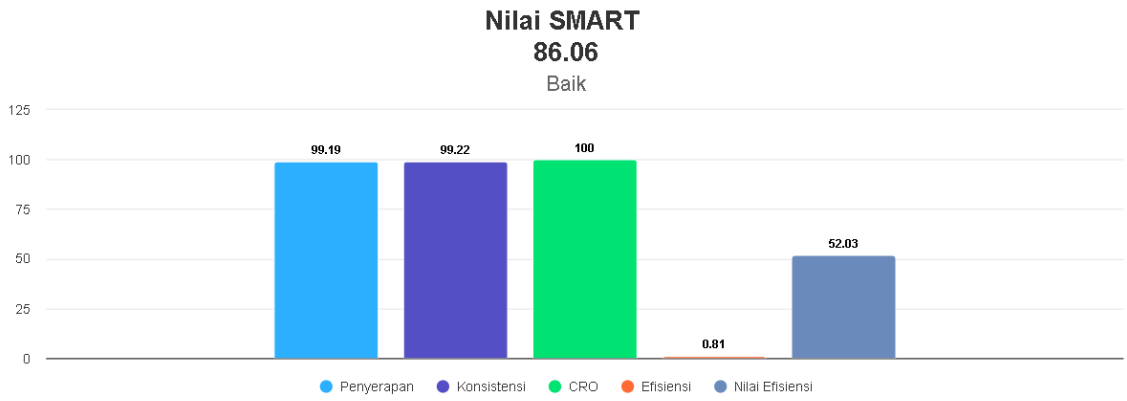

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	367.000.000	364.024.678	99.19 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408747	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	78.41	100.00	0.00	0.00	89.69	100.00	100.00	76.81	80%	96.01
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.84	20.00	0.00	0.00	8.97	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	89.21		96.56					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 86,06, dan nilai IKPA sebesar 96,01.

Nilai penyerapan sebesar 99,19, konsistensi sebesar 99,22, CRO sebesar 100, efisiensi sebesar 0,81, dan Nilai efisiensi sebesar 52,03.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.367,000,000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 364,024,678,- (99,19%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2,975,322,-.

7. Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)

Grafik 3.14. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) Tahun 2023

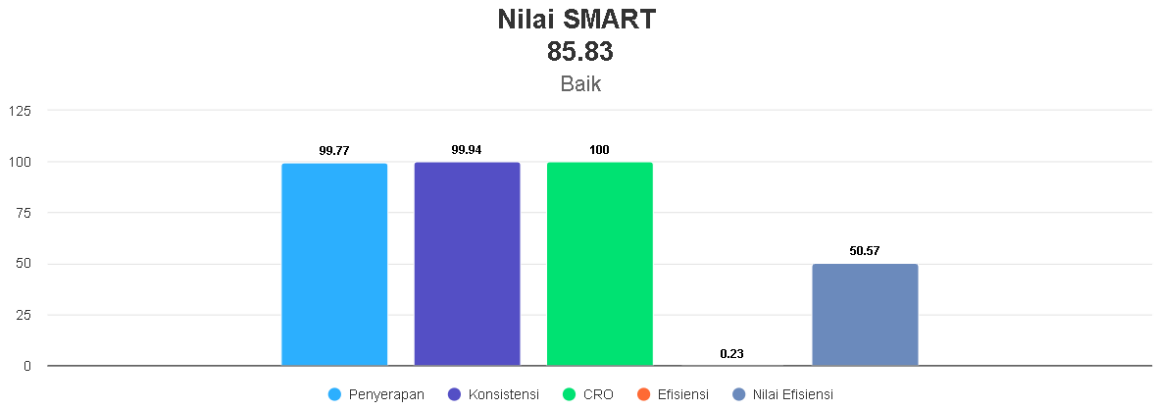

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	315.238.000	314.519.485	99.77 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408748	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.56	100.00	100.00	79.96	80%	99.95
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	9.96	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		99.85					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia) di Kantor Wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 85,83, dan nilai IKPA sebesar 99,95.

Nilai penyerapan sebesar 99,77, konsistensi sebesar 99.94, CRO sebesar 100, efisiensi sebesar 0,23, dan Nilai efisiensi sebesar 50,57.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.315.238,000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 314,519,485,- (99,77%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 718,515,-.

8. Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Grafik 3.5. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Pembentukan

Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Tahun 2023

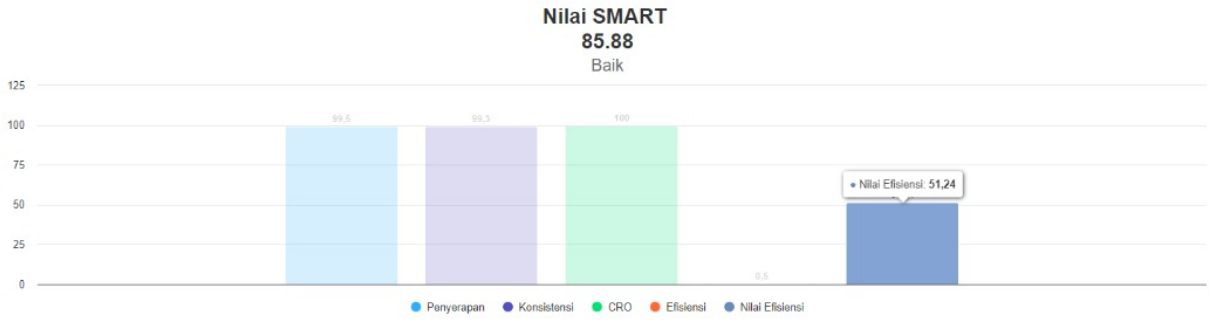

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	6.131.171.000	6.100.698.738	99.50 %
53 Belanja Modal	20.000.000	20.000.000	100.00 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408749	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	90.96	92.51	0.00	0.00	92.46	100.00	100.00	76.84	80%	96.06
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.10	18.50	0.00	0.00	9.25	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.48		94.99					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional) di Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 85,88, dan nilai IKPA sebesar 96,06.

Nilai penyerapan sebesar 99,5, konsistensi sebesar 99,3, CRO sebesar 18,6, efisiensi sebesar -10.44, dan Nilai efisiensi sebesar 23,91.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.6,151,171,000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp.6,120,698,738,- (99,50%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 30,472,262,-.

9. Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

Grafik 3.16. Capaian SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) Tahun 2023

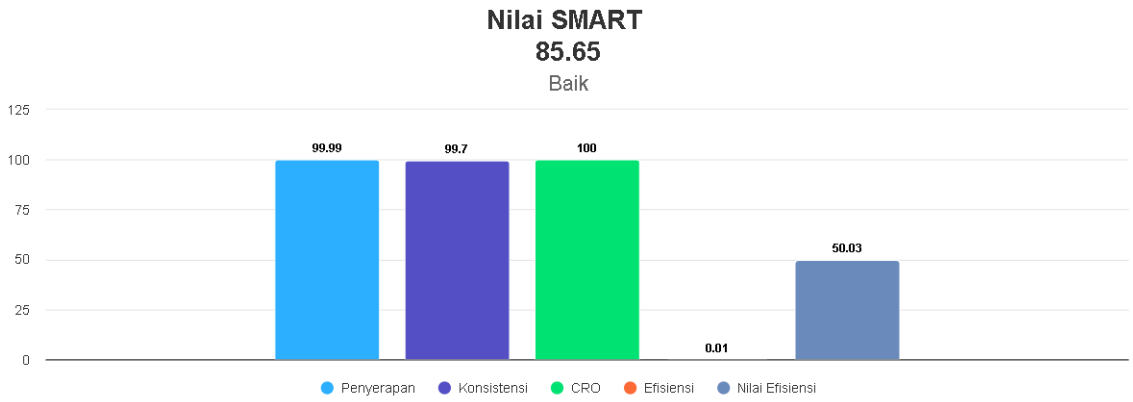

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	200.351.000	200.324.955	99.99 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	026	013	408750	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	95.69	100.00	100.00	79.57	80%	99.46
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	9.57	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		98.56					100.00			

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/

Pada Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) di Kantor Wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nilai Smart Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 85,65, dan nilai IKPA sebesar 99,46.

Nilai penyerapan sebesar 99,99, konsistensi sebesar 99.7, CRO sebesar 100, efisiensi sebesar 0,01, dan Nilai efisiensi sebesar 50,03.

Dengan jumlah alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.200,351,000,- dapat direalisasikan Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp.200,324,955,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 26,045,-.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja E-Performance

Berikut merupakan capaian kinerja kantor wilayah jawa tengah Tahun 2023 melalui laman

https://e-performance.kemenkumham.go.id/:

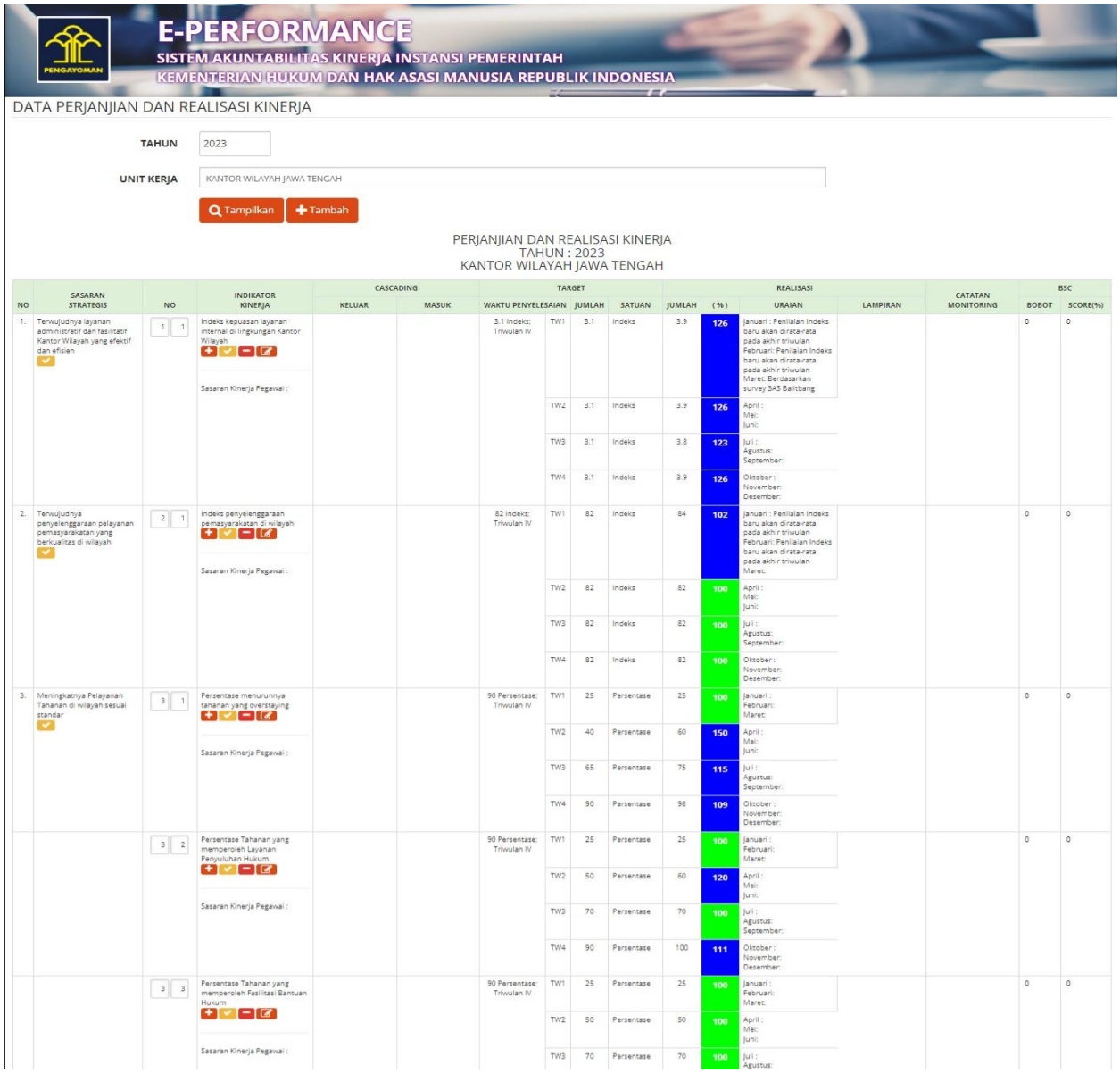

E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN 2023

UNIT KERJA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Tampilkan Tambah

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	NO		INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI				CATATAN MONITORING	BSC	
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN			BOBOT	SCORE(%)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Sasaran Kinerja Pegawai :			3.1 Indeks: Triwulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.9	126	Januari : Penilaian Indeks baru akan dirata-rata pada akhir triwulan Februari: Penilaian Indeks baru akan dirata-rata pada akhir triwulan Maret: Berdasarkan survey BAS Balitbang			0	0
								TW2	3.1	Indeks	3.9	126	April : Mei: Juni:				
								TW3	3.1	Indeks	3.8	123	Juli : Agustus: September:				
								TW4	3.1	Indeks	3.9	126	Oktober : November: Desember:				
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	2	1	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Sasaran Kinerja Pegawai :			82 Indeks: Triwulan IV	TW1	82	Indeks	84	102	Januari : Penilaian Indeks baru akan dirata-rata pada akhir triwulan Februari: Penilaian Indeks baru akan dirata-rata pada akhir triwulan Maret:			0	0
								TW2	82	Indeks	82	100	April : Mei: Juni:				
								TW3	82	Indeks	82	100	Juli : Agustus: September:				
								TW4	82	Indeks	82	100	Oktober : November: Desember:				
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	3	1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying Sasaran Kinerja Pegawai :			90 Persentase: Triwulan IV	TW1	25	Persentase	25	100	Januari : Februari: Maret:			0	0
								TW2	40	Persentase	60	150	April : Mei: Juni:				
								TW3	65	Persentase	75	115	Juli : Agustus: September:				
								TW4	90	Persentase	98	109	Oktober : November: Desember:				
		3	2	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Sasaran Kinerja Pegawai :			90 Persentase: Triwulan IV	TW1	25	Persentase	25	100	Januari : Februari: Maret:			0	0
								TW2	50	Persentase	60	120	April : Mei: Juni:				
								TW3	70	Persentase	70	100	Juli : Agustus: September:				
								TW4	90	Persentase	100	111	Oktober : November: Desember:				
		3	3	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum Sasaran Kinerja Pegawai :			90 Persentase: Triwulan IV	TW1	25	Persentase	25	100	Januari : Februari: Maret:			0	0
								TW2	50	Persentase	50	100	April : Mei: Juni:				
								TW3	70	Persentase	70	100	Juli : Agustus:				

Penginputan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam aplikasi *e-performance* dilakukan secara periodik tiap triwulan I-IV di Tahun 2023.

Capaian Kinerja E-Monev Bappenas

Capaian kinerja kantor wilayah jawa tengah Tahun 2023 melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id/:

Program Sekretariat Jenderal

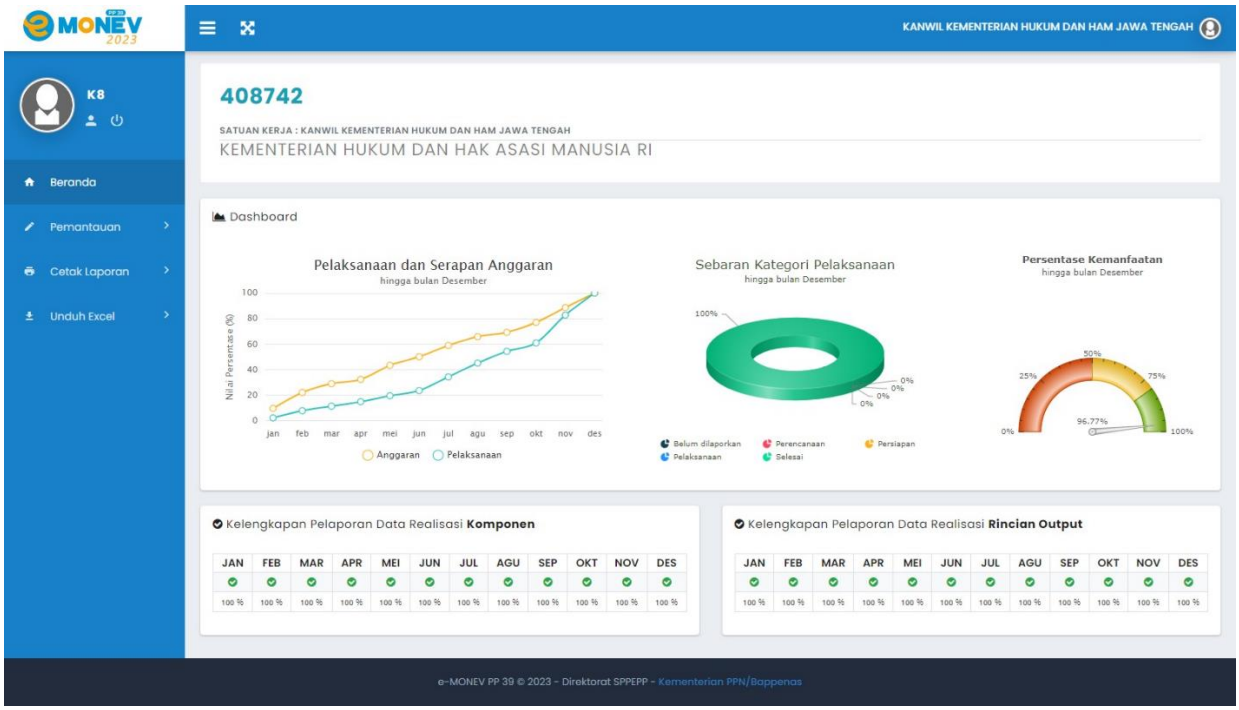

Pada Program Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Adiministrasi Hukum Umum

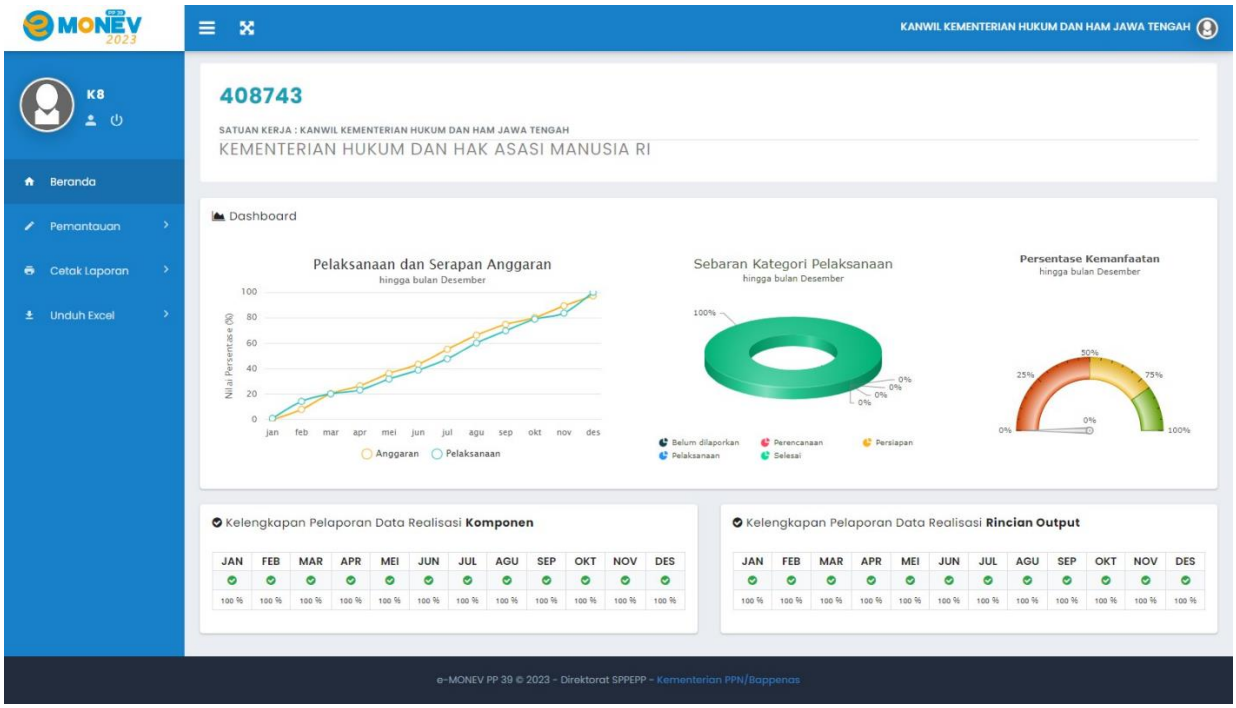

Pada Program Ditjen Adiministrasi Hukum Umum berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Pemasyarakatan

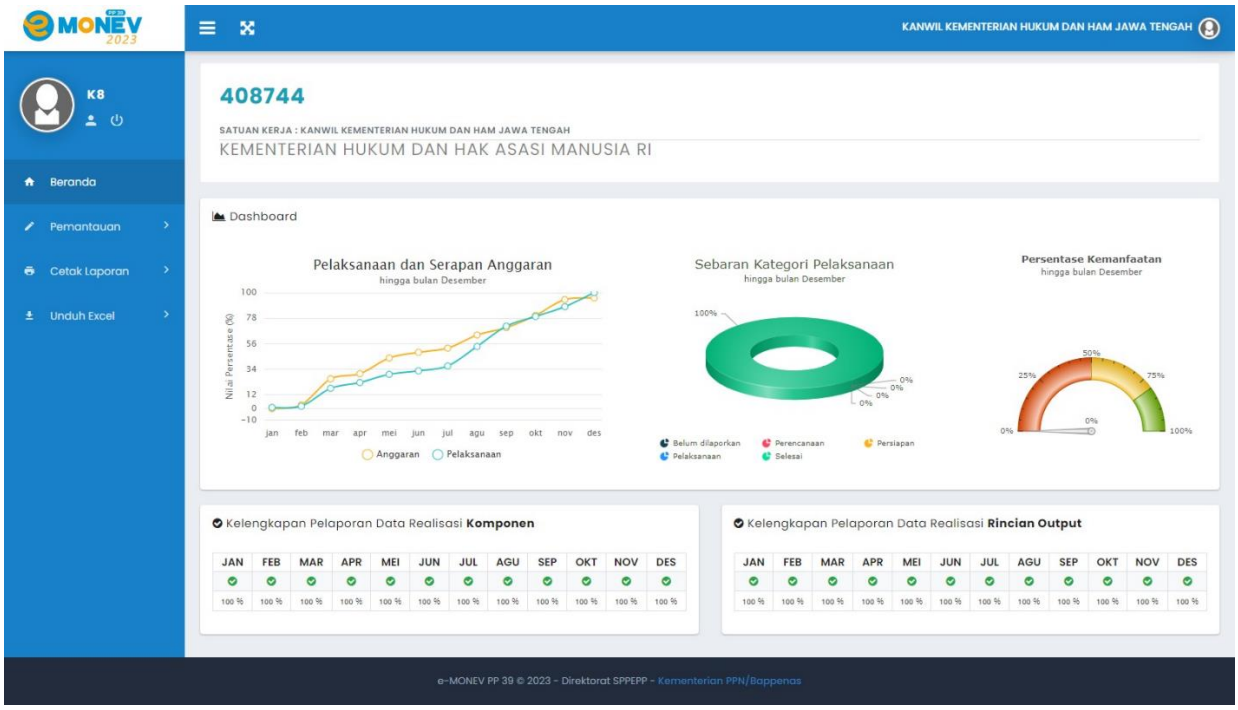

Pada Program Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Imigrasi

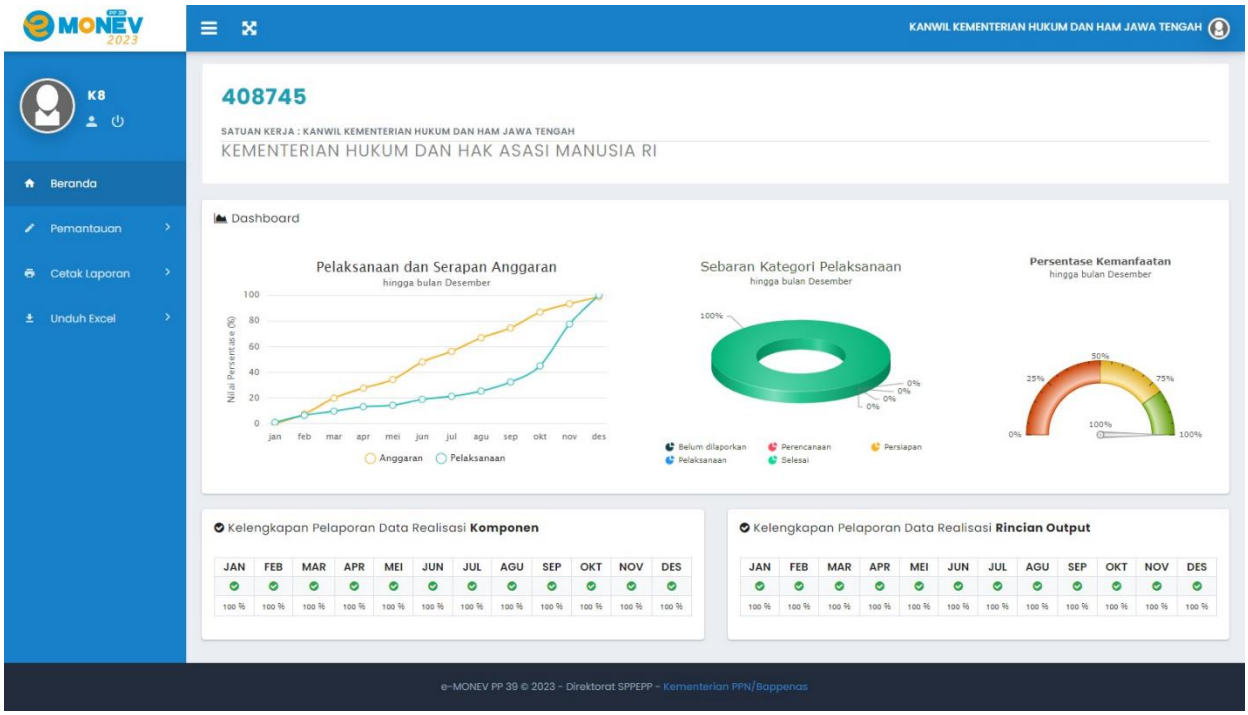

Pada Program Ditjen Imigrasi berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Kekayaan Intelektual

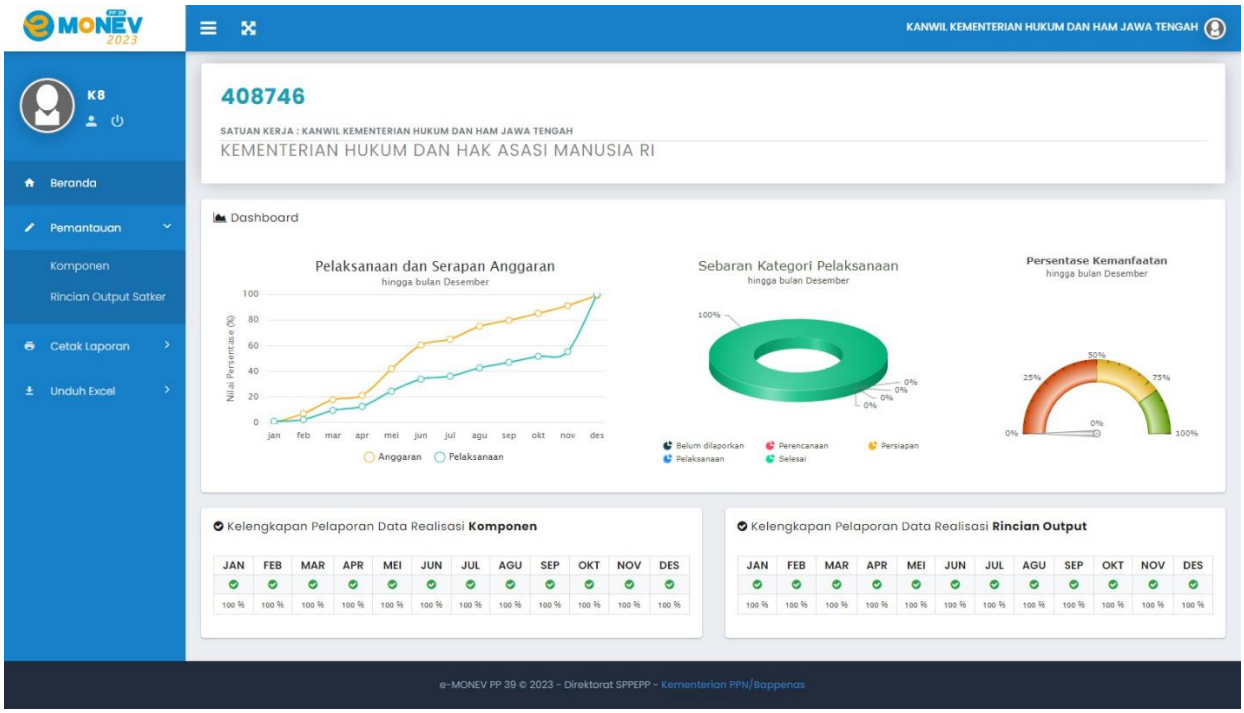

Pada Program Ditjen Kekayaan Intelektual berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Peraturan Perundang-undangan

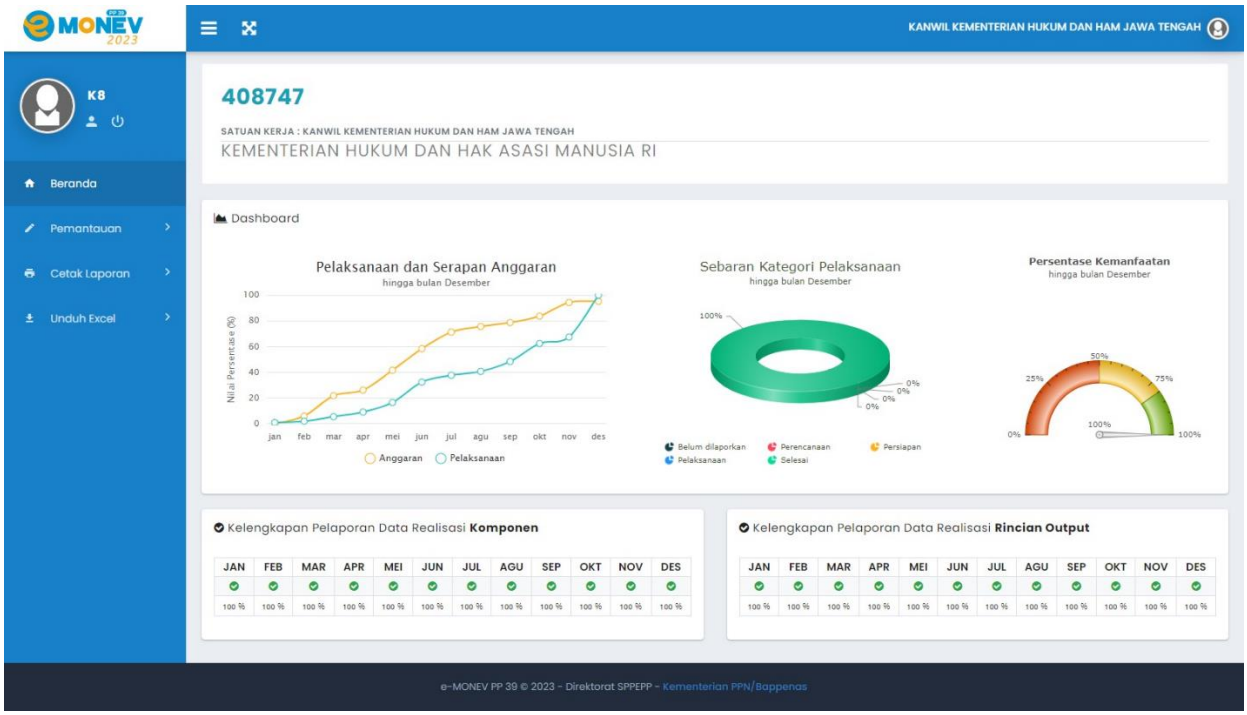

Pada Program Ditjen Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Program Ditjen Hak Asasi Manusia

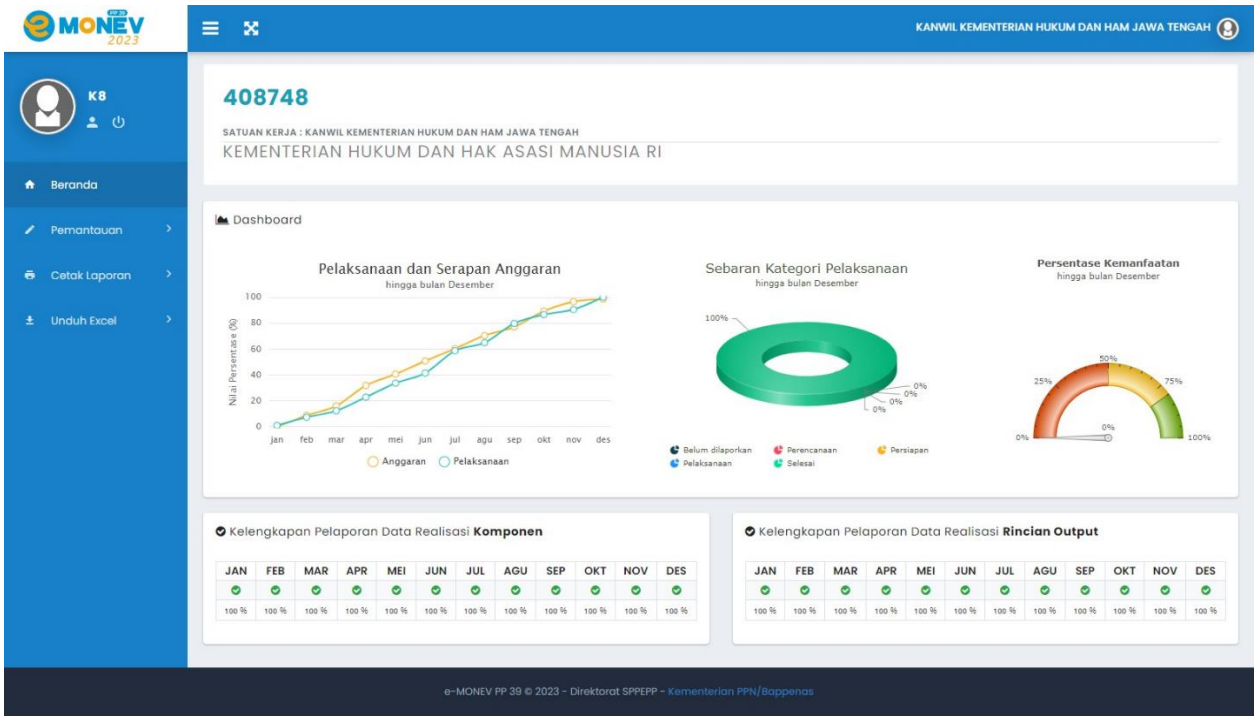

Pada Program Ditjen Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Program Badan Pembinaan Hukum Nasional

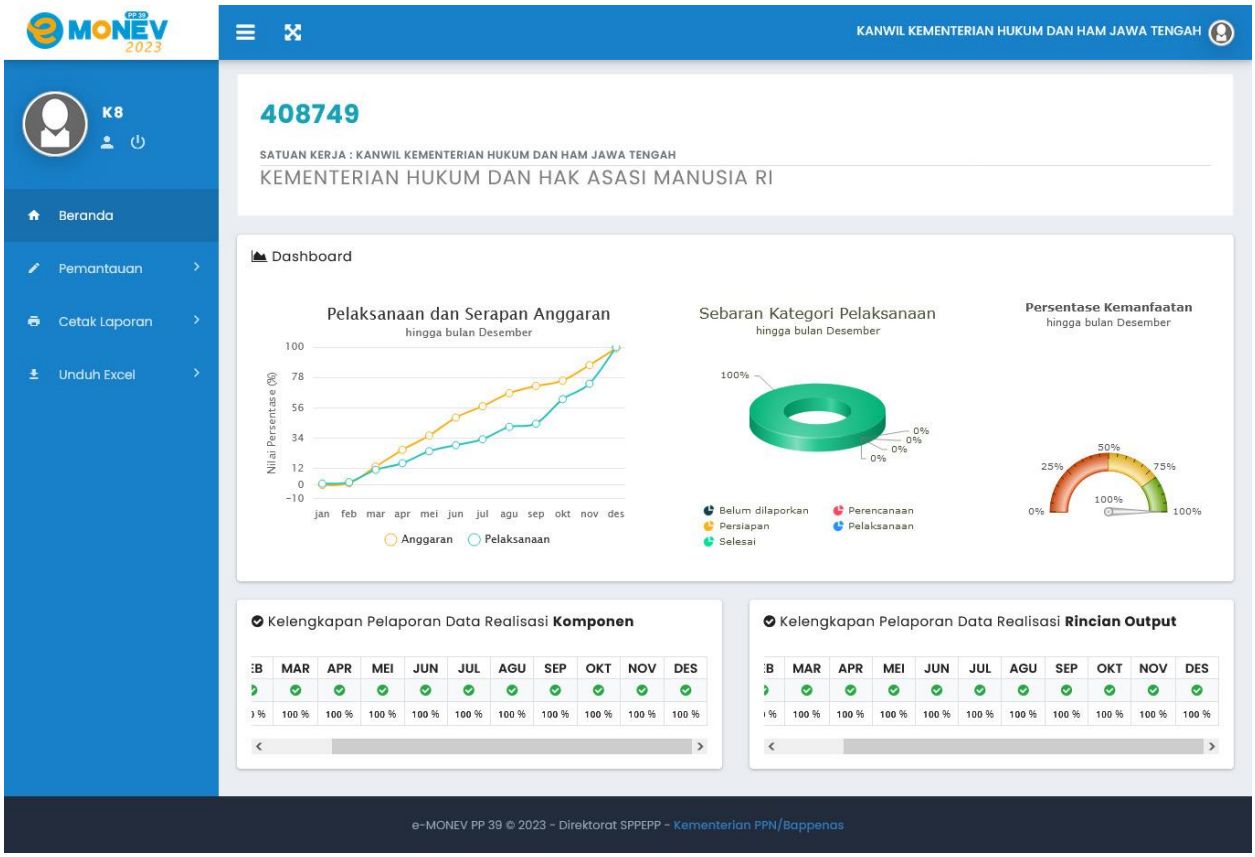

Pada Program Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

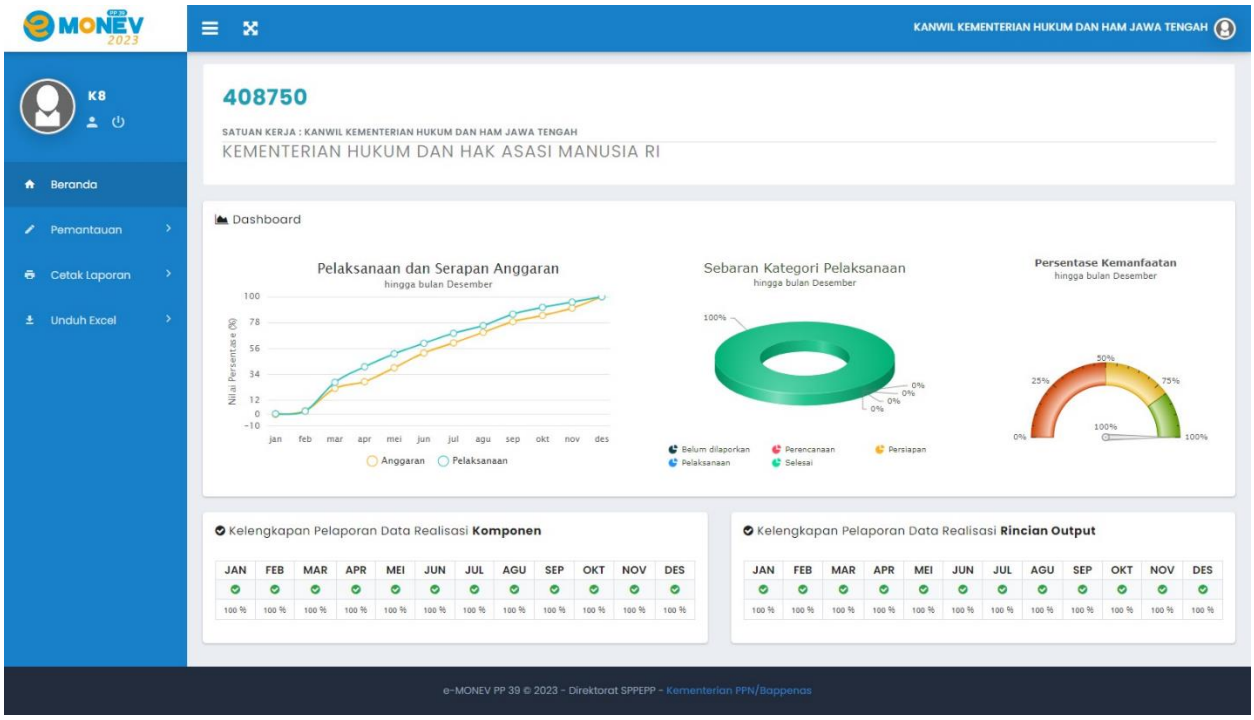

Pada Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil tangkapan layar diatas terlihat bahwa pemantauan dari segi perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan di Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HH-1.PR.01.03 Tahun 2023 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 bahwa pengunggahan data dukung target kinerja secara perodik ke halaman kinerja.kemenkumham sebelum tanggal 05 bulan berikutnya, serta tersusunnya laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Triwulan I-IV Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Target Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah sampai dengan tahap pelaporan dan pengunggahan data dukung periode bulan Desember (B12) telah tercapai 100% dan telah selesai dilaporkan pada tanggal 5 Januari 2024. Berikut merupakan hasil tangkapan layar dari capaian target kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HH-1.PR.01.03 Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam laman https://kinerja.kemenkumham.go.id/:

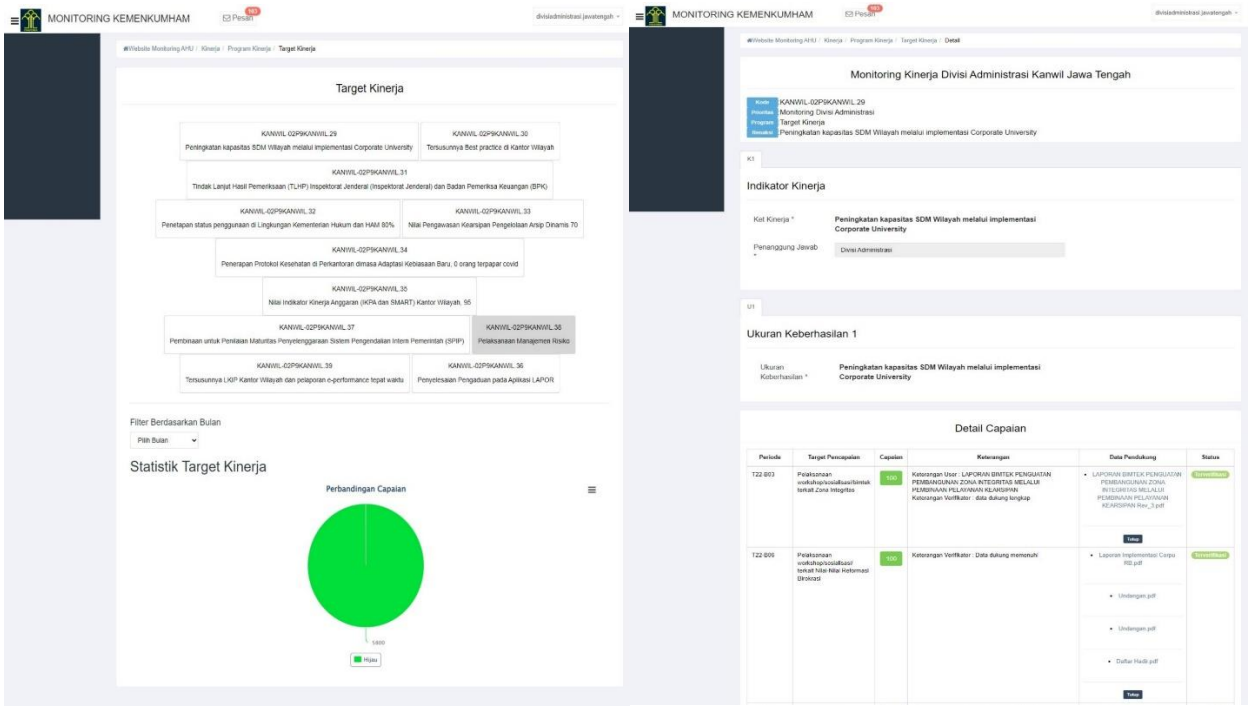

BAB IV
PENUTUP

BerAKHLAK
Berintegritas Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SEMAKIN PASTI

REFORMASI HUKUM

PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

#bangga melayani bangsa

A. Simpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah secara umum dapat merealisasikan hampir seluruh target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati pada awal Tahun 2023, meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan targetnya sampai dengan tahun 2023 ini, Kantor Wiayah Jawa Tengah tetap optimis dann berkomitmen untuk memperbaiki dan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan capaian kinerja di periode selanjutnya.

Berdasarkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pada Tahun 2023 yang tercerminkan dari capaian dalam Perjanjian Kinerja, SMART, IKPA dan kinerja anggaran maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Jawa Tengah telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan dan merealisasikan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, anggaran, dan dari segi sarana prasarananya.

Dari total jumlah seluruh alokasi pagu anggaran dari 9 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan alokasi pagu anggaran pada tahun 2022. Total realisasi anggaran di 9 Petikan DIPA dari unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 mengalami kenaikan alokasi anggaran sebesar 19.05% dibandingkan tahun 2022. Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2023 belum lebih baik dibandingkan realisasi di tahun 2022, dimana pada Tahun 2023 dapat terserap sebesar 99,12%, di tahun 2022 mampu terserap 99,38%. Jumlah anggaran yang tersisa di akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 395,224,498,-, dan pada tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 234,020,821,-.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan strategi mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya;
2. Diperlukan upaya peningkatan nilai SAKIP Kantor Wilayah melalui kegiatan pendampingan penyusunan LKjIP satuan kerja dan Kantor Wilayah oleh Unit Eselon I;
3. Dengan peningkatan volume pekerjaan dan demi tercapainya kinerja yang optimal, maka diperlukan penganggaran yang mencukupi pada tahun anggaran berikutnya;
4. Percepatan realisasi anggaran harus terus ditingkatkan sehingga target realisasi anggaran tercapai dengan maksimal pada tahun berikutnya;
5. Perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Instansi eksternal/terkait lainnya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, agar kegiatan selanjutnya dapat lebih terprogram dan berjalan sesuai yang diharapkan;
6. Demi terselenggaranya pelayanan yang lebih baik dan optimal diperlukan penambahan, pelatihan dan melakukan penguatan kompetensi pegawai melalui implementasi Corpu, mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan di Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2023 kami buat untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Semarang, 5 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWATENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Sekretaris Jenderal	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.	A. Yuspahruddin NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 25,409,166,000,-**
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 25,409,166,000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala KantorWilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWATENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Cahyo Rahadian Muzhar NIP. 19690918 199403 1 001	A. Yuspahruddin NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88%
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %
3.	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan Laporan keuangan, dan Citra Positif BHP	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp 6.138.564.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 4.811.600.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp 1.326.964.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp 8.337.992.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp 8.337.992.000,-
TOTAL	**Rp 14.476.556.000,-**

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Pemasyarakatan	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Reynhard Silitonga NRP. 67090332	A. Yuspahruddin NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 127.140.903.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 344.378.220.000

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Widodo Ekatjahjana NIP. 197 10501 199303 1 001	A. Yuspahruddin NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 17.413.584.000,-**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 17.413.584.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,02 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Razilu	A. Yuspahruddin
NIP. 19651128 199103 1 002	NIP. 19630628 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	548 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	6 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 1.863.881.000,-**
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.863.881.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Peraturan Perundang-Undangan	
Dhahana Putra	A. Yuspahruddin
NIP. 19690909 199303 1 001	NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp. 367,000,000 ,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 367,000,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWATENGAH

Dalam rangkamewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Mualimin Abdi	A. Yuspahruddin
NIP. 196211211982031 001	NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaraan HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	9 Intansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	**Rp. 315,238,000,-**
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 315,238,000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWATENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Widodo Ekatjahjana	A. Yuspahruddin
NIP. 19710501 199303 1 001	NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegaiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp. 166.601.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 166.601.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 5.696.067.000,-**
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 5.696.067.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWATENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Iwan Kurniawan	A. Yuspahruddin
NIP. 19640619 198811 1 001	NIP. 19630528198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 200.351.000,-**
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 200.351.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja : 408744 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**1,344,182,000**	**0**	**1,284,642,179**	**55,757,651**	**1,340,399,830**	**99.72 %**	**3,782,170**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,344,182,000	0	1,284,642,179	55,757,651	1,340,399,830	99.72 %	3,782,170
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,344,182,000	0	1,284,642,179	55,757,651	1,340,399,830	99.72 %	3,782,170
AEA Koordinasi	516,352,000	0	487,362,007	28,485,490	515,847,497	99.90 %	504,503
AEA.001 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan di Wilayah	516,352,000	0	487,362,007	28,485,490	515,847,497	99.90 %	504,503
051 Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI	83,120,000	0	83,115,500	0	83,115,500	99.99 %	4,500
051.0A Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI	83,120,000	0	83,115,500	0	83,115,500	99.99 %	4,500
521211 Belanja Bahan	13,383,000	0	13,378,500	0	13,378,500	99.97 %	4,500
000001. Banner, Spanduk	2,413,000	0	2,413,000	0	2,413,000	100.00	0
000002. Percetakan, Penjilidan, dan Pelaporan	470,000	0	465,500	0	465,500	99.04 %	4,500
000125. Seminar Kit	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0
000008. Transport Dalam Kota	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67,187,000	0	67,187,000	0	67,187,000	100.00	0
000131. Uang Harian Fullboard	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000	100.00	0
000132. Paket Meeting Fullboard Eselon II	2,757,000	0	2,757,000	0	2,757,000	100.00	0
000133. Paket Meeting Fullboard Eselon III ke bawah	46,230,000	0	46,230,000	0	46,230,000	100.00	0
052 Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan	87,829,000	0	87,826,505	0	87,826,505	100.00	2,495
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	87,829,000	0	87,826,505	0	87,826,505	100.00	2,495
521211 Belanja Bahan	14,486,000	0	14,485,235	0	14,485,235	99.99 %	765
000009. ATK	1,986,000	0	1,985,235	0	1,985,235	99.96 %	765
000010. Seminar Kit	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
000082. Banner, MMT, Spanduk	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000011. Narasumber Eselon II	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja : 408744 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	71,543,000	0	71,541,270	0	71,541,270	100.00	1,730
000013. Penginapan	5,025,000	0	5,025,000	0	5,025,000	100.00	0
000018. Paket Meeting Fullboard Panitia	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
000019. Transport Panitia	114,000	0	114,000	0	114,000	100.00	0
000084. Uang Harian	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	100.00	0
000085. Penginapan	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000087. Uang Harian	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000	100.00	0
000088. Uang Harian Fullboard	130,000	0	130,000	0	130,000	100.00	0
000089. Transportasi Narasumber Jakarta	2,334,000	0	2,332,270	0	2,332,270	99.93 %	1,730
000090. Uang Harian Panitia	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000091. Uang Harian Fullboard Panitia	520,000	0	520,000	0	520,000	100.00	0
000092. Uang Harian Fullboard Peserta	8,320,000	0	8,320,000	0	8,320,000	100.00	0
000093. Paket Meeting Fullboard Peserta	43,200,000	0	43,200,000	0	43,200,000	100.00	0
053 Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	69,190,000	0	61,091,034	7,997,284	69,088,318	99.85 %	101,682
053.0A Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	69,190,000	0	61,091,034	7,997,284	69,088,318	99.85 %	101,682
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69,190,000	0	61,091,034	7,997,284	69,088,318	99.85 %	101,682
000021. Uang Harian	26,500,000	0	26,220,000	250,000	26,470,000	99.89 %	30,000
000022. Biaya Penginapan Eselon II	26,300,000	0	21,012,463	5,269,000	26,281,463	99.93 %	18,537
000023. Tiket	3,850,000	0	3,848,966	0	3,848,966	99.97 %	1,034
000024. Transport	12,540,000	0	10,009,605	2,478,284	12,487,889	99.58 %	52,111
054 Pameran Hasil Karya Narapidana	19,089,000	0	19,086,835	0	19,086,835	99.99 %	2,165
054.0A Pameran Hasil Karya Narapidana	19,089,000	0	19,086,835	0	19,086,835	99.99 %	2,165
521211 Belanja Bahan	389,000	0	386,835	0	386,835	99.44 %	2,165
000025. ATK	389,000	0	386,835	0	386,835	99.44 %	2,165
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000	100.00	0
000026. Pengiriman Barang Pameran	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja : 408744 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141 Belanja Sewa	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	100.00	0
000027. Biaya Sewa Stand, Dekorasi, Alat Display	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	100.00	0
055 Monitoring dan Evaluasi	257,124,000	0	236,242,133	20,488,206	256,730,339	99.85 %	393,661
055.0A Monitoring dan Evaluasi	257,124,000	0	236,242,133	20,488,206	256,730,339	99.85 %	393,661
521211 Belanja Bahan	5,510,000	0	5,295,810	0	5,295,810	96.11 %	214,190
000032. ATK	5,510,000	0	5,295,810	0	5,295,810	96.11 %	214,190
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	249,964,000	0	229,446,323	20,338,206	249,784,529	99.93 %	179,471
000033. Uang Harian	123,324,000	0	118,666,333	4,655,000	123,321,333	100.00	2,667
000034. Biaya Penginapan Eselon IV	65,200,000	0	61,681,528	3,500,000	65,181,528	99.97 %	18,472
000035. Transport Darat Antar Kabupaten	57,000,000	0	49,098,462	7,743,206	56,841,668	99.72 %	158,332
000140. Uang Harian	4,440,000	0	0	4,440,000	4,440,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0	1,500,000	150,000	1,650,000	100.00	0
000036. Transport Dalam Kota	1,650,000	0	1,500,000	150,000	1,650,000	100.00	0
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	527,980,000	0	514,800,960	11,161,600	525,962,560	99.62 %	2,017,440
AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	527,980,000	0	514,800,960	11,161,600	525,962,560	99.62 %	2,017,440
051 Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	362,489,000	0	362,388,950	0	362,388,950	99.97 %	100,050
051.0A Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan	254,589,000	0	254,511,450	0	254,511,450	99.97 %	77,550
521211 Belanja Bahan	48,821,000	0	48,743,450	0	48,743,450	99.84 %	77,550
000039. ATK	3,769,000	0	3,768,450	0	3,768,450	99.99 %	550
000040. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	3,872,000	0	3,795,000	0	3,795,000	98.01 %	77,000
000041. Banner, Spanduk	6,380,000	0	6,380,000	0	6,380,000	100.00	0
000042. Seminar Kit	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	100.00	0
000136. Seminar Kit	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000094. Narasumber Eselon II	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,180,000	0	59,180,000	0	59,180,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja : 408744 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000137. Uang Harian Peserta	37,620,000	0	37,620,000	0	37,620,000	100.00	0
	000138. Biaya Penginapan Peserta	21,560,000	0	21,560,000	0	21,560,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000139. Transportasi Perserta Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141,788,000	0	141,788,000	0	141,788,000	100.00	0
	000096. Uang Harian	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
	000106. Uang Harian	10,360,000	0	10,360,000	0	10,360,000	100.00	0
	000107. Uang Harian Fullboard Panitia	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000	100.00	0
	000108. Penginapan Panitia	10,700,000	0	10,700,000	0	10,700,000	100.00	0
	000109. Paket Meeting Fullboard Panitia	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
	000110. Transport Panitia	478,000	0	478,000	0	478,000	100.00	0
	000111. Uang Harian Fullboard Peserta	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000	100.00	0
	000112. Paket Meeting Fullboard Peserta	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000	100.00	0
051.0B	Kegiatan Peningkatan Fisik, Mental, Disiplin Petugas Pemasyarakatan	107,900,000	0	107,877,500	0	107,877,500	99.98 %	22,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39,410,000	0	39,403,000	0	39,403,000	99.98 %	7,000
	000052. Biaya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan	39,410,000	0	39,403,000	0	39,403,000	99.98 %	7,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,490,000	0	68,474,500	0	68,474,500	99.98 %	15,500
	000054. Biaya Penginapan Eselon IV	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000	100.00	0
	000055. Uang Harian	29,600,000	0	29,600,000	0	29,600,000	100.00	0
	000056. Biaya Penginapan Eselon II	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00	0
	000057. Transport PP	12,250,000	0	12,234,500	0	12,234,500	99.87 %	15,500
052	Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi	165,491,000	0	152,412,010	11,161,600	163,573,610	98.84 %	1,917,390
052.0A	Unit Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	146,996,000	0	133,917,010	11,161,600	145,078,610	98.70 %	1,917,390
521211	Belanja Bahan	8,496,000	0	8,214,000	197,100	8,411,100	99.00 %	84,900
	000113. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan	3,560,000	0	3,560,000	0	3,560,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja : 408744 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000114. Banner, Spanduk dan Sticker	4,654,000	0	4,654,000	0	4,654,000	100.00	0
000123. ATK	282,000	0	0	197,100	197,100	69.89 %	84,900
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129,500,000	0	117,153,010	10,964,500	128,117,510	98.93 %	1,382,490
000061. Uang Harian Petugas	71,500,000	0	65,380,000	6,120,000	71,500,000	100.00	0
000062. Biaya Penginapan	32,000,000	0	28,916,150	2,819,000	31,735,150	99.17 %	264,850
000063. Transport Petugas	26,000,000	0	22,856,860	2,025,500	24,882,360	95.70 %	1,117,640
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0	8,550,000	0	8,550,000	95.00 %	450,000
000064. Transportasi Petugas Dalam Kota	9,000,000	0	8,550,000	0	8,550,000	95.00 %	450,000
052.0B Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi	18,495,000	0	18,495,000	0	18,495,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	16,695,000	0	16,695,000	0	16,695,000	100.00	0
000067. Seminar Kit	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
000068. Banner, Spanduk	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000070. ATK	495,000	0	495,000	0	495,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000115. Narasumber Eselon II	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
BHB Operasi Bidang Keamanan	299,850,000	0	282,479,212	16,110,561	298,589,773	99.58 %	1,260,227
BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	299,850,000	0	282,479,212	16,110,561	298,589,773	99.58 %	1,260,227
051 Pengendalian UPT Pemasyarakatan	264,449,000	0	247,339,311	16,110,561	263,449,872	99.62 %	999,128
051.0A PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KAMTIB	264,449,000	0	247,339,311	16,110,561	263,449,872	99.62 %	999,128
521211 Belanja Bahan	13,459,000	0	13,274,000	93,000	13,367,000	99.32 %	92,000
000071. ATK	5,994,000	0	5,994,000	0	5,994,000	100.00	0
000072. Bahan Pelaksana Kegiatan (Senter, Batu Baterai, Sarung Tangan, Masker, Hands Sanitizer)	2,215,000	0	2,030,000	93,000	2,123,000	95.85 %	92,000
000130. Baju Lapangan	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240,640,000	0	226,415,311	13,617,561	240,032,872	99.75 %	607,128
000073. Uang Harian	144,300,000	0	138,010,000	5,920,000	143,930,000	99.74 %	370,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja : 408744 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000074. Biaya Penginapan Eselon IV	51,390,000	0	49,482,592	1,865,000	51,347,592	99.92 %	42,408
000075. Transport	41,250,000	0	38,922,719	2,132,561	41,055,280	99.53 %	194,720
000141. Uang Harian	3,700,000	0	0	3,700,000	3,700,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,350,000	0	7,650,000	2,400,000	10,050,000	97.10 %	300,000
000076. Transport Lokal	10,350,000	0	7,650,000	2,400,000	10,050,000	97.10 %	300,000
052 Pemindahan WBP	6,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000
052.0A Pemindahan WBP	6,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000
000077. Operasional Pemindahan Narapidana	6,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000
053 Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	35,395,000	0	35,139,901	0	35,139,901	99.28 %	255,099
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	35,395,000	0	35,139,901	0	35,139,901	99.28 %	255,099
521211 Belanja Bahan	4,965,000	0	4,870,000	0	4,870,000	98.09 %	95,000
000134. Kudapan	3,465,000	0	3,370,000	0	3,370,000	97.26 %	95,000
000135. Banner, spanduk, MMT	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,430,000	0	30,269,901	0	30,269,901	99.47 %	160,099
000116. Uang Harian	14,430,000	0	14,430,000	0	14,430,000	100.00	0
000117. Penginapan	9,000,000	0	8,880,836	0	8,880,836	98.68 %	119,164
000118. Transport	7,000,000	0	6,959,065	0	6,959,065	99.42 %	40,935

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Satuan Kerja : 408747 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**367,000,000**	**0**	**346,157,762**	**17,866,916**	**364,024,678**	**99.19 %**	**2,975,322**
BB Program Pembentukan Regulasi	367,000,000	0	346,157,762	17,866,916	364,024,678	99.19 %	2,975,322
BB.5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	367,000,000	0	346,157,762	17,866,916	364,024,678	99.19 %	2,975,322
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	351,385,000	0	331,770,187	16,711,916	348,482,103	99.17 %	2,902,897
ABD.001 Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	351,385,000	0	331,770,187	16,711,916	348,482,103	99.17 %	2,902,897
051 Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah	14,425,000	0	14,424,450	0	14,424,450	100.00	550
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	14,425,000	0	14,424,450	0	14,424,450	100.00	550
521211 Belanja Bahan	14,425,000	0	14,424,450	0	14,424,450	100.00	550
000002. ATK	7,848,000	0	7,847,700	0	7,847,700	100.00	300
000003. Komputer Supplies	6,577,000	0	6,576,750	0	6,576,750	100.00	250
052 Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	278,067,000	0	259,898,975	16,711,916	276,610,891	99.48 %	1,456,109
052.0A Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah	11,140,000	0	11,140,000	0	11,140,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000004. Honor Narasumber dari Luar Kementerian / setara Eselon III	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,340,000	0	9,340,000	0	9,340,000	100.00	0
000005. Transport Lokal Panitia Kantor Wilayah	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000006. Paket Halfday Meeting Peserta Eselon III	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	100.00	0
000007. Paket Halfday Meeting Panitia Eselon III	760,000	0	760,000	0	760,000	100.00	0
000008. Uang Harian Halfday Meeting Panitia	380,000	0	380,000	0	380,000	100.00	0
052.0B Pelaksanaan Harmonisasi	266,927,000	0	248,758,975	16,711,916	265,470,891	99.45 %	1,456,109
521211 Belanja Bahan	8,542,000	0	8,511,200	0	8,511,200	99.64 %	30,800
000009. Kudapan Rapat Harmonisasi Raperda	7,742,000	0	7,711,200	0	7,711,200	99.60 %	30,800
000182. Makan Rapat Harmonisasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	258,385,000	0	240,247,775	16,711,916	256,959,691	99.45 %	1,425,309
000012. Uang Penginapan Eselon IV	390,000	0	380,099	0	380,099	97.46 %	9,901

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Satuan Kerja : 408747 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000013. Biaya Transportasi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000015. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000016. Uang Penginapan Eselon IV	810,000	0	801,182	0	801,182	98.91 %	8,818
000017. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000019. Uang Harian	5,920,000	0	5,920,000	0	5,920,000	100.00	0
000020. Uang Penginapan Eselon IV	1,076,000	0	1,069,883	0	1,069,883	99.43 %	6,117
000021. Biaya Transportasi	1,872,000	0	1,860,000	0	1,860,000	99.36 %	12,000
000022. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000025. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000026. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000031. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000032. Biaya Transportasi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000033. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000035. Uang Harian	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
000036. Biaya Transportasi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000038. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000039. Biaya Transportasi	609,000	0	600,000	0	600,000	98.52 %	9,000
000041. Uang Harian	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
000042. Biaya Transportasi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000044. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000045. Uang Harian	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
000046. Biaya Transportasi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000048. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000049. Uang Penginapan Eselon IV	332,000	0	330,367	0	330,367	99.51 %	1,633
000050. Biaya Transportasi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000052. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Satuan Kerja : 408747 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000057. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000058. Uang Penginapan Eselon IV	824,000	0	811,173	0	811,173	98.44 %	12,827
000059. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000061. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000062. Uang Penginapan Eselon IV	260,000	0	260,000	0	260,000	100.00	0
000063. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000064. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000066. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000067. Uang Penginapan Eselon IV	440,000	0	440,000	0	440,000	100.00	0
000068. Biaya Transportasi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000074. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000075. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000076. Uang Penginapan Eselon IV	1,281,000	0	1,280,000	0	1,280,000	99.92 %	1,000
000077. Biaya Transportasi	480,000	0	477,430	0	477,430	99.46 %	2,570
000079. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000080. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000081. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000083. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000084. Uang Penginapan Eselon IV	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000085. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000086. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000088. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000089. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000090. Biaya Transportasi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000092. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000093. Uang Penginapan Eselon IV	700,000	0	680,288	0	680,288	97.18 %	19,712

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Satuan Kerja : 408747 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000094. Biaya Transportasi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000096. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000098. Uang Penginapan Eselon IV	500,000	0	462,000	0	462,000	92.40 %	38,000
000099. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000101. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000102. Uang Penginapan Eselon IV	800,000	0	787,622	0	787,622	98.45 %	12,378
000103. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000105. Uang Harian	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
000107. Biaya Transportasi	720,000	0	720,000	0	720,000	100.00	0
000108. Uang Harian	5,920,000	0	5,920,000	0	5,920,000	100.00	0
000114. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000115. Uang Penginapan Eselon IV	528,000	0	528,000	0	528,000	100.00	0
000116. Biaya Transportasi	960,000	0	934,500	0	934,500	97.34 %	25,500
000118. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000119. Uang Penginapan Eselon IV	1,200,000	0	1,177,715	0	1,177,715	98.14 %	22,285
000120. Uang Penginapan Eselon IV	13,000	0	0	0	0	0.00 %	13,000
000121. Biaya Transportasi	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000123. Uang Harian	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000	100.00	0
000124. Uang Penginapan Eselon IV	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000125. Biaya Transportasi	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000	100.00	0
000127. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000128. Uang Penginapan Eselon IV	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000129. Biaya Transportasi	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000130. Biaya Transportasi	1,696,000	0	1,695,000	0	1,695,000	99.94 %	1,000
000132. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000136. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Satuan Kerja : 408747 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000137. Uang Penginapan Eselon IV	1,120,000	0	1,115,757	0	1,115,757	99.62 %	4,243
000138. Biaya Transportasi	764,000	0	763,250	0	763,250	99.90 %	750
000140. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000166. Uang Harian	71,040,000	0	61,970,000	8,880,000	70,850,000	99.73 %	190,000
000167. Uang Pernginapan eselon IV	19,680,000	0	17,115,909	2,417,916	19,533,825	99.26 %	146,175
000168. Biaya Transportasi	31,200,000	0	26,387,600	3,934,000	30,321,600	97.18 %	878,400
000184. Uang Harian	1,480,000	0	0	1,480,000	1,480,000	100.00	0
053 Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	58,892,000	0	57,446,762	0	57,446,762	97.55 %	1,445,238
053.0C Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000142. Kudapan Rapat Harmonisasi Raperda	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
053.0D Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah	57,692,000	0	56,246,762	0	56,246,762	97.49 %	1,445,238
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57,692,000	0	56,246,762	0	56,246,762	97.49 %	1,445,238
000143. Uang representasi Eselon II	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000144. Uang Harian	21,200,000	0	19,870,000	0	19,870,000	93.73 %	1,330,000
000145. Uang Penginapan Eselon II	4,725,000	0	4,724,046	0	4,724,046	99.98 %	954
000146. Uang Penginapan Eselon IV/Gol III	14,030,000	0	14,025,716	0	14,025,716	99.97 %	4,284
000147. Biaya Tiket Kereta Api Jakarta - Semarang (PP)	13,704,000	0	13,695,000	0	13,695,000	99.93 %	9,000
000148. Uang Taksi Jakarta (PP)	250,000	0	149,500	0	149,500	59.80 %	100,500
000169. Uang Harian	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000170. Biaya Transport Darat Semarang-Jakarta PP	2,883,000	0	2,882,500	0	2,882,500	99.98 %	500
054 Pelaporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000149. Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Satuan Kerja : 408747 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
ADG Standarisasi Profesi dan SDM	15,615,000	0	14,387,575	1,155,000	15,542,575	99.54 %	72,425
ADG.001 Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	15,615,000	0	14,387,575	1,155,000	15,542,575	99.54 %	72,425
051 Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	9,100,000	0	8,527,575	500,000	9,027,575	99.20 %	72,425
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	9,100,000	0	8,527,575	500,000	9,027,575	99.20 %	72,425
521211 Belanja Bahan	9,100,000	0	8,527,575	500,000	9,027,575	99.20 %	72,425
000160. ATK	4,300,000	0	4,292,925	0	4,292,925	99.84 %	7,075
000161. Komputer Supplies	4,300,000	0	4,234,650	0	4,234,650	98.48 %	65,350
000176. Penggandaan dan Penjilidan	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	5,860,000	0	5,860,000	0	5,860,000	100.00	0
052.0A Penliaian Angka Kredit/Penilaian Angka Kredit Perancang PUU di Daerah	560,000	0	560,000	0	560,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	560,000	0	560,000	0	560,000	100.00	0
000153. Kudapan Rapat Pemeriksaan Berkas	160,000	0	160,000	0	160,000	100.00	0
000154. Makan Rapat Pemeriksaan Berkas	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
052.0B Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
000155. Kudapan Rapat Pendalaman Materi	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000156. Makan Rapat Pendalaman Materi	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000180. Honor Narasumber dari Luar Kementerian/setara Eselon III	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000181. Biaya Transport Narasumber	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
053 Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	655,000	0	0	655,000	655,000	100.00	0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	655,000	0	0	655,000	655,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	655,000	0	0	655,000	655,000	100.00	0
000159. Penggandaan dan Penjilidan Laporan	655,000	0	0	655,000	655,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**28,324,432,000**	**0**	**23,935,292,715**	**4,060,373,729**	**27,995,666,444**	**98.84 %**	**328,765,556**
WA Program Dukungan Manajemen	28,324,432,000	0	23,935,292,715	4,060,373,729	27,995,666,444	98.84 %	328,765,556
WA.1558 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	28,324,432,000	0	23,935,292,715	4,060,373,729	27,995,666,444	98.84 %	328,765,556
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	21,751,720,000	0	18,790,256,769	2,685,024,458	21,475,281,227	98.73 %	276,438,773
EBA.956 Layanan BMN	511,890,000	0	287,306,539	222,963,347	510,269,886	99.68 %	1,620,114
051 Pembinaan dan Pengelolaan BMN	495,610,000	0	271,028,519	222,963,347	493,991,866	99.67 %	1,618,134
051.0A Penatausahaan BMN	242,600,000	0	128,949,913	112,413,890	241,363,803	99.49 %	1,236,197
521211 Belanja Bahan	16,869,000	0	10,991,000	5,676,390	16,667,390	98.80 %	201,610
000002. Konsumsi Kudapan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000003. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	5,164,000	0	250,000	4,716,390	4,966,390	96.17 %	197,610
000005. Konsumsi Makan	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	100.00	0
000006. Konsumsi Kudapan	1,280,000	0	316,000	960,000	1,276,000	99.69 %	4,000
000010. Konsumsi Makan	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,955,000	0	3,065,600	49,780,000	52,845,600	99.79 %	109,400
000011. Kelengkapan Pengamanan BMN (Sertifikat Tanah, Pembuatan dan Pemasangan Tanda Kepemilikan BMN)	52,955,000	0	3,065,600	49,780,000	52,845,600	99.79 %	109,400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	169,206,000	0	111,773,313	56,507,500	168,280,813	99.45 %	925,187
000014. Tiket Pesawat	4,000,000	0	3,999,992	0	3,999,992	100.00	8
000018. Uang Harian	51,060,000	0	21,960,000	29,100,000	51,060,000	100.00	0
000019. Uang Penginapan Gol III	18,000,000	0	11,410,000	6,360,000	17,770,000	98.72 %	230,000
000020. Transport Darat	16,400,000	0	8,333,850	8,066,000	16,399,850	100.00	150
000022. Uang Harian	9,990,000	0	9,990,000	0	9,990,000	100.00	0
000023. Uang Penginapan Gol III	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	100.00	0
000024. Uang Harian	4,060,000	0	4,060,000	0	4,060,000	100.00	0
000025. Transport Darat	2,100,000	0	2,072,976	24,000	2,096,976	99.86 %	3,024
000030. Uang Penginapan Gol III	2,000,000	0	1,831,280	0	1,831,280	91.56 %	168,720

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000031. Tiket Pesawat	7,195,000	0	7,193,048	0	7,193,048	99.97 %	1,952
	000032. Taksi Jakarta	350,000	0	349,420	0	349,420	99.83 %	580
	000033. Taksi Semarang	240,000	0	238,500	0	238,500	99.38 %	1,500
	000036. Uang Penginapan Gol III	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000789. Uang Harian	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
	000790. Tiket Pesawat	7,864,000	0	7,863,747	0	7,863,747	100.00	253
	000791. Taksi Jakarta	311,000	0	310,500	0	310,500	99.84 %	500
	001078. Transport Darat	840,000	0	840,000	0	840,000	100.00	0
	001079. Uang Harian	9,990,000	0	9,990,000	0	9,990,000	100.00	0
	001080. Uang Penginapan Gol III	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	100.00	0
	001384. Uang Harian	7,770,000	0	0	7,770,000	7,770,000	100.00	0
	001385. Uang Penginapan	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00	0
	001386. Transport Darat	2,106,000	0	0	1,587,500	1,587,500	75.38 %	518,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0	1,200,000	450,000	1,650,000	100.00	0
	000037. Transport Dalam Kota untuk Koordinasi	1,650,000	0	1,200,000	450,000	1,650,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	100.00	0
	000794. Uang Harian Fullboard	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	100.00	0
051.0B	Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ	253,010,000	0	142,078,606	110,549,457	252,628,063	99.85 %	381,937
521211	Belanja Bahan	35,629,000	0	9,223,200	26,377,900	35,601,100	99.92 %	27,900
	000041. Konsumsi Kudapan	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	100.00	0
	000042. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,994,000	0	0	4,993,890	4,993,890	100.00	110
	000045. Konsumsi Kudapan	4,528,000	0	2,173,200	2,340,600	4,513,800	99.69 %	14,200
	000047. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	12,094,000	0	0	12,089,010	12,089,010	99.96 %	4,990
	000049. Konsumsi Makan	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	100.00	0
	001297. Konsumsi Kudapan Acara VVIP	3,300,000	0	0	3,291,400	3,291,400	99.74 %	8,600
	001382. Umbul-umbul pengayoman	3,663,000	0	0	3,663,000	3,663,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	76,184,000	0	47,700,000	28,484,000	76,184,000	100.00	0
	000051. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	19,584,000	0	0	19,584,000	19,584,000	100.00	0
	000052. Panitia Pengadaan Barang Jasa/Pokja ULP (UKPBJ)	8,000,000	0	7,200,000	800,000	8,000,000	100.00	0
	000053. Sekretaris/Staf Pendukung	36,000,000	0	30,000,000	6,000,000	36,000,000	100.00	0
	000055. Penanggung Jawab	3,000,000	0	2,500,000	500,000	3,000,000	100.00	0
	000056. Ketua	2,400,000	0	2,000,000	400,000	2,400,000	100.00	0
	000057. Sekretaris	1,800,000	0	1,500,000	300,000	1,800,000	100.00	0
	000058. Anggota	5,400,000	0	4,500,000	900,000	5,400,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	59,025,000	0	38,700,000	20,325,000	59,025,000	100.00	0
	001282. Kursi Susun Ruang CAT	38,700,000	0	38,700,000	0	38,700,000	100.00	0
	001299. Televis stand	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00	0
	001300. Genset	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	100.00	0
	001301. AC Standing	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	100.00	0
	001302. Meja Rapat cover	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	100.00	0
	001303. Kursi Cover	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000	100.00	0
	001304. Dekorasi Bunga dan Taman	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	100.00	0
	001306. Sewa dekorasi panggung	750,000	0	0	750,000	750,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	000903. Honor Penguji Ujian Kompetensi JF PPBJ	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,310,000	0	28,204,100	34,762,557	62,966,657	99.46 %	343,343
	000061. Transport Darat	7,000,000	0	2,556,900	4,102,817	6,659,717	95.14 %	340,283
	000062. Uang Harian	7,680,000	0	7,680,000	0	7,680,000	100.00	0
	000064. Tiket Pesawat	1,430,000	0	1,430,000	0	1,430,000	100.00	0
	000065. Taksi Jakarta	668,000	0	667,500	0	667,500	99.93 %	500
	000066. Taksi Semarang	175,000	0	174,900	0	174,900	99.94 %	100
	000068. Uang Harian	18,870,000	0	11,100,000	7,770,000	18,870,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000069. Uang Penginapan Gol III	6,000,000	0	3,380,000	2,620,000	6,000,000	100.00	0
001241. Uang Harian	4,440,000	0	0	4,440,000	4,440,000	100.00	0
001242. Uang Penginapan Gol III	550,000	0	0	550,000	550,000	100.00	0
001243. Transport Darat	2,240,000	0	1,214,800	1,023,500	2,238,300	99.92 %	1,700
001308. Tiket Kereta	1,074,000	0	0	1,074,000	1,074,000	100.00	0
001309. Tiket Pesawat	981,000	0	0	981,000	981,000	100.00	0
001310. Taksi Bandung	90,000	0	0	89,500	89,500	99.44 %	500
001311. Taksi Semarang	222,000	0	0	221,740	221,740	99.88 %	260
001312. Uang Penginapan	5,440,000	0	0	5,440,000	5,440,000	100.00	0
001313. Uang Harian	6,450,000	0	0	6,450,000	6,450,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
001365. Transport Dalam Kota Peserta Kegiatan Penyusunan RUP	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14,662,000	0	14,651,306	0	14,651,306	99.93 %	10,694
000867. Uang Harian	2,580,000	0	2,580,000	0	2,580,000	100.00	0
000868. Uang Harian Fullboard	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000869. Tiket Pesawat	1,654,000	0	1,653,200	0	1,653,200	99.95 %	800
000870. Tiket Kereta Api	5,310,000	0	5,310,000	0	5,310,000	100.00	0
000871. Taksi Bogor	1,248,000	0	1,246,606	0	1,246,606	99.89 %	1,394
000872. Taksi Semarang	270,000	0	261,500	0	261,500	96.85 %	8,500
052 Monitoring dan Pelaporan BMN	16,280,000	0	16,278,020	0	16,278,020	99.99 %	1,980
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	16,280,000	0	16,278,020	0	16,278,020	99.99 %	1,980
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,530,000	0	15,528,020	0	15,528,020	99.99 %	1,980
000075. Uang Harian	10,360,000	0	10,360,000	0	10,360,000	100.00	0
000076. Uang Penginapan Gol III	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0
000077. Transport Darat	2,620,000	0	2,618,020	0	2,618,020	99.92 %	1,980
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000078. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	622,420,000	0	513,269,777	100,320,452	613,590,229	98.58 %	8,829,771
051 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik	379,379,000	0	309,296,378	66,646,552	375,942,930	99.09 %	3,436,070
051.0A Penyediaan Informasi Publik	379,379,000	0	309,296,378	66,646,552	375,942,930	99.09 %	3,436,070
521211 Belanja Bahan	141,401,000	0	133,370,458	7,800,000	141,170,458	99.84 %	230,542
000081. Dokumentasi	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000082. Backdrop, Banner, Leaflet, Flyer, Plakat	135,833,000	0	127,807,358	7,800,000	135,607,358	99.83 %	225,642
000083. Konsumsi Makan	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000084. Konsumsi Kudapan	2,268,000	0	2,263,100	0	2,263,100	99.78 %	4,900
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	237,978,000	0	175,925,920	58,846,552	234,772,472	98.65 %	3,205,528
000085. TV Berlangganan	23,328,000	0	21,463,920	1,864,080	23,328,000	100.00	0
000086. Press Conference	3,600,000	0	2,400,000	51,472	2,451,472	68.10 %	1,148,528
000088. Buletin Kehumasan	26,200,000	0	19,827,000	6,350,000	26,177,000	99.91 %	23,000
000089. Iklan	167,850,000	0	130,775,000	35,700,000	166,475,000	99.18 %	1,375,000
000979. Dekorasi Taman	3,000,000	0	1,460,000	895,000	2,355,000	78.50 %	645,000
001083. Kalender	12,500,000	0	0	12,487,500	12,487,500	99.90 %	12,500
001314. Langganan Penyimpanan Cloud	1,500,000	0	0	1,498,500	1,498,500	99.90 %	1,500
052 Pelaksanaan Kehumasan	243,041,000	0	203,973,399	33,673,900	237,647,299	97.78 %	5,393,701
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	243,041,000	0	203,973,399	33,673,900	237,647,299	97.78 %	5,393,701
521211 Belanja Bahan	19,373,000	0	17,219,200	2,130,000	19,349,200	99.88 %	23,800
000092. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	5,000,000	0	4,995,000	0	4,995,000	99.90 %	5,000
000094. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	3,124,000	0	3,119,200	0	3,119,200	99.85 %	4,800
000095. Konsumsi Makan	8,305,000	0	6,655,000	1,650,000	8,305,000	100.00	0
000096. Konsumsi Kudapan	2,944,000	0	2,450,000	480,000	2,930,000	99.52 %	14,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	211,508,000	0	176,554,199	29,583,900	206,138,099	97.46 %	5,369,901
000099. Transport Darat	30,860,000	0	23,221,700	6,971,900	30,193,600	97.84 %	666,400

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000100. Uang Harian	13,780,000	0	9,540,000	4,180,000	13,720,000	99.56 %	60,000
000101. Uang Penginapan Gol III	7,140,000	0	4,393,999	1,910,000	6,303,999	88.29 %	836,001
000102. Tiket Pesawat	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	100.00	0
000103. Taksi Jakarta	226,000	0	225,000	0	225,000	99.56 %	1,000
000104. Taksi Semarang	156,000	0	155,000	0	155,000	99.36 %	1,000
000106. Uang Harian	113,960,000	0	102,210,000	10,310,000	112,520,000	98.74 %	1,440,000
000107. Uang Penginapan Gol III	33,990,000	0	31,133,500	2,300,000	33,433,500	98.36 %	556,500
001086. Transport Darat	2,910,000	0	2,495,000	406,000	2,901,000	99.69 %	9,000
001316. Uang Harian	2,800,000	0	0	2,540,000	2,540,000	90.71 %	260,000
001317. Uang Penginapan	850,000	0	0	730,000	730,000	85.88 %	120,000
001318. Transport Darat	1,656,000	0	0	236,000	236,000	14.25 %	1,420,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,400,000	0	10,200,000	1,200,000	11,400,000	100.00	0
000108. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Peliputan	11,400,000	0	10,200,000	1,200,000	11,400,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	760,000	0	0	760,000	760,000	100.00	0
001087. Uang Harian Fullboard	560,000	0	0	560,000	560,000	100.00	0
001374. Transport Darat	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
EBA.959 Layanan Protokoler	289,020,000	0	215,853,726	68,645,300	284,499,026	98.44 %	4,520,974
051 Koordinasi Keprotokoleran	17,340,000	0	8,699,700	8,620,000	17,319,700	99.88 %	20,300
051.0A Koordinasi Keprotokoleran	17,340,000	0	8,699,700	8,620,000	17,319,700	99.88 %	20,300
521211 Belanja Bahan	10,590,000	0	1,949,700	8,620,000	10,569,700	99.81 %	20,300
000256. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	1,115,000	0	0	1,100,000	1,100,000	98.65 %	15,000
000257. Konsumsi Makan	2,650,000	0	1,550,000	1,100,000	2,650,000	100.00	0
000258. Konsumsi Kudapan	720,000	0	399,700	320,000	719,700	99.96 %	300
001375. Spanduk	6,105,000	0	0	6,100,000	6,100,000	99.92 %	5,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000	100.00	0
000259. Transport Dalam Kota Keprotokoleran Kanwil	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052 Pelaksanaan Keprotokoleran	271,680,000	0	207,154,026	60,025,300	267,179,326	98.34 %	4,500,674
052.0A Pelaksanaan Keprotokoleran	271,680,000	0	207,154,026	60,025,300	267,179,326	98.34 %	4,500,674
522141 Belanja Sewa	80,952,000	0	80,951,600	0	80,951,600	100.00	400
000265. Sewa Kendaraan Dinas Insidentil	80,952,000	0	80,951,600	0	80,951,600	100.00	400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181,128,000	0	117,352,426	59,275,300	176,627,726	97.52 %	4,500,274
000267. Transport Darat	17,444,000	0	11,900,500	5,542,000	17,442,500	99.99 %	1,500
000268. Uang Harian	33,390,000	0	6,790,000	26,600,000	33,390,000	100.00	0
000269. Uang Penginapan Gol III	15,600,000	0	3,500,000	11,890,000	15,390,000	98.65 %	210,000
000270. Tiket Pesawat	8,700,000	0	5,018,494	3,586,800	8,605,294	98.91 %	94,706
000271. Taksi Jakarta	856,000	0	567,000	0	567,000	66.24 %	289,000
000272. Taksi Semarang	800,000	0	173,500	0	173,500	21.69 %	626,500
000274. Uang Harian	68,450,000	0	63,640,000	4,660,000	68,300,000	99.78 %	150,000
000275. Uang Penginapan Gol III	29,288,000	0	25,762,932	2,200,000	27,962,932	95.48 %	1,325,068
001376. Transport Darat	6,600,000	0	0	4,796,500	4,796,500	72.67 %	1,803,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,600,000	0	8,850,000	750,000	9,600,000	100.00	0
000276. Transport Dalam Kota Tim Keprotokoleran Humas dan Tim Keprotokoleran Ajudan/Sespim	9,600,000	0	8,850,000	750,000	9,600,000	100.00	0
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	35,136,000	0	33,666,400	1,080,000	34,746,400	98.89 %	389,600
051 Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan	35,136,000	0	33,666,400	1,080,000	34,746,400	98.89 %	389,600
051.0A Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan	35,136,000	0	33,666,400	1,080,000	34,746,400	98.89 %	389,600
521211 Belanja Bahan	10,619,000	0	9,524,900	1,080,000	10,604,900	99.87 %	14,100
000237. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,370,000	0	4,370,000	0	4,370,000	100.00	0
000238. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	4,913,000	0	4,910,900	0	4,910,900	99.96 %	2,100
000241. Konsumsi Kudapan	256,000	0	244,000	0	244,000	95.31 %	12,000
001377. Goodybag	1,080,000	0	0	1,080,000	1,080,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.00	0
001246. Sewa Bed Medis	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001247. Sewa CCTV	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000	100.00	0
001248. Metal Detector	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,517,000	0	13,141,500	0	13,141,500	97.22 %	375,500
000810. Uang Harian	8,880,000	0	8,510,000	0	8,510,000	95.83 %	370,000
000811. Uang Penginapan	712,000	0	711,000	0	711,000	99.86 %	1,000
000812. Transport Darat	3,925,000	0	3,920,500	0	3,920,500	99.89 %	4,500
EBA.962 Layanan Umum	78,800,000	0	75,490,450	3,286,720	78,777,170	99.97 %	22,830
051 Pengelolaan Kearsipan	78,800,000	0	75,490,450	3,286,720	78,777,170	99.97 %	22,830
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	78,800,000	0	75,490,450	3,286,720	78,777,170	99.97 %	22,830
521211 Belanja Bahan	17,960,000	0	14,650,450	3,286,720	17,937,170	99.87 %	22,830
000246. Bahan Pendukung kegiatan (ATK)	6,180,000	0	3,990,450	2,166,720	6,157,170	99.63 %	22,830
000247. Konsumsi Makan	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
000248. Konsumsi Kudapan	6,780,000	0	5,660,000	1,120,000	6,780,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	60,840,000	0	60,840,000	0	60,840,000	100.00	0
001249. Meja Kecil	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	100.00	0
001250. TV Monitor Standing Bracket	57,600,000	0	57,600,000	0	57,600,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	20,214,454,000	0	17,664,669,877	2,288,728,639	19,953,398,516	98.71 %	261,055,484
001 Gaji dan Tunjangan	14,744,787,000	0	13,187,615,829	1,417,609,722	14,605,225,551	99.05 %	139,561,449
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	14,492,331,000	0	13,119,123,829	1,267,642,722	14,386,766,551	99.27 %	105,564,449
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	9,943,003,000	0	9,187,135,500	754,198,100	9,941,333,600	99.98 %	1,669,400
000109. Belanja Gaji Pokok PNS	8,520,135,000	0	7,768,131,600	750,334,700	8,518,466,300	99.98 %	1,668,700
000110. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	717,275,000	0	714,952,800	2,321,600	717,274,400	100.00	600
000111. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	705,593,000	0	704,051,100	1,541,800	705,592,900	100.00	100
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	317,000	0	141,790	16,587	158,377	49.96 %	158,623
000112. Belanja Pembulatan Gaji PNS	292,000	0	117,936	16,217	134,153	45.94 %	157,847
000113. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	13,000	0	12,062	200	12,262	94.32 %	738

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000114. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	12,000	0	11,792	170	11,962	99.68 %	38
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	661,262,000	0	611,150,110	49,821,960	660,972,070	99.96 %	289,930
	000115. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	566,068,000	0	516,549,120	49,517,920	566,067,040	100.00	960
	000116. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	48,097,000	0	47,685,110	182,880	47,867,990	99.52 %	229,010
	000117. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	47,097,000	0	46,915,880	121,160	47,037,040	99.87 %	59,960
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	193,568,000	0	178,793,960	14,772,646	193,566,606	100.00	1,394
	000118. Belanja Tunj.Anak PNS	165,831,000	0	151,174,244	14,656,432	165,830,676	100.00	324
	000119. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	13,978,000	0	13,910,788	66,664	13,977,452	100.00	548
	000120. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	13,759,000	0	13,708,928	49,550	13,758,478	100.00	522
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	475,245,000	0	393,155,000	82,090,000	475,245,000	100.00	0
	000121. Belanja Tunjangan Struktural PNS	405,565,000	0	329,775,000	75,790,000	405,565,000	100.00	0
	000122. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	34,210,000	0	31,690,000	2,520,000	34,210,000	100.00	0
	000123. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	35,470,000	0	31,690,000	3,780,000	35,470,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	954,734,000	0	878,480,000	76,254,000	954,734,000	100.00	0
	000124. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	821,326,000	0	750,772,000	70,554,000	821,326,000	100.00	0
	000125. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	69,464,000	0	64,844,000	4,620,000	69,464,000	100.00	0
	000126. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	63,944,000	0	62,864,000	1,080,000	63,944,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	83,261,000	0	53,011,309	8,247,729	61,259,038	73.57 %	22,001,962
	000127. Belanja Tunjangan PPh PNS	48,386,000	0	20,495,007	5,889,929	26,384,936	54.53 %	22,001,064
	000128. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	16,841,000	0	16,512,482	327,650	16,840,132	99.99 %	868
	000129. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	18,034,000	0	16,003,820	2,030,150	18,033,970	100.00	30
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	531,056,000	0	492,311,160	38,744,700	531,055,860	100.00	140
	000130. Belanja Tunj Beras PNS	531,056,000	0	492,311,160	38,744,700	531,055,860	100.00	140
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,420,380,000	0	1,111,535,000	227,402,000	1,338,937,000	94.27 %	81,443,000
	000132. Belanja Uang Makan	69,300,000	0	50,435,000	9,065,000	59,500,000	85.86 %	9,800,000
	000134. Belanja Uang Makan	1,018,980,000	0	808,376,000	157,657,000	966,033,000	94.80 %	52,947,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000136. Belanja Uang Makan	332,100,000	0	252,724,000	60,680,000	313,404,000	94.37 %	18,696,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	229,505,000	0	213,410,000	16,095,000	229,505,000	100.00	0
000137. Belanja Tunjangan Umum PNS	195,890,000	0	179,795,000	16,095,000	195,890,000	100.00	0
000138. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	16,810,000	0	16,810,000	0	16,810,000	100.00	0
000139. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	16,805,000	0	16,805,000	0	16,805,000	100.00	0
001.0B Uang Lembur	252,456,000	0	68,492,000	149,967,000	218,459,000	86.53 %	33,997,000
512211 Belanja Uang Lembur	252,456,000	0	68,492,000	149,967,000	218,459,000	86.53 %	33,997,000
000141. Belanja Uang Lembur	16,320,000	0	3,196,000	13,073,000	16,269,000	99.69 %	51,000
000142. Belanja Uang Makan Lembur	7,280,000	0	1,190,000	3,665,000	4,855,000	66.69 %	2,425,000
000144. Belanja Uang Lembur	144,000,000	0	36,500,000	87,460,000	123,960,000	86.08 %	20,040,000
000145. Belanja Uang Makan Lembur	48,840,000	0	11,766,000	26,085,000	37,851,000	77.50 %	10,989,000
000147. Belanja Uang Lembur	28,800,000	0	12,150,000	16,650,000	28,800,000	100.00	0
000148. Belanja Uang Makan Lembur	7,216,000	0	3,690,000	3,034,000	6,724,000	93.18 %	492,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,469,667,000	0	4,477,054,048	871,118,917	5,348,172,965	97.78 %	121,494,035
002.0A Kesehatan Pegawai	5,122,000	0	3,919,760	1,117,741	5,037,501	98.35 %	84,499
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,122,000	0	3,919,760	1,117,741	5,037,501	98.35 %	84,499
000149. Poliklinik/Obat-obatan Pegawai	5,122,000	0	3,919,760	1,117,741	5,037,501	98.35 %	84,499
002.0B Pakaian Dinas (Pakaian)	78,428,000	0	24,858,150	53,500,000	78,358,150	99.91 %	69,850
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	78,428,000	0	24,858,150	53,500,000	78,358,150	99.91 %	69,850
000150. Pakaian Dinas PPNPN Keamanan/Security	7,380,000	0	7,380,000	0	7,380,000	100.00	0
000151. Atribut PPNPN Keamanan/Security	7,200,000	0	7,130,250	0	7,130,250	99.03 %	69,750
000152. Pakaian Dinas PPNPN Pengemudi/Driver	2,428,000	0	2,428,000	0	2,428,000	100.00	0
000153. Pakaian Dinas PPNPN Pramubakti/OB	7,920,000	0	7,919,900	0	7,919,900	100.00	100
001149. Pakaian Olah Raga	53,500,000	0	0	53,500,000	53,500,000	100.00	0
002.0C Pemeliharaan Gedung	544,488,000	0	459,152,368	84,722,600	543,874,968	99.89 %	613,032
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	520,488,000	0	436,712,568	83,162,800	519,875,368	99.88 %	612,632

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000154. Gedung Kantor Bertingkat Lantai 3	236,491,000	0	199,443,200	37,045,800	236,489,000	100.00	2,000
	000155. Gedung Kantor Bertingkat Lantai 2	76,812,000	0	76,662,378	25,000	76,687,378	99.84 %	124,622
	000156. Gedung Kantor Tidak Bertingkat Lantai 1	54,611,000	0	19,416,990	34,892,000	54,308,990	99.45 %	302,010
	000157. Halaman Gedung	63,625,000	0	52,359,000	11,200,000	63,559,000	99.90 %	66,000
	000158. Rumah Negara Gol 1 Tipe B	38,994,000	0	38,921,000	0	38,921,000	99.81 %	73,000
	000159. Rumah Negara Gol 1 Tipe C	49,955,000	0	49,910,000	0	49,910,000	99.91 %	45,000
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,000,000	0	22,439,800	1,559,800	23,999,600	100.00	400
	000160. Barang Persediaan Gedung Bangunan	24,000,000	0	22,439,800	1,559,800	23,999,600	100.00	400
002.0D	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	293,658,000	0	257,603,135	22,161,300	279,764,435	95.27 %	13,893,565
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	293,658,000	0	257,603,135	22,161,300	279,764,435	95.27 %	13,893,565
	000161. Inventaris Kantor	400,000	0	340,000	0	340,000	85.00 %	60,000
	000163. Perangkat Teleconference	13,150,000	0	13,150,000	0	13,150,000	100.00	0
	000164. Sound System	18,450,000	0	18,450,000	0	18,450,000	100.00	0
	000165. Jaringan Telepon, PABX dan Internet	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000	100.00	0
	000166. BBM Genset 150 KVA	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
	000167. Laptop / Notebook / Komputer	102,300,000	0	80,863,750	15,467,000	96,330,750	94.16 %	5,969,250
	000168. Printer / Scanner / LCD Projector	29,250,000	0	25,156,500	4,000,000	29,156,500	99.68 %	93,500
	000169. AC	76,121,000	0	68,599,835	144,300	68,744,135	90.31 %	7,376,865
	000170. Genset 150 KVA	14,967,000	0	12,967,000	1,750,000	14,717,000	98.33 %	250,000
	000171. Camera (DSLR, Drone, Video) / Mesin Absensi	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0
	000172. TV / Display Informasi Publik	5,850,000	0	5,841,050	0	5,841,050	99.85 %	8,950
	000173. CCTV / Videotron	22,000,000	0	21,945,000	0	21,945,000	99.75 %	55,000
	000174. Fotocopy	1,000,000	0	200,000	800,000	1,000,000	100.00	0
	000972. Server	500,000	0	420,000	0	420,000	84.00 %	80,000
002.0E	Pemeliharaan Kendaraan	576,710,000	0	527,907,650	44,703,960	572,611,610	99.29 %	4,098,390
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	25,800,000	0	24,958,500	0	24,958,500	96.74 %	841,500

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000175. Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 (Dua)	2,800,000	0	2,427,000	0	2,427,000	86.68 %	373,000
	000176. Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 (Empat)	23,000,000	0	22,531,500	0	22,531,500	97.96 %	468,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	550,910,000	0	502,949,150	44,703,960	547,653,110	99.41 %	3,256,890
	000178. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Empat)	33,310,000	0	8,586,008	22,694,529	31,280,537	93.91 %	2,029,463
	000179. BBM Kendaraan Roda 4 (Empat)	24,000,000	0	23,659,060	0	23,659,060	98.58 %	340,940
	000180. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Empat) Pimti	28,150,000	0	28,131,984	0	28,131,984	99.94 %	18,016
	000181. BBM Kendaraan Roda 4 (Empat) Pimti	51,000,000	0	49,287,712	1,447,212	50,734,924	99.48 %	265,076
	000183. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua)	12,700,000	0	12,009,000	642,000	12,651,000	99.61 %	49,000
	000184. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Empat)	267,126,000	0	251,350,000	15,223,305	266,573,305	99.79 %	552,695
	000185. BBM Kendaraan Roda 2 (Dua)	1,244,000	0	846,378	396,914	1,243,292	99.94 %	708
	000186. BBM Kendaraan Roda 4 (Empat)	133,380,000	0	129,079,008	4,300,000	133,379,008	100.00	992
002.0F	Langganan Daya dan Jasa	544,359,000	0	494,161,201	50,177,333	544,338,534	100.00	20,466
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,744,000	0	9,501,901	236,500	9,738,401	99.94 %	5,599
	000188. Pengiriman Surat Dinas (POS)	9,744,000	0	9,501,901	236,500	9,738,401	99.94 %	5,599
522111	Belanja Langganan Listrik	528,048,000	0	478,785,454	49,255,834	528,041,288	100.00	6,712
	000189. Langganan Listrik	528,048,000	0	478,785,454	49,255,834	528,041,288	100.00	6,712
522112	Belanja Langganan Telepon	3,900,000	0	3,617,046	275,399	3,892,445	99.81 %	7,555
	000190. Langganan Telepon	3,900,000	0	3,617,046	275,399	3,892,445	99.81 %	7,555
522113	Belanja Langganan Air	2,667,000	0	2,256,800	409,600	2,666,400	99.98 %	600
	000191. Langganan Air	2,667,000	0	2,256,800	409,600	2,666,400	99.98 %	600
002.0G	Keperluan Perkantoran	1,256,946,000	0	1,022,859,938	230,503,853	1,253,363,791	99.72 %	3,582,209
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,212,069,000	0	989,199,118	219,428,933	1,208,628,051	99.72 %	3,440,949
	000192. Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Memiliki lebih dari 40 Pegawai)	247,189,000	0	191,299,118	53,192,933	244,492,051	98.91 %	2,696,949
	000193. Retribusi Sampah	6,600,000	0	5,400,000	1,200,000	6,600,000	100.00	0
	000194. PPNPN Keamanan/Security (UMK Kota Semarang)	376,200,000	0	313,500,000	62,700,000	376,200,000	100.00	0
	000195. PPNPN Pengemudi/Driver (UMK Kota Semarang)	131,100,000	0	114,000,000	17,100,000	131,100,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000196. PPNPN Pramubakti/OB (UMK Kota Semarang)	410,400,000	0	342,000,000	68,400,000	410,400,000	100.00	0
	000784. PPNPN Keamanan/Security (UMK Kota Semarang)	27,600,000	0	23,000,000	4,600,000	27,600,000	100.00	0
	001418. Penggandaan	6,076,000	0	0	6,076,000	6,076,000	100.00	0
	001419. Pigura	6,160,000	0	0	6,160,000	6,160,000	100.00	0
	001420. Piagam	530,000	0	0	0	0	0.00 %	530,000
	001421. Percetakan	214,000	0	0	0	0	0.00 %	214,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16,434,000	0	16,323,120	0	16,323,120	99.33 %	110,880
	000904. Kursi Jaring Archilles	8,510,000	0	8,502,600	0	8,502,600	99.91 %	7,400
	000905. Kursi Meeting Kingston	3,924,000	0	3,920,520	0	3,920,520	99.91 %	3,480
	000906. Tiang Bendera	4,000,000	0	3,900,000	0	3,900,000	97.50 %	100,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28,443,000	0	17,337,700	11,074,920	28,412,620	99.89 %	30,380
	000197. ATK, Barang Cetakan dan Alat Rumah Tangga	20,943,000	0	10,867,700	10,074,920	20,942,620	100.00	380
	000198. Bahan Komputer Supplies	1,500,000	0	1,470,000	0	1,470,000	98.00 %	30,000
	000199. Materai	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	100.00	0
002.0H	Konsultasi dan Koordinasi	571,980,000	0	406,527,206	94,025,710	500,552,916	87.51 %	71,427,084
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	571,980,000	0	406,527,206	94,025,710	500,552,916	87.51 %	71,427,084
	000201. Transport Darat	75,600,000	0	63,567,330	6,069,468	69,636,798	92.11 %	5,963,202
	000202. Uang Harian	74,200,000	0	34,510,000	21,710,000	56,220,000	75.77 %	17,980,000
	000203. Uang Penginapan Eselon II	24,000,000	0	15,451,843	8,545,540	23,997,383	99.99 %	2,617
	000204. Tiket Pesawat	50,400,000	0	32,529,633	16,029,203	48,558,836	96.35 %	1,841,164
	000205. Taksi Jakarta	820,000	0	0	210,420	210,420	25.66 %	609,580
	000206. Taksi Semarang	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
	000208. Uang Harian	224,960,000	0	163,360,000	20,285,000	183,645,000	81.63 %	41,315,000
	000209. Uang Penginapan	121,500,000	0	97,108,400	21,176,079	118,284,479	97.35 %	3,215,521
002.0J	Jamuan Tamu Pimpinan	228,182,000	0	176,959,000	31,195,770	208,154,770	91.22 %	20,027,230
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	228,182,000	0	176,959,000	31,195,770	208,154,770	91.22 %	20,027,230

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000215. Jamuan Tamu	228,182,000	0	176,959,000	31,195,770	208,154,770	91.22 %	20,027,230
002.0K	Honor Operasional Satker	231,510,000	0	191,320,000	36,890,000	228,210,000	98.57 %	3,300,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	231,510,000	0	191,320,000	36,890,000	228,210,000	98.57 %	3,300,000
	000217. BPP KI dan PP	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	100.00	0
	000218. BPP PAS dan PP	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
	000219. BPP Imigrasi	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
	000220. BPP AHU	6,840,000	0	5,700,000	1,140,000	6,840,000	100.00	0
	000221. Staf PPABP	7,680,000	0	6,400,000	1,280,000	7,680,000	100.00	0
	000222. Honor Saiba	18,000,000	0	14,250,000	2,850,000	17,100,000	95.00 %	900,000
	000223. Honor SABMN	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
	000224. KPA	41,040,000	0	34,200,000	6,840,000	41,040,000	100.00	0
	000226. PPK Setjen, PAS, Imigrasi	39,840,000	0	33,200,000	6,640,000	39,840,000	100.00	0
	000227. PPK Yankum	35,040,000	0	29,200,000	5,840,000	35,040,000	100.00	0
	000228. Staf Pembantu PPK	10,800,000	0	9,000,000	1,200,000	10,200,000	94.44 %	600,000
	000229. PPSPM	18,240,000	0	15,200,000	3,040,000	18,240,000	100.00	0
	000230. Bendahara Pengeluaran	15,840,000	0	13,200,000	2,640,000	15,840,000	100.00	0
	000795. BPP HAM	5,160,000	0	4,300,000	860,000	5,160,000	100.00	0
	000796. BPP BPHN	6,840,000	0	5,700,000	1,140,000	6,840,000	100.00	0
	000797. Staff Pengelola Keuangan	7,680,000	0	6,400,000	1,280,000	7,680,000	100.00	0
	001244. BPP Imigrasi dan PAS	1,710,000	0	570,000	1,140,000	1,710,000	100.00	0
002.0L	Sewa Operasional Perkantoran	911,624,000	0	899,755,640	8,497,950	908,253,590	99.63 %	3,370,410
522141	Belanja Sewa	850,624,000	0	850,623,417	0	850,623,417	100.00	583
	000233. Sewa Bandwidth (Internet)	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	100.00	0
	000786. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	38,342,000	0	38,341,417	0	38,341,417	100.00	583
	000787. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	401,082,000	0	401,082,000	0	401,082,000	100.00	0
	000891. Sewa Kendaraan Pejabat	111,200,000	0	111,200,000	0	111,200,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61,000,000	0	49,132,223	8,497,950	57,630,173	94.48 %	3,369,827
000892. BBM Sewa Kendaraan Pejabat	61,000,000	0	49,132,223	8,497,950	57,630,173	94.48 %	3,369,827
002.0M Pelantikan/Sumpah Jabatan	226,660,000	0	12,030,000	213,622,700	225,652,700	99.56 %	1,007,300
521211 Belanja Bahan	7,408,000	0	3,230,000	3,990,700	7,220,700	97.47 %	187,300
000235. Konsumsi Kudapan	3,232,000	0	3,230,000	0	3,230,000	99.94 %	2,000
001321. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	2,750,000	0	0	2,748,500	2,748,500	99.95 %	1,500
001322. Percetakan dan Penjilidan	1,426,000	0	0	1,242,200	1,242,200	87.11 %	183,800
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	100.00	0
000236. Honor Rohaniawan	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	210,452,000	0	0	209,632,000	209,632,000	99.61 %	820,000
001027. Sewa Dekorasi Panggung	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
001028. Sewa AC 5 PK	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
001029. Sewa Genset	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
001031. Sewa Soundsystem	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00	0
001150. Sewa Meja Ujian	176,000,000	0	0	176,000,000	176,000,000	100.00	0
001324. Sewa Kendaraan Insidentil Pimpinan	10,555,000	0	0	9,735,000	9,735,000	92.23 %	820,000
001389. Flooring lantai	2,680,000	0	0	2,680,000	2,680,000	100.00	0
001390. Tenda FOHmejaCover	2,997,000	0	0	2,997,000	2,997,000	100.00	0
001391. karpet merah	3,060,000	0	0	3,060,000	3,060,000	100.00	0
001392. Taman	2,775,000	0	0	2,775,000	2,775,000	100.00	0
001393. Sewa Soundsystem	3,885,000	0	0	3,885,000	3,885,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,128,806,000	0	1,721,000,038	407,449,450	2,128,449,488	99.98 %	356,512
EBB.951 Layanan Sarana Internal	940,616,000	0	938,638,488	1,900,000	940,538,488	99.99 %	77,512
051 Pengadaan kendaraan bermotor	165,000,000	0	165,000,000	0	165,000,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	165,000,000	0	165,000,000	0	165,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165,000,000	0	165,000,000	0	165,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000947. Mobil pick up	165,000,000	0	165,000,000	0	165,000,000	100.00	0
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100.00	0
000944. Laptop	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
000969. PC Unit	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	575,616,000	0	573,638,488	1,900,000	575,538,488	99.99 %	77,512
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	575,616,000	0	573,638,488	1,900,000	575,538,488	99.99 %	77,512
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	575,616,000	0	573,638,488	1,900,000	575,538,488	99.99 %	77,512
000277. Tempat Tidur	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
000278. Meja Makan	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	100.00	0
000279. Roller Blind	15,341,000	0	15,341,000	0	15,341,000	100.00	0
000280. AC 1,5 PK	119,691,000	0	119,691,000	0	119,691,000	100.00	0
000281. Pompa Air	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	100.00	0
000282. Mesin Pemotong Rumput	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
000283. Arena Bermain Anak	11,945,000	0	11,945,000	0	11,945,000	100.00	0
000284. Almari	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	100.00	0
000285. Workstation 4 Staf	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	100.00	0
000899. Meja Rapat	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000907. Kursi	1,999,000	0	1,999,000	0	1,999,000	100.00	0
000948. Workstation 6 staf	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	100.00	0
000949. Kursi Pimpinan	6,496,000	0	6,418,738	0	6,418,738	98.81 %	77,262
000970. Meja Kerja	28,800,000	0	28,800,000	0	28,800,000	100.00	0
000971. Meja Tennis Meja	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
001017. Almari	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
001018. Meja Roundtable	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001019. AC 1,5 PK	14,344,000	0	14,343,750	0	14,343,750	100.00	250
001020. Kursi Kerja	63,600,000	0	63,600,000	0	63,600,000	100.00	0
001326. Wastafel Portabel	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	100.00	0
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1,188,190,000	0	782,361,550	405,549,450	1,187,911,000	99.98 %	279,000
051 Gedung dan Bangunan	1,188,190,000	0	782,361,550	405,549,450	1,187,911,000	99.98 %	279,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,188,190,000	0	782,361,550	405,549,450	1,187,911,000	99.98 %	279,000
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,188,190,000	0	782,361,550	405,549,450	1,187,911,000	99.98 %	279,000
000924. Biaya Konstruksi Jl. Tampomas IA Semarang	196,280,000	0	127,582,000	68,698,000	196,280,000	100.00	0
000925. Biaya Konstruksi Jl. Lamongan Barat VI No 5 Semarang	215,180,000	0	139,867,000	75,313,000	215,180,000	100.00	0
000926. Biaya Konstruksi Jl. Siliwangi 508 D Semarang	429,720,000	0	279,179,550	150,327,450	429,507,000	99.95 %	213,000
000927. Biaya Perencanaan Rumah Dinas	97,450,000	0	77,960,000	19,490,000	97,450,000	100.00	0
000928. Biaya Pengawasan Rumah Dinas	49,704,000	0	0	49,704,000	49,704,000	100.00	0
000929. Biaya Pengelolaan Kegiatan Rumah Dinas	49,787,000	0	7,770,000	42,017,000	49,787,000	100.00	0
001022. Interior Ruang Rapat Arjuna dan Ruang Rapat Pandawa	59,366,000	0	59,365,000	0	59,365,000	100.00	1,000
001024. Pemasanagan Canopy dan Perbaikan Saluran Rumah Dinas Pimti	90,703,000	0	90,638,000	0	90,638,000	99.93 %	65,000
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1,951,358,000	0	1,371,296,669	561,342,782	1,932,639,451	99.04 %	18,718,549
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,951,358,000	0	1,371,296,669	561,342,782	1,932,639,451	99.04 %	18,718,549
051 Administrasi Kepegawaian	1,175,305,000	0	759,064,585	410,181,937	1,169,246,522	99.48 %	6,058,478
051.0B Pelaksanaan Ujian Dinas Tk I, Ujian Penyesuaian Ijazah, Penilaian JFT dan Ujian Kompetensi Pegawai	147,502,000	0	143,872,760	3,348,400	147,221,160	99.81 %	280,840
521211 Belanja Bahan	56,302,000	0	55,722,760	348,400	56,071,160	99.59 %	230,840
000289. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	5,527,000	0	5,497,020	0	5,497,020	99.46 %	29,980
000290. Konsumsi Makan	25,575,000	0	25,200,000	188,400	25,388,400	99.27 %	186,600
000291. Konsumsi Kudapan	17,600,000	0	17,440,000	160,000	17,600,000	100.00	0
001151. Air Mineral	5,600,000	0	5,587,740	0	5,587,740	99.78 %	12,260
001152. Spanduk	2,000,000	0	1,998,000	0	1,998,000	99.90 %	2,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141	Belanja Sewa	36,900,000	0	36,150,000	750,000	36,900,000	100.00	0
	001251. Sewa Tenda Plafon	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
	001252. Sewa Kursi Lipat	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	100.00	0
	001253. Sewa Taman	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
	001254. Misty Fan	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54,300,000	0	52,000,000	2,250,000	54,250,000	99.91 %	50,000
	000292. Transport Dalam Kota Koordinasi ke BKN Kota Semarang, Badiklat dan Dinas Terkait	54,300,000	0	52,000,000	2,250,000	54,250,000	99.91 %	50,000
051.0C	Pengambilan Sumpah/ Janji PNS, Pelantikan, dan Sertijab	130,682,000	0	120,797,775	9,612,000	130,409,775	99.79 %	272,225
521211	Belanja Bahan	54,507,000	0	46,050,275	8,280,000	54,330,275	99.68 %	176,725
	000294. Spanduk	5,320,000	0	3,360,000	1,880,000	5,240,000	98.50 %	80,000
	000296. Konsumsi Kudapan	25,600,000	0	19,200,000	6,400,000	25,600,000	100.00	0
	000873. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	12,587,000	0	12,490,275	0	12,490,275	99.23 %	96,725
	000959. Konsumsi Makan	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	76,175,000	0	74,747,500	1,332,000	76,079,500	99.87 %	95,500
	000874. Sewa LED Videotron	30,510,000	0	30,510,000	0	30,510,000	100.00	0
	000875. Sewa Dekorasi Panggung	7,650,000	0	7,650,000	0	7,650,000	100.00	0
	000876. Sewa Taman	3,687,000	0	2,260,000	1,332,000	3,592,000	97.42 %	95,000
	000877. Sewa Genset	5,825,000	0	5,825,000	0	5,825,000	100.00	0
	000878. Sewa Sound System dan Lighting	5,650,000	0	5,650,000	0	5,650,000	100.00	0
	000879. Sewa Gedung	19,253,000	0	19,252,500	0	19,252,500	100.00	500
	000960. Sewa AC 5 PK	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
	001032. Sewa kursi	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
051.0D	Pengadaan CPNS	897,121,000	0	494,394,050	397,221,537	891,615,587	99.39 %	5,505,413
521211	Belanja Bahan	255,726,000	0	114,219,050	140,128,037	254,347,087	99.46 %	1,378,913
	000298. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	5,000,000	0	4,989,450	0	4,989,450	99.79 %	10,550
	000302. Perlengkapan	4,987,000	0	4,839,600	143,000	4,982,600	99.91 %	4,400

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000307. Konsumsi Makan SKD CATAR	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000	100.00	0
000308. Konsumsi Kudapan SKD CATAR	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000	100.00	0
000961. Konsumsi Makan Psikotes	3,025,000	0	3,025,000	0	3,025,000	100.00	0
000962. Konsumsi Kudapan Psikotes	880,000	0	880,000	0	880,000	100.00	0
001159. Konsumsi Makan SKD SMA	54,450,000	0	54,450,000	0	54,450,000	100.00	0
001160. Konsumsi Snack SKD SMA	31,680,000	0	31,680,000	0	31,680,000	100.00	0
001161. Spanduk / MMT	20,878,000	0	0	20,878,000	20,878,000	100.00	0
001162. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	100.00	0
001164. Konsumsi Makan SKB Samapta	15,400,000	0	0	15,400,000	15,400,000	100.00	0
001165. Konsumsi Kudapan SKB Samapta	4,480,000	0	0	4,480,000	4,480,000	100.00	0
001166. Air mineral Botol	4,521,000	0	0	4,517,700	4,517,700	99.93 %	3,300
001168. Spanduk / MMT (banner, baliho)	16,950,000	0	0	16,949,700	16,949,700	100.00	300
001170. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	8,000,000	0	0	7,994,220	7,994,220	99.93 %	5,780
001173. Konsumsi Makan WPFK	5,940,000	0	0	5,887,200	5,887,200	99.11 %	52,800
001174. Konsumsi Kudapan WPFK	2,720,000	0	0	2,720,000	2,720,000	100.00	0
001175. Air mineral Botol	700,000	0	0	693,750	693,750	99.11 %	6,250
001177. Spanduk / MMT	4,800,000	0	0	4,795,000	4,795,000	99.90 %	5,000
001178. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	7,762,000	0	0	7,699,515	7,699,515	99.19 %	62,485
001233. Label barang titipan kabel ties	12,100,000	0	0	12,100,000	12,100,000	100.00	0
001234. Air mineral 600 ml	533,000	0	0	532,800	532,800	99.96 %	200
001235. Air mineral Galon	2,520,000	0	0	2,517,480	2,517,480	99.90 %	2,520
001236. Air mineral Gelas	5,057,000	0	0	5,054,940	5,054,940	99.96 %	2,060
001237. Cup minum	160,000	0	0	0	0	0.00 %	160,000
001327. air minerla botol 330 ml	1,040,000	0	0	1,038,960	1,038,960	99.90 %	1,040
001329. Perlengkapan	4,695,000	0	0	4,694,575	4,694,575	99.99 %	425
001330. Pemisah Jalan, Rangka Baja ringan police line	2,250,000	0	0	2,250,000	2,250,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	001331. perlengkapan	6,960,000	0	0	6,899,550	6,899,550	99.13 %	60,450
	001367. Obat - Obatan	2,521,000	0	0	2,520,943	2,520,943	100.00	57
	001368. Air mineral Galon	364,000	0	0	363,636	363,636	99.90 %	364
	001387. Obat - Obatan Seleksi Kompetensi Bidang / Samapta	1,998,000	0	0	1,997,068	1,997,068	99.95 %	932
	001416. Id Card B3 tali	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,100,000	0	31,900,000	4,200,000	36,100,000	100.00	0
	001283. Seragam Panitia	33,600,000	0	29,400,000	4,200,000	33,600,000	100.00	0
	001284. Rompi Pimti	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	441,795,000	0	329,675,000	110,743,500	440,418,500	99.69 %	1,376,500
	000963. Sewa Tenda/kursi ujian Psikotes, tes kesehatan, wawancara	4,000,000	0	3,975,000	0	3,975,000	99.38 %	25,000
	001183. AC Standing	15,500,000	0	4,500,000	11,000,000	15,500,000	100.00	0
	001184. Baner Gantung	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
	001185. Gate antrian Police line	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
	001186. Karpet Ruang CAT	34,650,000	0	34,650,000	0	34,650,000	100.00	0
	001187. Laptop	69,300,000	0	69,300,000	0	69,300,000	100.00	0
	001188. Meja Panjang	7,920,000	0	7,920,000	0	7,920,000	100.00	0
	001189. Misty Fan	43,200,000	0	43,200,000	0	43,200,000	100.00	0
	001190. Tenda Plafon	84,150,000	0	69,300,000	14,850,000	84,150,000	100.00	0
	001191. Tenda sanafil 5x5m untuk medis	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	100.00	0
	001192. Toilet portable	81,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000	100.00	0
	001193. Sewa Tenda Plafon	22,607,000	0	0	22,588,500	22,588,500	99.92 %	18,500
	001195. Sewa Kursi Lipat	1,665,000	0	0	1,665,000	1,665,000	100.00	0
	001197. Sewa Misty Fan	3,552,000	0	0	3,552,000	3,552,000	100.00	0
	001200. Sewa Monitor TV standing Bracket	4,068,000	0	0	4,068,000	4,068,000	100.00	0
	001203. Sewa Tenda sanafil 5x5 untuk medis	1,887,000	0	0	1,887,000	1,887,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	001207. Sewa partisi	1,388,000	0	0	1,387,500	1,387,500	99.96 %	500
	001208. Sewa CCTV	5,130,000	0	0	5,130,000	5,130,000	100.00	0
	001210. Tenda Plafon	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	100.00	0
	001211. Sewa Kursi Susun	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100.00	0
	001212. Sewa Misty Fan	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	100.00	0
	001213. Sewa Taman	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
	001332. Printer	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00	0
	001333. Karpet Ruang Registrasi dan pemberian PIN	4,860,000	0	0	4,860,000	4,860,000	100.00	0
	001334. Switching Listrik, Sewa Kabel panjang 100 meter	6,993,000	0	0	6,993,000	6,993,000	100.00	0
	001369. Sewa Tenda sanafil 5x5 untuk informasi layanan non carpet	1,332,000	0	0	0	0	0.00 %	1,332,000
	001370. Sewa Tenda Sanafil	550,000	0	0	550,000	550,000	100.00	0
	001394. Sewa Laptop	11,200,000	0	0	11,200,000	11,200,000	100.00	0
	001395. Sewa Kain Hitam Penutup kaca ruangan	1,813,000	0	0	1,812,500	1,812,500	99.97 %	500
	001396. Sewa Printer	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	100.00	0
	001397. Sewa Jaringan Internet	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	100.00	0
	001373. Honor Instruktur / penguji/ tim kesehatan / pengamanan	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	123,500,000	0	18,600,000	102,150,000	120,750,000	97.77 %	2,750,000
	000314. Transport Panitia CATAR	18,600,000	0	18,600,000	0	18,600,000	100.00	0
	000315. Transport Panitia SKD CAT	84,150,000	0	0	84,100,000	84,100,000	99.94 %	50,000
	001053. Transport Panitia SKB Kesamaptaan	13,500,000	0	0	10,800,000	10,800,000	80.00 %	2,700,000
	001054. Transport Panitia Wawancara (WPFK)	4,950,000	0	0	4,950,000	4,950,000	100.00	0
	001371. Transport Panitia PPNPN Tenaga Kebersihan SKB Kesamaptaan	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	100.00	0
	001372. Transport Panitia PPNPN Tenaga Kebersihan Ujian WPFK	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	100.00	0
052	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	776,053,000	0	612,232,084	151,160,845	763,392,929	98.37 %	12,660,071

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A Pembinaan Kepegawaian dan Bapperjakat Eselon IV /V/JP/JF	762,053,000	0	599,982,084	149,760,845	749,742,929	98.38 %	12,310,071
521211 Belanja Bahan	192,472,000	0	112,558,200	74,874,769	187,432,969	97.38 %	5,039,031
000320. Konsumsi Kudapan Daya Tahan Tubuh/Senam Pegawai	96,976,000	0	58,068,800	37,868,430	95,937,230	98.93 %	1,038,770
000324. Konsumsi Kudapan	240,000	0	159,000	0	159,000	66.25 %	81,000
000329. Konsumsi Kudapan	6,496,000	0	6,400,000	0	6,400,000	98.52 %	96,000
000332. Konsumsi Makan	935,000	0	900,000	0	900,000	96.26 %	35,000
000333. Konsumsi Kudapan	480,000	0	480,000	0	480,000	100.00	0
000335. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	5,526,000	0	5,526,000	0	5,526,000	100.00	0
000914. Even Kit (Kaos lengan panjang Topi)	30,150,000	0	30,150,000	0	30,150,000	100.00	0
000915. Banner	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000973. Konsumsi Kudapan	1,200,000	0	0	1,189,000	1,189,000	99.08 %	11,000
000974. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,470,000	0	2,999,400	771,339	3,770,739	84.36 %	699,261
000975. Konsumsi Kudapan	880,000	0	880,000	0	880,000	100.00	0
000976. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,995,000	0	4,995,000	0	4,995,000	100.00	0
001221. Spanduk	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
001399. Konsumsi Kudapan	19,030,000	0	0	19,030,000	19,030,000	100.00	0
001400. Air mineral Botol	100,000	0	0	100,000	100,000	100.00	0
001401. Air mineral gelas	430,000	0	0	430,000	430,000	100.00	0
001402. Spanduk ukuran 15x 5,5m	2,886,000	0	0	0	0	0.00 %	2,886,000
001403. Banner 385x1.5 express	4,149,000	0	0	4,149,000	4,149,000	100.00	0
001404. Pemasangan Banner	833,000	0	0	833,000	833,000	100.00	0
001405. Pemasangan Banner tambahan	1,110,000	0	0	1,110,000	1,110,000	100.00	0
001406. Sertifikat ukuran F4	192,000	0	0	0	0	0.00 %	192,000
001407. Rangka Banner Baja ringan 0,75	6,730,000	0	0	6,730,000	6,730,000	100.00	0
001417. Banner 300x500 2set	2,164,000	0	0	2,164,000	2,164,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	43,687,000	0	32,800,000	10,887,000	43,687,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000916. Sewa Bus Smg - Magelang	32,800,000	0	32,800,000	0	32,800,000	100.00	0
	001338. Sewa Microphone Delegate	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	100.00	0
	001409. sewa Tenda serut merah putih	1,887,000	0	0	1,887,000	1,887,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	5,600,000	0	3,200,000	2,400,000	5,600,000	100.00	0
	000347. Narasumber Eselon III ke bawah Kegiatan Pembinaan Orientasi Lapangan Taruna Poltekip dan Poltekim (UPT BKN Semarang)	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
	000348. Nrasumber eselon III ke bawah Kegiatan Pembinaan Keagamaan Kepegawaian (BAI Jateng)	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	170,573,000	0	170,573,000	0	170,573,000	100.00	0
	000917. Paket employee Gathering FMD	30,150,000	0	30,150,000	0	30,150,000	100.00	0
	000918. Paket Meeting Fullboard	135,828,000	0	135,828,000	0	135,828,000	100.00	0
	000919. Paket Meeting Fullboard Eselon II	4,595,000	0	4,595,000	0	4,595,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	245,741,000	0	176,920,884	61,599,076	238,519,960	97.06 %	7,221,040
	000351. Transport Darat	2,250,000	0	2,025,000	44,000	2,069,000	91.96 %	181,000
	000353. Uang Harian	88,800,000	0	63,580,000	23,310,000	86,890,000	97.85 %	1,910,000
	000354. Uang Penginapan Gol III	41,500,000	0	26,034,000	15,000,000	41,034,000	98.88 %	466,000
	000355. Transport Darat	33,400,000	0	24,079,779	6,852,940	30,932,719	92.61 %	2,467,281
	000358. Tiket Pesawat	27,821,000	0	25,701,686	1,502,136	27,203,822	97.78 %	617,178
	000359. Taksi Jakarta	2,250,000	0	2,169,420	0	2,169,420	96.42 %	80,580
	000360. Taksi Semarang	1,000,000	0	987,000	0	987,000	98.70 %	13,000
	000362. Uang Harian	10,500,000	0	10,150,000	0	10,150,000	96.67 %	350,000
	000363. Uang Penginapan Gol III	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
	000930. Uang Harian	15,900,000	0	12,000,000	3,855,000	15,855,000	99.72 %	45,000
	000931. Uang Penginapan Gol III	12,600,000	0	8,693,999	3,900,000	12,593,999	99.95 %	6,001
	001411. Uang Harian	6,660,000	0	0	6,660,000	6,660,000	100.00	0
	001412. Uang Penginapan Gol IV	1,560,000	0	0	475,000	475,000	30.45 %	1,085,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000	0	7,450,000	0	7,450,000	99.33 %	50,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000364. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	3,450,000	0	3,400,000	0	3,400,000	98.55 %	50,000
001245. Transport Dalam Kota Pengamanan CPNS	4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	96,480,000	0	96,480,000	0	96,480,000	100.00	0
000911. Uang Harian Peserta	70,350,000	0	70,350,000	0	70,350,000	100.00	0
000912. Uang Harian Fullboard Peserta	26,130,000	0	26,130,000	0	26,130,000	100.00	0
052.0B Bina Mental Pegawai	14,000,000	0	12,250,000	1,400,000	13,650,000	97.50 %	350,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	14,000,000	0	12,250,000	1,400,000	13,650,000	97.50 %	350,000
000366. Honor Instruktur Senam	14,000,000	0	12,250,000	1,400,000	13,650,000	97.50 %	350,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,492,548,000	0	2,052,739,239	406,557,039	2,459,296,278	98.67 %	33,251,722
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	825,340,000	0	745,962,859	75,619,680	821,582,539	99.54 %	3,757,461
051 Penelitian Pagu	183,855,000	0	182,109,265	1,677,000	183,786,265	99.96 %	68,735
051.0A Supervisi Pagu Indikatif dan Hasil RKA-K/L Pagu Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah	183,855,000	0	182,109,265	1,677,000	183,786,265	99.96 %	68,735
521211 Belanja Bahan	49,605,000	0	47,919,765	1,677,000	49,596,765	99.98 %	8,235
000813. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	2,000,000	0	1,999,665	0	1,999,665	99.98 %	335
000814. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	2,942,000	0	2,941,500	0	2,941,500	99.98 %	500
000815. Penggandaan, Penjilitan dan Pembuatan Laporan	9,477,000	0	7,800,000	1,677,000	9,477,000	100.00	0
000816. Spanduk	746,000	0	745,600	0	745,600	99.95 %	400
000817. Seminar Kit	25,900,000	0	25,900,000	0	25,900,000	100.00	0
000819. Konsumsi Kudapan	8,540,000	0	8,533,000	0	8,533,000	99.92 %	7,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114,750,000	0	114,689,500	0	114,689,500	99.95 %	60,500
000820. Uang Harian	35,200,000	0	35,170,000	0	35,170,000	99.91 %	30,000
000821. Uang Penginapan Gol III	25,470,000	0	25,470,000	0	25,470,000	100.00	0
000822. Transport Darat	6,240,000	0	6,229,500	0	6,229,500	99.83 %	10,500
000996. Uang Harian	47,840,000	0	47,820,000	0	47,820,000	99.96 %	20,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000934. Uang Transport Darat Peserta	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000	100.00	0
000935. Uang Transport Darat Peserta	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000	100.00	0
053 Analisa Kebutuhan	113,418,000	0	113,416,500	0	113,416,500	100.00	1,500
053.0A Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Wilayah dan UPT	13,384,000	0	13,383,500	0	13,383,500	100.00	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,384,000	0	13,383,500	0	13,383,500	100.00	500
000855. Uang Harian	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
000856. Uang Penginapan Gol III	6,760,000	0	6,760,000	0	6,760,000	100.00	0
000857. Transportasi Darat	324,000	0	323,500	0	323,500	99.85 %	500
053.0B Analisa Kebutuhan Anggaran	100,034,000	0	100,033,000	0	100,033,000	100.00	1,000
521211 Belanja Bahan	3,114,000	0	3,114,000	0	3,114,000	100.00	0
000456. Spanduk	650,000	0	650,000	0	650,000	100.00	0
000458. Konsumsi Kudapan	2,464,000	0	2,464,000	0	2,464,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96,920,000	0	96,919,000	0	96,919,000	100.00	1,000
000825. Uang Harian	28,490,000	0	28,490,000	0	28,490,000	100.00	0
000826. Uang Penginapan Gol III	24,600,000	0	24,600,000	0	24,600,000	100.00	0
000827. Transport Darat	3,500,000	0	3,499,000	0	3,499,000	99.97 %	1,000
001135. Uang Harian	23,310,000	0	23,310,000	0	23,310,000	100.00	0
001136. Uang Harian	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
001137. Uang Penginapan Gol III	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
001222. Uang Penginapan Eselon II	920,000	0	920,000	0	920,000	100.00	0
001223. Uang Harian Driver	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
054 Koordinasi dan Konsultasi Capaian Kinerja Kanwil	528,067,000	0	450,437,094	73,942,680	524,379,774	99.30 %	3,687,226
054.0A Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja	80,791,000	0	50,745,000	26,590,500	77,335,500	95.72 %	3,455,500
521211 Belanja Bahan	54,241,000	0	39,715,000	14,316,000	54,031,000	99.61 %	210,000
000496. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	1,055,000	0	1,055,000	0	1,055,000	100.00	0
000499. Konsumsi Kudapan	2,920,000	0	2,920,000	0	2,920,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000506. Konsumsi Kudapan	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	100.00	0
	000782. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	4,780,000	0	4,780,000	0	4,780,000	100.00	0
	000830. Dekorasi taman	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
	000831. Konsumsi Makan	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.00	0
	000832. Konsumsi Kudapan	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
	000859. Konsumsi Makan	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000	100.00	0
	000860. Konsumsi Kudapan	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	100.00	0
	001014. Seminar Kit	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
	001224. Bahan Pendukung Kegiatan (pigura)	12,750,000	0	0	12,540,000	12,540,000	98.35 %	210,000
	001379. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	1,776,000	0	0	1,776,000	1,776,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	11,030,000	0	11,030,000	0	11,030,000	100.00	0
	000833. Sewa AC 5 PK dan Genset	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
	000834. Sewa Kursi, Gelas, Karpet	4,530,000	0	4,530,000	0	4,530,000	100.00	0
	000835. Sewa Sound System	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15,520,000	0	0	12,274,500	12,274,500	79.09 %	3,245,500
	001340. Uang Harian Fullday	760,000	0	0	665,000	665,000	87.50 %	95,000
	001341. Uang Harian	5,920,000	0	0	5,180,000	5,180,000	87.50 %	740,000
	001343. Uang Penginapan Gol III	4,800,000	0	0	3,770,000	3,770,000	78.54 %	1,030,000
	001344. Uang Penginapan Gol III	3,040,000	0	0	1,800,000	1,800,000	59.21 %	1,240,000
	001345. Transportasi Darat	1,000,000	0	0	859,500	859,500	85.95 %	140,500
054.0B	Koordinasi, Konsultasi dan Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran	447,276,000	0	399,692,094	47,352,180	447,044,274	99.95 %	231,726
521211	Belanja Bahan	3,160,000	0	3,160,000	0	3,160,000	100.00	0
	000532. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
	000534. Konsumsi Kudapan	2,980,000	0	2,980,000	0	2,980,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	79,335,000	0	79,335,000	0	79,335,000	100.00	0
	001257. Sewa Kursi Susun	74,340,000	0	74,340,000	0	74,340,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	001258. Sewa Karpet	4,995,000	0	4,995,000	0	4,995,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	352,791,000	0	313,297,094	39,262,180	352,559,274	99.93 %	231,726
	000537. Transport Darat	12,780,000	0	12,767,570	0	12,767,570	99.90 %	12,430
	000540. Uang Penginapan Gol III	640,000	0	635,778	0	635,778	99.34 %	4,222
	000544. Uang Harian	39,600,000	0	23,670,000	15,900,000	39,570,000	99.92 %	30,000
	000545. Uang Penginapan Gol III	29,450,000	0	14,832,600	14,600,000	29,432,600	99.94 %	17,400
	000546. Tiket Pesawat	15,680,000	0	11,130,148	4,530,000	15,660,148	99.87 %	19,852
	000550. Uang Harian	48,444,000	0	48,360,000	0	48,360,000	99.83 %	84,000
	000551. Uang Penginapan Gol III	33,096,000	0	33,065,000	0	33,065,000	99.91 %	31,000
	000836. Transportasi Darat	7,630,000	0	4,889,500	2,732,180	7,621,680	99.89 %	8,320
	000861. Transportasi Darat	873,000	0	873,000	0	873,000	100.00	0
	000863. Uang Harian	39,960,000	0	39,960,000	0	39,960,000	100.00	0
	000864. Uang Penginapan Gol III	31,104,000	0	31,088,000	0	31,088,000	99.95 %	16,000
	000865. Transportasi Darat	2,475,000	0	2,474,000	0	2,474,000	99.96 %	1,000
	000893. Uang Harian	5,160,000	0	5,160,000	0	5,160,000	100.00	0
	000894. Tiket Pesawat	4,164,000	0	4,163,498	0	4,163,498	99.99 %	502
	001000. Uang Harian	12,950,000	0	12,950,000	0	12,950,000	100.00	0
	001001. Uang Penginapan Gol II	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	100.00	0
	001002. Transportasi Darat	735,000	0	729,500	0	729,500	99.25 %	5,500
	001004. Uang Harian	9,250,000	0	9,250,000	0	9,250,000	100.00	0
	001005. Uang Penginapan Gol III	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
	001006. Transportasi Darat	480,000	0	478,500	0	478,500	99.69 %	1,500
	001008. Uang Harian	24,420,000	0	24,420,000	0	24,420,000	100.00	0
	001009. Uang Harian	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	001380. Uang Harian Driver	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000552. Transport Dalam Kota Koordinasi ke Dinas PU dan Dinas Terkait	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000553. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
	001026. Transport Dalam Kota Koordinasi Evaluasi Kinerja Satuan Kerja	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,090,000	0	0	8,090,000	8,090,000	100.00	0
	001346. Uang Harian Jakarta	1,590,000	0	0	1,590,000	1,590,000	100.00	0
	001347. Uang Harian Fullboard Jakarta	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
	001348. Paket Meeting Fullboard	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	100.00	0
	001381. Uang Penginapan	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	100.00	0
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	231,050,000	0	207,325,486	23,643,456	230,968,942	99.96 %	81,058
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	181,479,000	0	157,759,476	23,643,456	181,402,932	99.96 %	76,068
051.0A	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran	53,650,000	0	29,970,900	23,643,456	53,614,356	99.93 %	35,644
521211	Belanja Bahan	2,777,000	0	419,900	2,357,000	2,776,900	100.00	100
	000721. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	2,177,000	0	419,900	1,757,000	2,176,900	100.00	100
	001349. Konsumsi Kudapan	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49,073,000	0	27,751,000	21,286,456	49,037,456	99.93 %	35,544
	000722. Uang Harian	12,355,000	0	12,340,000	0	12,340,000	99.88 %	15,000
	000723. Uang Penginapan Gol III	10,380,000	0	10,370,000	0	10,370,000	99.90 %	10,000
	000724. Transport Darat	5,050,000	0	5,041,000	0	5,041,000	99.82 %	9,000
	001351. Uang Harian	8,880,000	0	0	8,880,000	8,880,000	100.00	0
	001352. Uang Penginapan	5,080,000	0	0	5,080,000	5,080,000	100.00	0
	001353. Transportasi Darat	788,000	0	0	786,456	786,456	99.80 %	1,544
	001355. Uang Harian	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	100.00	0
	001356. Uang Penginapan	2,540,000	0	0	2,540,000	2,540,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000725. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0B Penyusunan LAKIP Satuan Kerja	127,829,000	0	127,788,576	0	127,788,576	99.97 %	40,424
521211 Belanja Bahan	12,776,000	0	12,756,800	0	12,756,800	99.85 %	19,200
000726. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000727. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	1,990,000	0	1,989,000	0	1,989,000	99.95 %	1,000
000728. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	2,061,000	0	2,060,600	0	2,060,600	99.98 %	400
000837. Konsumsi Kudapan	630,000	0	612,200	0	612,200	97.17 %	17,800
000885. Seminar Kit	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0
000886. Spanduk	495,000	0	495,000	0	495,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,380,000	0	19,361,500	0	19,361,500	99.90 %	18,500
000736. Uang Harian	5,340,000	0	5,330,000	0	5,330,000	99.81 %	10,000
000737. Uang Penginapan Gol III	950,000	0	950,000	0	950,000	100.00	0
000738. Tiket Pesawat	3,280,000	0	3,280,000	0	3,280,000	100.00	0
000766. Transportasi Darat	2,660,000	0	2,659,000	0	2,659,000	99.96 %	1,000
000888. Uang Harian	6,660,000	0	6,660,000	0	6,660,000	100.00	0
000895. Transport Darat	490,000	0	482,500	0	482,500	98.47 %	7,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
000896. Uang Transport Darat Peserta	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	85,173,000	0	85,170,276	0	85,170,276	100.00	2,724
000781. Paket Meeting Fullboard	59,400,000	0	59,400,000	0	59,400,000	100.00	0
000841. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000842. Uang Harian Fullboard	520,000	0	520,000	0	520,000	100.00	0
000843. Tiket Pesawat	6,772,000	0	6,771,276	0	6,771,276	99.99 %	724
000844. Transportasi Darat	356,000	0	356,000	0	356,000	100.00	0
000845. Penginapan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000847. Uang Harian	5,180,000	0	5,180,000	0	5,180,000	100.00	0
000848. Uang Harian Fullboard	910,000	0	910,000	0	910,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000849. Penginapan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000850. Transportasi Darat	675,000	0	673,000	0	673,000	99.70 %	2,000
000852. Uang Harian	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
000853. Uang Harian Fullboard	780,000	0	780,000	0	780,000	100.00	0
052 Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan	2,884,000	0	2,882,670	0	2,882,670	99.95 %	1,330
052.0A Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan	2,884,000	0	2,882,670	0	2,882,670	99.95 %	1,330
521211 Belanja Bahan	2,884,000	0	2,882,670	0	2,882,670	99.95 %	1,330
000743. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	1,052,000	0	1,051,170	0	1,051,170	99.92 %	830
001015. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	1,832,000	0	1,831,500	0	1,831,500	99.97 %	500
053 Manajemen Risiko	46,687,000	0	46,683,340	0	46,683,340	99.99 %	3,660
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	46,687,000	0	46,683,340	0	46,683,340	99.99 %	3,660
521211 Belanja Bahan	6,429,000	0	6,428,800	0	6,428,800	100.00	200
000746. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	1,519,000	0	1,519,000	0	1,519,000	100.00	0
000747. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	975,000	0	975,000	0	975,000	100.00	0
000748. Penggandaan, Penjilidan, dan Pembuatan Laporan	91,000	0	90,800	0	90,800	99.78 %	200
000750. Konsumsi Kudapan	3,680,000	0	3,680,000	0	3,680,000	100.00	0
000938. Spanduk	164,000	0	164,000	0	164,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000751. Honor Narasumber Eselon III BPKP Prov. Jateng	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,358,000	0	30,354,540	0	30,354,540	99.99 %	3,460
000753. Uang Penginapan	9,120,000	0	9,120,000	0	9,120,000	100.00	0
000754. Transport Darat	1,064,000	0	1,061,000	0	1,061,000	99.72 %	3,000
000764. Uang Harian	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000	100.00	0
000940. Uang Harian	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	100.00	0
000941. Uang Penginapan Gol III	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000942. Tiket Kereta Jakarta - Purwokerto	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000943. Taksi Jakarta	784,000	0	783,540	0	783,540	99.94 %	460
000950. Uang Penginapan Gol IV	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
000765. Transport Dalam Kota Sosialisasi Pengendalian Manajemen Risiko	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	693,770,000	0	561,153,448	116,934,055	678,087,503	97.74 %	15,682,497
051 Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan	547,122,000	0	472,660,397	73,492,140	546,152,537	99.82 %	969,463
051.0A Penyusunan Laporan Keuangan	547,122,000	0	472,660,397	73,492,140	546,152,537	99.82 %	969,463
521211 Belanja Bahan	65,893,000	0	62,698,805	3,076,920	65,775,725	99.82 %	117,275
000645. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,080,000	0	999,555	3,076,920	4,076,475	99.91 %	3,525
000646. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	1,085,000	0	971,250	0	971,250	89.52 %	113,750
000648. Seminar Kit	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000	100.00	0
000649. Konsumsi Makan	13,420,000	0	13,420,000	0	13,420,000	100.00	0
000650. Konsumsi Kudapan	7,808,000	0	7,808,000	0	7,808,000	100.00	0
000951. Spanduk	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	100.00	0
000651. Narasumber Eselon III ke bawah Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Tingkat Kanwil (KPKNL, DJPB)	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141,233,000	0	69,968,512	70,415,220	140,383,732	99.40 %	849,268
000654. Tiket Pesawat	15,808,000	0	15,806,292	0	15,806,292	99.99 %	1,708
000655. Taksi Jakarta	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000656. Taksi Semarang	492,000	0	463,000	0	463,000	94.11 %	29,000
000664. Uang Harian	5,330,000	0	0	5,330,000	5,330,000	100.00	0
000665. Uang Penginapan Gol III	1,840,000	0	1,836,110	0	1,836,110	99.79 %	3,890
000668. Uang Harian Pendamping Eselon I	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000669. Uang Penginapan Gol III Pendamping Eselon I	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000671. Taksi Jakarta Pendamping Eselon I	558,000	0	556,000	0	556,000	99.64 %	2,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000675. Uang Penginapan Gol III	2,750,000	0	0	2,744,000	2,744,000	99.78 %	6,000
	000676. Uang Harian	29,230,000	0	3,580,000	25,650,000	29,230,000	100.00	0
	000677. Uang Penginapan Gol III	27,240,000	0	0	26,440,000	26,440,000	97.06 %	800,000
	000678. Transport Darat	5,672,000	0	1,912,000	3,758,010	5,670,010	99.96 %	1,990
	000680. Tiket Pesawat	7,860,000	0	1,836,110	6,020,740	7,856,850	99.96 %	3,150
	000681. Taksi Jakarta	183,000	0	0	182,470	182,470	99.71 %	530
	000682. Taksi Semarang	290,000	0	0	290,000	290,000	100.00	0
	000684. Uang Harian	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
	000685. Uang Penginapan Gol III	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0
	000798. Uang Harian	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	100.00	0
	000799. Uang Harian	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
	000953. Uang Harian	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000	100.00	0
	000954. Uang Penginapan Gol III	10,976,000	0	10,976,000	0	10,976,000	100.00	0
	000955. Transport Darat	3,939,000	0	3,938,500	0	3,938,500	99.99 %	500
	000956. Taksi	675,000	0	674,500	0	674,500	99.93 %	500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
	000688. Transport Narasumber Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Kanwil	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
	000690. Transport Dalam Kota Koordinasi ke UPT Kota Semarang dan Dinas Terkait	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	294,036,000	0	294,036,000	0	294,036,000	100.00	0
	000957. Paket Meeting Fullboard	230,076,000	0	230,076,000	0	230,076,000	100.00	0
	000958. Uang Harian Fullboard	63,960,000	0	63,960,000	0	63,960,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,860,000	0	7,857,080	0	7,857,080	99.96 %	2,920
	000801. Uang Harian Fullboard	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
	000994. Uang Harian Fullboard	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	001010. Uang Harian	860,000	0	860,000	0	860,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001011. Tiket Pesawat	2,200,000	0	2,198,080	0	2,198,080	99.91 %	1,920
001012. Transport Darat	720,000	0	719,000	0	719,000	99.86 %	1,000
052 Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan	146,648,000	0	88,493,051	43,441,915	131,934,966	89.97 %	14,713,034
052.0A Pengelolaan Perbendaharaan	146,648,000	0	88,493,051	43,441,915	131,934,966	89.97 %	14,713,034
521211 Belanja Bahan	33,088,000	0	17,487,000	12,171,915	29,658,915	89.64 %	3,429,085
000700. Konsumsi Kudapan	3,312,000	0	2,349,500	960,000	3,309,500	99.92 %	2,500
000701. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	1,436,000	0	0	1,430,790	1,430,790	99.64 %	5,210
000704. Konsumsi Makan	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.00	0
000705. Konsumsi Kudapan	4,160,000	0	4,137,500	0	4,137,500	99.46 %	22,500
000707. Bahan Pendukung Kegiatan (Bahan Komputer)	5,000,000	0	0	4,981,125	4,981,125	99.62 %	18,875
001358. Konsumsi Kudapan	6,400,000	0	0	4,800,000	4,800,000	75.00 %	1,600,000
001414. Konsumsi Makan	1,210,000	0	0	0	0	0.00 %	1,210,000
001415. Konsumsi Kudapan	570,000	0	0	0	0	0.00 %	570,000
522141 Belanja Sewa	750,000	0	0	750,000	750,000	100.00	0
001033. Sewa Dekorasi Panggung	750,000	0	0	750,000	750,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000709. Narasumber Eselon III ke bawah (DJPb)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90,760,000	0	65,456,051	15,520,000	80,976,051	89.22 %	9,783,949
000712. Uang Harian	1,850,000	0	0	1,850,000	1,850,000	100.00	0
000715. Transport Darat	1,848,000	0	0	1,848,000	1,848,000	100.00	0
000718. Uang Harian	42,180,000	0	30,710,000	6,910,000	37,620,000	89.19 %	4,560,000
000803. Uang Harian	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	100.00	0
000804. Uang Penginapan	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
000805. Tiket Pesawat	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000806. Tiket Kereta	1,082,000	0	1,082,000	0	1,082,000	100.00	0
000807. Transport Darat	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000808. Taksi Surabaya	500,000	0	494,351	0	494,351	98.87 %	5,649
000881. Uang Harian	860,000	0	860,000	0	860,000	100.00	0
000882. Uang Harian Fullboard	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000883. Transport Darat Bogor PP	462,000	0	462,000	0	462,000	100.00	0
000884. Tiket Pesawat	2,918,000	0	2,916,200	0	2,916,200	99.94 %	1,800
000908. Uang Penginapan Gol III	17,000,000	0	10,225,000	3,300,000	13,525,000	79.56 %	3,475,000
000909. Transport Darat	7,000,000	0	3,646,500	1,612,000	5,258,500	75.12 %	1,741,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,450,000	0	1,950,000	15,000,000	16,950,000	91.87 %	1,500,000
000719. Transport Dalam Kota Peserta dan Panitia Kegiatan Sosialisasi IKPA	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000720. Transport Dalam Kota Rekonsiliasi Pengelolaan Perbendaharaan ke KPPN dan DJPb	600,000	0	450,000	150,000	600,000	100.00	0
001362. Transport Dalam Kota Peserta dan Panitia Kegiatan Pra Rekon	16,350,000	0	0	14,850,000	14,850,000	90.83 %	1,500,000
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	742,388,000	0	538,297,446	190,359,848	728,657,294	98.15 %	13,730,706
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	468,089,000	0	287,839,413	170,370,348	458,209,761	97.89 %	9,879,239
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	468,089,000	0	287,839,413	170,370,348	458,209,761	97.89 %	9,879,239
521211 Belanja Bahan	76,555,000	0	37,328,000	37,849,020	75,177,020	98.20 %	1,377,980
000554. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,715,000	0	510,000	4,198,020	4,708,020	99.85 %	6,980
000555. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	3,270,000	0	1,500,000	1,700,000	3,200,000	97.86 %	70,000
000556. Spanduk	15,796,000	0	900,000	13,716,000	14,616,000	92.53 %	1,180,000
000557. Konsumsi Makan	41,910,000	0	26,125,000	15,675,000	41,800,000	99.74 %	110,000
000558. Konsumsi Kudapan	10,864,000	0	8,293,000	2,560,000	10,853,000	99.90 %	11,000
522141 Belanja Sewa	201,500,000	0	171,500,000	30,000,000	201,500,000	100.00	0
001259. AC Standing Ruang CAT	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000	100.00	0
001260. Genset Silent 30 kva	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
001261. Genset Silent 80 kva	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	100.00	0
001262. Sound Mic Wireless	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	001364. Videotron	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	100.00	0
	001263. Narasumber Eselon III ke bawah (KemenpanRB, Media dan Motivator)	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	128,284,000	0	75,261,413	48,453,300	123,714,713	96.44 %	4,569,287
	000560. Transport Darat	3,840,000	0	3,835,300	0	3,835,300	99.88 %	4,700
	000562. Uang Harian	23,680,000	0	8,510,000	14,440,000	22,950,000	96.92 %	730,000
	000563. Uang Penginapan Gol III	5,400,000	0	2,200,000	3,200,000	5,400,000	100.00	0
	000564. Transport Darat	5,550,000	0	2,421,000	3,061,000	5,482,000	98.77 %	68,000
	000566. Uang Harian	10,360,000	0	10,360,000	0	10,360,000	100.00	0
	000567. Uang Penginapan Gol III	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	100.00	0
	000568. Transport Darat	1,070,000	0	1,069,500	0	1,069,500	99.95 %	500
	000569. Uang Harian	25,440,000	0	12,440,000	11,710,000	24,150,000	94.93 %	1,290,000
	000570. Uang Penginapan Gol III	21,900,000	0	8,967,083	11,960,000	20,927,083	95.56 %	972,917
	000571. Tiket Pesawat	7,500,000	0	4,266,530	3,233,400	7,499,930	100.00	70
	000572. Taksi Jakarta	1,040,000	0	32,000	742,900	774,900	74.51 %	265,100
	000573. Taksi Semarang	1,344,000	0	0	106,000	106,000	7.89 %	1,238,000
	000575. Uang Harian	16,650,000	0	16,650,000	0	16,650,000	100.00	0
	000576. Uang Penginapan Gol III	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	0	3,750,000	900,000	4,650,000	96.88 %	150,000
	000577. Transport Dalam Kota	4,800,000	0	3,750,000	900,000	4,650,000	96.88 %	150,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51,550,000	0	0	47,768,028	47,768,028	92.66 %	3,781,972
	001266. Uang Harian	7,400,000	0	0	6,660,000	6,660,000	90.00 %	740,000
	001267. Uang Harian Fullday	950,000	0	0	855,000	855,000	90.00 %	95,000
	001268. Uang Penginapan	7,200,000	0	0	6,621,028	6,621,028	91.96 %	578,972
	001269. Transport Darat	2,000,000	0	0	632,000	632,000	31.60 %	1,368,000
	001276. Uang Penginapan Narasumber	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001281. Paket Meeting Fullday	33,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000	100.00	0
052 Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	127,406,000	0	119,559,258	4,632,500	124,191,758	97.48 %	3,214,242
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	127,406,000	0	119,559,258	4,632,500	124,191,758	97.48 %	3,214,242
521211 Belanja Bahan	38,672,000	0	38,664,510	0	38,664,510	99.98 %	7,490
000578. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,076,000	0	4,075,810	0	4,075,810	100.00	190
000579. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	6,364,000	0	6,363,700	0	6,363,700	100.00	300
000580. Spanduk	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000581. Konsumsi Makan	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	100.00	0
000582. Konsumsi Kudapan	6,432,000	0	6,425,000	0	6,425,000	99.89 %	7,000
522151 Belanja Jasa Profesi	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0
000583. Honor Narasumber Eselon III BPKP Prov. Jateng	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65,784,000	0	57,944,748	4,632,500	62,577,248	95.13 %	3,206,752
000585. Uang Harian Narasumber	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000586. Uang Penginapan Narasumber	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000587. Transport Darat Narasumber	404,000	0	400,348	0	400,348	99.10 %	3,652
000589. Uang Harian	33,300,000	0	30,100,000	2,220,000	32,320,000	97.06 %	980,000
000590. Uang Penginapan Gol III	20,400,000	0	18,230,000	770,000	19,000,000	93.14 %	1,400,000
000591. Transport Darat	8,400,000	0	5,934,400	1,642,500	7,576,900	90.20 %	823,100
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
000592. Transport Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
053 Pembentukan Satker WBK/WBBM	83,877,000	0	80,019,235	3,850,000	83,869,235	99.99 %	7,765
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	83,877,000	0	80,019,235	3,850,000	83,869,235	99.99 %	7,765
521211 Belanja Bahan	61,995,000	0	58,141,235	3,850,000	61,991,235	99.99 %	3,765
000594. Spanduk	3,850,000	0	0	3,850,000	3,850,000	100.00	0
000595. Konsumsi Makan	22,275,000	0	22,275,000	0	22,275,000	100.00	0
000596. Konsumsi Kudapan	9,603,000	0	9,600,400	0	9,600,400	99.97 %	2,600

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000597. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,998,000	0	4,997,865	0	4,997,865	100.00	135
000600. Konsumsi Makan	6,875,000	0	6,875,000	0	6,875,000	100.00	0
000601. Konsumsi Kudapan	2,224,000	0	2,223,500	0	2,223,500	99.98 %	500
000603. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	4,970,000	0	4,969,470	0	4,969,470	99.99 %	530
000604. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
000980. Perlengkapan Desk Evaluasi	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,882,000	0	21,878,000	0	21,878,000	99.98 %	4,000
000608. Transport Darat	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000	100.00	0
000609. Uang Harian	7,950,000	0	7,950,000	0	7,950,000	100.00	0
000610. Uang Penginapan Gol III	4,384,000	0	4,380,000	0	4,380,000	99.91 %	4,000
000611. Tiket Pesawat	1,779,000	0	1,779,000	0	1,779,000	100.00	0
000615. Uang Harian	5,180,000	0	5,180,000	0	5,180,000	100.00	0
000616. Uang Penginapan GOl III	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
054 Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	38,166,000	0	26,029,540	11,507,000	37,536,540	98.35 %	629,460
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	38,166,000	0	26,029,540	11,507,000	37,536,540	98.35 %	629,460
521211 Belanja Bahan	14,136,000	0	14,109,570	0	14,109,570	99.81 %	26,430
000617. Bahan Pendukung Kegiatan (ATK)	5,000,000	0	4,999,440	0	4,999,440	99.99 %	560
000618. Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan	2,091,000	0	2,090,130	0	2,090,130	99.96 %	870
000620. Konsumsi Makan	5,445,000	0	5,420,000	0	5,420,000	99.54 %	25,000
000621. Konsumsi Kudapan	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	100.00	0
000622. Narasumber Eselon Ill ke bawah (Polda/Ombudsman)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000982. Moderator	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,730,000	0	7,619,970	11,507,000	19,126,970	96.94 %	603,030
000624. Uang Harian	5,920,000	0	0	5,920,000	5,920,000	100.00	0
000625. Uang Penginapan	4,950,000	0	0	4,390,000	4,390,000	88.69 %	560,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000626. Transport Darat	1,240,000	0	0	1,197,000	1,197,000	96.53 %	43,000
000984. Uang Harian Narasumber	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
000985. Uang Penginapan Narasumbe	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000	100.00	0
000986. Tiket Pesawat	2,680,000	0	2,679,970	0	2,679,970	100.00	30
055 Pembangunan Budaya Anti Korupsi	24,850,000	0	24,850,000	0	24,850,000	100.00	0
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	24,850,000	0	24,850,000	0	24,850,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	24,850,000	0	24,850,000	0	24,850,000	100.00	0
000631. Konsumsi Makan	19,250,000	0	19,250,000	0	19,250,000	100.00	0
000632. Konsumsi Kudapan	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**4,811,600,000**	**0**	**4,321,368,142**	**472,911,778**	**4,794,279,920**	**99.64 %**	**17,320,080**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4,811,600,000	0	4,321,368,142	472,911,778	4,794,279,920	99.64 %	17,320,080
BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,811,600,000	0	4,321,368,142	472,911,778	4,794,279,920	99.64 %	17,320,080
AEA Koordinasi	533,894,000	0	472,818,695	58,480,352	531,299,047	99.51 %	2,594,953
AEA.001 Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	533,894,000	0	472,818,695	58,480,352	531,299,047	99.51 %	2,594,953
051 Koordinasi dengan instansi terkait	306,792,000	0	265,140,494	40,328,832	305,469,326	99.57 %	1,322,674
051.0A Peningkatan Manfaat Layanan AHU melalui Koordinasi dengan Instansi Terkait	306,792,000	0	265,140,494	40,328,832	305,469,326	99.57 %	1,322,674
521211 Belanja Bahan	1,762,000	0	1,762,000	0	1,762,000	100.00	0
000536. Kudapan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000537. Kudapan	562,000	0	562,000	0	562,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	305,030,000	0	263,378,494	40,328,832	303,707,326	99.57 %	1,322,674
000007. Uang Transport	39,864,000	0	32,498,482	6,899,500	39,397,982	98.83 %	466,018
000008. Uang Harian	154,760,000	0	143,930,000	10,824,000	154,754,000	100.00	6,000
000009. Biaya Penginapan Eselon II	26,022,000	0	25,138,000	884,000	26,022,000	100.00	0
000010. Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV	5,724,000	0	4,242,117	1,340,000	5,582,117	97.52 %	141,883
000011. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	54,292,000	0	45,834,895	7,822,654	53,657,549	98.83 %	634,451
000012. Uang Representasi Eselon II	5,100,000	0	4,500,000	600,000	5,100,000	100.00	0
000514. Uang Harian	7,282,000	0	7,235,000	0	7,235,000	99.35 %	47,000
000556. Tiket	3,420,000	0	0	3,394,000	3,394,000	99.24 %	26,000
000557. Uang Harian	4,100,000	0	0	4,100,000	4,100,000	100.00	0
000558. Biaya Penginapan ES.II	2,266,000	0	0	2,264,678	2,264,678	99.94 %	1,322
000559. Biaya Penginapan ES.III/Gol IV	950,000	0	0	950,000	950,000	100.00	0
000560. Biaya Penginapan ES.IV/Gol III	950,000	0	0	950,000	950,000	100.00	0
000561. Uang Representasi Eselon II	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
052 Koordinasi dengan unit pusat	227,102,000	0	207,678,201	18,151,520	225,829,721	99.44 %	1,272,279

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A Peningkatan Layanan AHU melalui Koordinasi dengan Ditjen AHU	227,102,000	0	207,678,201	18,151,520	225,829,721	99.44 %	1,272,279
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227,102,000	0	207,678,201	18,151,520	225,829,721	99.44 %	1,272,279
000014. Tiket	75,286,000	0	69,823,732	5,462,200	75,285,932	100.00	68
000015. Tiket	5,010,000	0	5,009,109	0	5,009,109	99.98 %	891
000016. Taksi Semarang PP	168,000	0	142,460	0	142,460	84.80 %	25,540
000017. Taksi Jakarta PP	972,000	0	970,540	0	970,540	99.85 %	1,460
000018. Uang Harian	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	100.00	0
000020. Biaya Penginapan Eselon II	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000022. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000	100.00	0
000024. Biaya Taksi Semarang PP	940,000	0	570,860	78,040	648,900	69.03 %	291,100
000025. Biaya Taksi Jakarta PP	4,608,000	0	3,333,900	401,280	3,735,180	81.06 %	872,820
000026. Uang Harian	70,200,000	0	65,350,000	4,770,000	70,120,000	99.89 %	80,000
000027. Biaya Penginapan Eselon II	16,716,000	0	13,955,600	2,760,000	16,715,600	100.00	400
000028. Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV	9,230,000	0	9,230,000	0	9,230,000	100.00	0
000029. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	33,580,000	0	29,200,000	4,380,000	33,580,000	100.00	0
000030. Uang Representasi Eselon II	3,750,000	0	3,450,000	300,000	3,750,000	100.00	0
BAH Pelayanan Publik Lainnya	1,847,243,000	0	1,757,749,837	83,063,876	1,840,813,713	99.65 %	6,429,287
BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1,847,243,000	0	1,757,749,837	83,063,876	1,840,813,713	99.65 %	6,429,287
051 Layanan kewarganegaraan	52,219,000	0	38,344,500	13,652,000	51,996,500	99.57 %	222,500
051.0A Pengambilan Sumpah Kewarganegaran	20,600,000	0	13,641,500	6,752,000	20,393,500	99.00 %	206,500
521211 Belanja Bahan	14,600,000	0	9,241,500	5,152,000	14,393,500	98.59 %	206,500
000039. Makan	11,000,000	0	6,891,500	4,000,000	10,891,500	99.01 %	108,500
000040. Kudapan	3,600,000	0	2,350,000	1,152,000	3,502,000	97.28 %	98,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	6,000,000	0	4,400,000	1,600,000	6,000,000	100.00	0
000044. Rohaniawan	6,000,000	0	4,400,000	1,600,000	6,000,000	100.00	0
051.0B Verifikasi Data Kewarganegaraan	31,619,000	0	24,703,000	6,900,000	31,603,000	99.95 %	16,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	6,011,000	0	6,003,000	0	6,003,000	99.87 %	8,000
000047. Makan	4,650,000	0	4,648,000	0	4,648,000	99.96 %	2,000
000048. Kudapan	1,361,000	0	1,355,000	0	1,355,000	99.56 %	6,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	25,608,000	0	18,700,000	6,900,000	25,600,000	99.97 %	8,000
000052. Ketua	800,000	0	0	800,000	800,000	100.00	0
000053. Wakil Ketua	700,000	0	0	700,000	700,000	100.00	0
000054. Anggota	24,108,000	0	18,700,000	5,400,000	24,100,000	99.97 %	8,000
052 Pelantikan PPNS	10,700,000	0	10,662,500	0	10,662,500	99.65 %	37,500
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	10,700,000	0	10,662,500	0	10,662,500	99.65 %	37,500
521211 Belanja Bahan	10,700,000	0	10,662,500	0	10,662,500	99.65 %	37,500
000063. Makan	8,140,000	0	8,102,500	0	8,102,500	99.54 %	37,500
000064. Kudapan	2,560,000	0	2,560,000	0	2,560,000	100.00	0
053 Pelantikan Notaris	27,354,000	0	27,353,090	0	27,353,090	100.00	910
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	27,354,000	0	27,353,090	0	27,353,090	100.00	910
521211 Belanja Bahan	24,554,000	0	24,553,090	0	24,553,090	100.00	910
000071. Makan	13,650,000	0	13,650,000	0	13,650,000	100.00	0
000072. Kudapan	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000074. ATK	5,000,000	0	4,999,440	0	4,999,440	99.99 %	560
000075. Komputer Suplies	1,904,000	0	1,903,650	0	1,903,650	99.98 %	350
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
000076. Rohaniawan	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
054 Layanan AHU lainnya	188,244,000	0	170,094,517	12,543,500	182,638,017	97.02 %	5,605,983
054.0A Layanan AHU Lainnya	110,594,000	0	92,972,517	12,243,500	105,216,017	95.14 %	5,377,983
521211 Belanja Bahan	24,900,000	0	24,900,000	0	24,900,000	100.00	0
000475. Seminar Kit	24,900,000	0	24,900,000	0	24,900,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85,694,000	0	68,072,517	12,243,500	80,316,017	93.72 %	5,377,983

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000079. Uang Transport	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0
000080. Uang Harian	39,105,000	0	35,920,000	3,184,500	39,104,500	100.00	500
000081. Biaya Penginapan Eselon II	3,929,000	0	3,929,000	0	3,929,000	100.00	0
000082. Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV	4,150,000	0	3,550,000	600,000	4,150,000	100.00	0
000083. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	9,616,000	0	9,601,017	0	9,601,017	99.84 %	14,983
000084. Uang Representasi Eselon II	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000516. Uang Harian	6,920,000	0	6,920,000	0	6,920,000	100.00	0
000517. Biaya Penginapan Eselpn IV/ Gol III	770,000	0	770,000	0	770,000	100.00	0
000518. Uang Transport	1,033,000	0	1,032,500	0	1,032,500	99.95 %	500
000565. Transport	3,471,000	0	0	419,000	419,000	12.07 %	3,052,000
000566. Uang Harian	5,550,000	0	0	4,440,000	4,440,000	80.00 %	1,110,000
000567. Biaya Penginapan ES IV/GOL III	4,800,000	0	0	3,600,000	3,600,000	75.00 %	1,200,000
054.0B Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	77,650,000	0	77,122,000	300,000	77,422,000	99.71 %	228,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,550,000	0	72,472,000	0	72,472,000	99.89 %	78,000
000091. Uang Transport	7,680,000	0	7,671,500	0	7,671,500	99.89 %	8,500
000092. Uang Harian	43,680,000	0	43,660,000	0	43,660,000	99.95 %	20,000
000093. Biaya Penginapan Eselon II	1,900,000	0	1,874,000	0	1,874,000	98.63 %	26,000
000095. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	18,240,000	0	18,216,500	0	18,216,500	99.87 %	23,500
000096. Uang Representasi Eselon II	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,100,000	0	4,650,000	300,000	4,950,000	97.06 %	150,000
000415. Transport Lokal	5,100,000	0	4,650,000	300,000	4,950,000	97.06 %	150,000
055 Migrasi data layanan AHU	130,087,000	0	126,030,110	4,000,000	130,030,110	99.96 %	56,890
055.0A Migrasi Data Layanan AHU	130,087,000	0	126,030,110	4,000,000	130,030,110	99.96 %	56,890
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	25,056,000	0	21,000,000	4,000,000	25,000,000	99.78 %	56,000
000098. Anggota	25,056,000	0	21,000,000	4,000,000	25,000,000	99.78 %	56,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	101,544,000	0	101,544,000	0	101,544,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000101. Digitalisasi Arsip Fidusia	101,544,000	0	101,544,000	0	101,544,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,487,000	0	3,486,110	0	3,486,110	99.97 %	890
	000501. Tiket	2,057,000	0	2,056,110	0	2,056,110	99.96 %	890
	000503. Biaya Tiket Jakarta PP	90,000	0	90,000	0	90,000	100.00	0
	000504. Uang Harian.	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
	000505. Biaya Penginapan Es.IV/Gol. III	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
056	Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/workshop/pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah	838,124,000	0	837,984,075	0	837,984,075	99.98 %	139,925
056.0A	Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Workshop Layanan AHU di Wilayah	453,884,000	0	453,834,000	0	453,834,000	99.99 %	50,000
521211	Belanja Bahan	97,943,000	0	97,913,980	0	97,913,980	99.97 %	29,020
	000103. Seminar Kit	68,168,000	0	68,160,000	0	68,160,000	99.99 %	8,000
	000104. Penggandaan Bahan Rapat	16,920,000	0	16,900,000	0	16,900,000	99.88 %	20,000
	000105. Spanduk	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000106. ATK	6,492,000	0	6,491,280	0	6,491,280	99.99 %	720
	000107. Komputer Suplies	3,963,000	0	3,962,700	0	3,962,700	99.99 %	300
522151	Belanja Jasa Profesi	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000	100.00	0
	000110. Narasumber Eksternal Eselon III Ke bawah	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	100.00	0
	000111. Moderator Ekternal	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	341,241,000	0	341,220,020	0	341,220,020	99.99 %	20,980
	000114. Uang Harian Narasumber	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	100.00	0
	000115. Biaya Penginapan Eselon II / III	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
	000117. Transport	957,000	0	956,704	0	956,704	99.97 %	296
	000118. Uang Harian Narasumber	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
	000120. Biaya Penginapan Eselon II / III	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000	100.00	0
	000122. Transport	2,560,000	0	2,539,440	0	2,539,440	99.20 %	20,560
	000123. Uang Harian Fullboard	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000124. Tiket	6,570,000	0	6,569,876	0	6,569,876	100.00	124
	000125. Uang Harian Panitia	28,490,000	0	28,490,000	0	28,490,000	100.00	0
	000126. Biaya Penginapan Panitia	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000	100.00	0
	000128. Transport Lokal Peserta	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	100.00	0
	000129. Uang Harian Peserta	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000	100.00	0
	000131. Transport	702,000	0	702,000	0	702,000	100.00	0
	000132. Uang Harian Moderator	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
	000133. Uang Harian Fullboard	475,000	0	475,000	0	475,000	100.00	0
	000134. Biaya Penginapan Moderator	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
	000135. Taksi Jakarta PP	699,000	0	699,000	0	699,000	100.00	0
	000137. Paket Meeting Fullboard/Fullday	123,930,000	0	123,930,000	0	123,930,000	100.00	0
	000138. Uang Harian Narasumber	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
	000140. Biaya Penginapan Eselon II / III	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000143. Transport	543,000	0	543,000	0	543,000	100.00	0
056.0B	Sosialisasi Pengisian Data PMPJ dan Kebijakan Pemilik Manfaat	215,769,000	0	215,756,875	0	215,756,875	99.99 %	12,125
521211	Belanja Bahan	46,748,000	0	46,737,875	0	46,737,875	99.98 %	10,125
	000145. Seminar Kit	33,750,000	0	33,750,000	0	33,750,000	100.00	0
	000146. Penggandaan Bahan Rapat	7,500,000	0	7,490,000	0	7,490,000	99.87 %	10,000
	000147. Spanduk	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000148. ATK	4,898,000	0	4,897,875	0	4,897,875	100.00	125
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000150. Narasumber Eksternal Eselon II	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	167,221,000	0	167,219,000	0	167,219,000	100.00	2,000
	000155. Biaya Penginapan Eselon II / III	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000158. Uang Harian Narasumber	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
	000159. Uang Harian Fullboard	95,000	0	95,000	0	95,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000160. Biaya Penginapan Eselon II / III	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	100.00	0
	000162. Transport	3,299,000	0	3,298,000	0	3,298,000	99.97 %	1,000
	000163. Uang Harian Panitia	14,800,000	0	14,800,000	0	14,800,000	100.00	0
	000164. Uang Harian Fullboard	1,901,000	0	1,900,000	0	1,900,000	99.95 %	1,000
	000165. Tiket	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
	000166. Biaya Penginapan Panitia	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	100.00	0
	000168. Transport Lokal Peserta	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000169. Uang Harian Peserta	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	100.00	0
	000172. Uang Harian Moderator	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
	000173. Uang Harian Fullboard	95,000	0	95,000	0	95,000	100.00	0
	000174. Biaya Penginapan Moderator	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000176. Taksi Jakarta PP	361,000	0	361,000	0	361,000	100.00	0
	000177. Paket Meeting Fullboard/Fullday	60,210,000	0	60,210,000	0	60,210,000	100.00	0
	000178. Uang Harian Narasumber	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
	000179. Uang Harian Fullboard	190,000	0	190,000	0	190,000	100.00	0
	000180. Biaya Penginapan Eselon II / III	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
056.0D	Sosialisasi Pendaftaran Perseroan Perseorangan	168,471,000	0	168,393,200	0	168,393,200	99.95 %	77,800
521211	Belanja Bahan	33,158,000	0	33,157,500	0	33,157,500	100.00	500
	000223. Seminar Kit	25,500,000	0	25,500,000	0	25,500,000	100.00	0
	000224. Penggandaan Bahan Rapat	7,058,000	0	7,057,500	0	7,057,500	99.99 %	500
	000225. Spanduk	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	100.00	0
	000228. Narasumber Ekternal Eselon II	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000229. Narasumber Ekternal Eselon III kebawah	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	000230. Moderator Ekternal	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	129,213,000	0	129,135,700	0	129,135,700	99.94 %	77,300

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000233. Biaya Penginapan Eselon II / III	2,800,000	0	2,778,700	0	2,778,700	99.24 %	21,300
000236. Uang Harian Narasumber	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
000237. Uang Harian Fullboard	95,000	0	95,000	0	95,000	100.00	0
000240. Transport	3,600,000	0	3,589,000	0	3,589,000	99.69 %	11,000
000241. Uang Harian Fullboard	1,521,000	0	1,520,000	0	1,520,000	99.93 %	1,000
000242. Uang Harian Panitia	11,064,000	0	11,060,000	0	11,060,000	99.96 %	4,000
000243. Tiket	4,364,000	0	4,364,000	0	4,364,000	100.00	0
000244. Biaya Penginapan Panitia	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
000246. Transport Lokal Peserta	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
000250. Uang Harian Moderator	370,000	0	370,000	0	370,000	100.00	0
000251. Biaya Penginapan Moderator	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000253. Paket Meeting Fullboard/Fullday	45,090,000	0	45,050,000	0	45,050,000	99.91 %	40,000
000254. Taksi Jakarta PP	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000255. Uang Harian Narasumber	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000257. Biaya Penginapan Eselon II / III	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000259. Transport	499,000	0	499,000	0	499,000	100.00	0
000260. Uang Harian Narasumber	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
000414. Uang Harian Peserta	14,250,000	0	14,250,000	0	14,250,000	100.00	0
057 Publikasi, Pameran dan Helpdesk	600,515,000	0	547,281,045	52,868,376	600,149,421	99.94 %	365,579
057.0A Publikasi dan Pameran	413,795,000	0	393,246,261	20,440,000	413,686,261	99.97 %	108,739
521211 Belanja Bahan	29,776,000	0	29,759,655	0	29,759,655	99.95 %	16,345
000261. Leaflet/Poster/Spanduk/Brosur/dsb	24,776,000	0	24,775,200	0	24,775,200	100.00	800
000263. ATK	2,000,000	0	1,995,225	0	1,995,225	99.76 %	4,775
000264. Komputer Supplies	3,000,000	0	2,989,230	0	2,989,230	99.64 %	10,770
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	122,640,000	0	102,200,000	20,440,000	122,640,000	100.00	0
000265. Biaya Siaran pada Media Elektronik	122,640,000	0	102,200,000	20,440,000	122,640,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	187,535,000	0	187,534,500	0	187,534,500	100.00	500
000269. Jasa Penyelenggaraan Publikasi berupa Pameran Solo, Karanganyar dan Semarang	37,407,000	0	37,407,000	0	37,407,000	100.00	0
000416. Jasa Penyelenggaraan Publikasi berupa Pameran EXPO HDKD	150,128,000	0	150,127,500	0	150,127,500	100.00	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,694,000	0	67,602,106	0	67,602,106	99.86 %	91,894
000270. Uang Transport	11,232,000	0	11,228,422	0	11,228,422	99.97 %	3,578
000271. Uang Harian	35,798,000	0	35,750,000	0	35,750,000	99.87 %	48,000
000272. Biaya Penginapan Eselon II	7,764,000	0	7,761,000	0	7,761,000	99.96 %	3,000
000273. Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
000274. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	9,000,000	0	8,962,684	0	8,962,684	99.59 %	37,316
000275. Uang Representasi Eselon II	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,150,000	0	6,150,000	0	6,150,000	100.00	0
000413. Transport Lokal	6,150,000	0	6,150,000	0	6,150,000	100.00	0
057.0B Helpdesk Layanan AHU	186,720,000	0	154,034,784	32,428,376	186,463,160	99.86 %	256,840
522191 Belanja Jasa Lainnya	186,720,000	0	154,034,784	32,428,376	186,463,160	99.86 %	256,840
000276. Jasa Penyelenggaraan Helpdesk Layanan AHU	186,720,000	0	154,034,784	32,428,376	186,463,160	99.86 %	256,840
BCB Perkara Hukum Lembaga	58,434,000	0	7,621,000	48,789,620	56,410,620	96.54 %	2,023,380
BCB.001 Penanganan perkara pada kantor wilayah	58,434,000	0	7,621,000	48,789,620	56,410,620	96.54 %	2,023,380
051 Advokasi Perkara Layanan AHU di Wilayah	58,434,000	0	7,621,000	48,789,620	56,410,620	96.54 %	2,023,380
051.0A Koordinasi Instansi terkait	58,434,000	0	7,621,000	48,789,620	56,410,620	96.54 %	2,023,380
521211 Belanja Bahan	7,062,000	0	0	7,049,610	7,049,610	99.82 %	12,390
000520. ATK dan Komputer Supplies	7,062,000	0	0	7,049,610	7,049,610	99.82 %	12,390
522141 Belanja Sewa	4,005,000	0	4,000,000	0	4,000,000	99.88 %	5,000
000277. Sewa Kendaraan Insidentil	4,005,000	0	4,000,000	0	4,000,000	99.88 %	5,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,697,000	0	3,621,000	40,070,010	43,691,010	95.61 %	2,005,990
000279. Uang Transport	661,000	0	661,000	0	661,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000280. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
	000539. Tiket	9,600,000	0	0	9,560,290	9,560,290	99.59 %	39,710
	000540. Taksi Semarang PP	360,000	0	0	289,720	289,720	80.48 %	70,280
	000541. Taksi Jakarta PP	1,536,000	0	0	0	0	0.00 %	1,536,000
	000542. Uang Harian	15,900,000	0	0	15,900,000	15,900,000	100.00	0
	000544. Biaya Penginapan ES.III/Gol.IV	3,800,000	0	0	3,800,000	3,800,000	100.00	0
	000545. Biaya Penginapan ES.IV/Gol.III	10,880,000	0	0	10,520,000	10,520,000	96.69 %	360,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,670,000	0	0	1,670,000	1,670,000	100.00	0
	000568. Uang Harian Fullboard	540,000	0	0	540,000	540,000	100.00	0
	000569. Uang Harian	530,000	0	0	530,000	530,000	100.00	0
	000570. Uang Representasi	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2,372,029,000	0	2,083,178,610	282,577,930	2,365,756,540	99.74 %	6,272,460
BIC.001	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	2,372,029,000	0	2,083,178,610	282,577,930	2,365,756,540	99.74 %	6,272,460
051	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan kenotariatan pada MPW	808,378,000	0	751,691,880	50,577,930	802,269,810	99.24 %	6,108,190
051.0A	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW	388,684,000	0	338,860,803	43,857,570	382,718,373	98.47 %	5,965,627
521211	Belanja Bahan	46,910,000	0	34,952,000	10,973,330	45,925,330	97.90 %	984,670
	000287. Makan	18,700,000	0	13,624,800	4,500,000	18,124,800	96.92 %	575,200
	000288. Kudapan	5,440,000	0	3,577,200	1,475,000	5,052,200	92.87 %	387,800
	000289. ATK dan Komputer Supplies	5,020,000	0	0	4,998,330	4,998,330	99.57 %	21,670
	000487. Makan	13,750,000	0	13,750,000	0	13,750,000	100.00	0
	000488. Kudapan	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	106,044,000	0	88,750,000	17,250,000	106,000,000	99.96 %	44,000
	000292. Ketua	9,000,000	0	7,500,000	1,500,000	9,000,000	100.00	0
	000293. Wakil Ketua	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00	0
	000294. Anggota	59,544,000	0	50,150,000	9,350,000	59,500,000	99.93 %	44,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000296. Sekretaris	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
	000297. Anggota	9,900,000	0	8,100,000	1,800,000	9,900,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	33,370,000	0	33,369,375	0	33,369,375	100.00	625
	000485. Jasa Penyelenggaraan Publikasi berupa Pameran EXPO HDKD	33,370,000	0	33,369,375	0	33,369,375	100.00	625
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	202,360,000	0	181,789,428	15,634,240	197,423,668	97.56 %	4,936,332
	000301. Taksi Jakarta PP	1,200,000	0	691,580	0	691,580	57.63 %	508,420
	000302. Uang Harian	23,277,000	0	17,678,250	4,770,000	22,448,250	96.44 %	828,750
	000304. Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV	7,936,000	0	7,774,000	100,000	7,874,000	99.22 %	62,000
	000305. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	9,100,000	0	5,840,000	3,248,000	9,088,000	99.87 %	12,000
	000306. Uang Representasi Eselon II	1,350,000	0	300,000	150,000	450,000	33.33 %	900,000
	000307. Transport	8,400,000	0	5,633,031	2,766,320	8,399,351	99.99 %	649
	000308. Uang Harian	16,480,000	0	15,740,000	740,000	16,480,000	100.00	0
	000309. Biaya Penginapan Eselon II	3,810,000	0	3,800,000	0	3,800,000	99.74 %	10,000
	000310. Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV	4,580,000	0	4,579,050	0	4,579,050	99.98 %	950
	000311. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	2,000,000	0	1,952,000	0	1,952,000	97.60 %	48,000
	000312. Uang Representasi Eselon II	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
	000314. Tiket	25,000,000	0	18,808,990	3,859,920	22,668,910	90.68 %	2,331,090
	000477. Tiket	13,796,000	0	13,791,527	0	13,791,527	99.97 %	4,473
	000478. Biaya Taksi Semarang PP	360,000	0	360,000	0	360,000	100.00	0
	000479. Biaya Taksi Jakarta PP	233,000	0	232,500	0	232,500	99.79 %	500
	000480. Uang Harian	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000	100.00	0
	000481. Biaya Penginapan ES.II	3,892,000	0	3,892,000	0	3,892,000	100.00	0
	000482. Biaya Penginapan ES.III/Gol.IV	2,696,000	0	2,696,000	0	2,696,000	100.00	0
	000483. Biaya Penginapan ES.IV/Gol.III	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	100.00	0
	000484. Uang Representasi Eselon II	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
	000508. Uang Transport	5,640,000	0	5,610,500	0	5,610,500	99.48 %	29,500

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000509. Uang Harian	33,300,000	0	33,300,000	0	33,300,000	100.00	0
000510. Biaya Penginapan Eselon II	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	100.00	0
000511. Biaya Penginapan Eselon III/Gol IV	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	100.00	0
000512. Biaya Penginapan Eselon IV/Gol.III	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	100.00	0
000564. Taksi Semarang	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
051.0B Pelantikan MPW	187,000	0	187,000	0	187,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187,000	0	187,000	0	187,000	100.00	0
000322. Transport	187,000	0	187,000	0	187,000	100.00	0
051.0C Rakor MPW dan MPD	218,185,000	0	218,057,367	0	218,057,367	99.94 %	127,633
521211 Belanja Bahan	42,160,000	0	42,160,000	0	42,160,000	100.00	0
000329. Seminar Kit	33,750,000	0	33,750,000	0	33,750,000	100.00	0
000330. Penggandaan Bahan Materi dan Dokumentasi	7,810,000	0	7,810,000	0	7,810,000	100.00	0
000331. Spanduk	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	100.00	0
000334. Narasumber Eksternal Eselon II	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000335. Narasumber Eksternal Eselon III Ke bawah	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000336. Moderator Eksternal	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	169,525,000	0	169,397,367	0	169,397,367	99.92 %	127,633
000339. Uang Harian Narasumber	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000340. Biaya Penginapan Eselon II / III	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
000343. Uang Harian Narasumber	1,080,000	0	1,040,000	0	1,040,000	96.30 %	40,000
000344. Uang Harian Fullboard	95,000	0	95,000	0	95,000	100.00	0
000347. Transport	4,275,000	0	4,272,120	0	4,272,120	99.93 %	2,880
000348. Uang Harian Panitia	14,800,000	0	14,800,000	0	14,800,000	100.00	0
000349. Tiket	3,920,000	0	3,905,247	0	3,905,247	99.62 %	14,753
000350. Uang Harian Fullboard	1,950,000	0	1,900,000	0	1,900,000	97.44 %	50,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000351. Biaya Penginapan Panitia	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	100.00	0
	000353. Transport Lokal Peserta	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000354. Uang Harian Peserta	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	100.00	0
	000356. Transport	152,000	0	152,000	0	152,000	100.00	0
	000360. Taksi Jakarta PP	93,000	0	93,000	0	93,000	100.00	0
	000362. Paket Meeting Fullboard/Fullday	60,500,000	0	60,480,000	0	60,480,000	99.97 %	20,000
	000365. Biaya Penginapan Eselon II / III	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
051.0D	FGD Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan pada MPD	94,601,000	0	94,586,710	0	94,586,710	99.98 %	14,290
521211	Belanja Bahan	30,014,000	0	30,000,210	0	30,000,210	99.95 %	13,790
	000418. Seminar Kit	20,562,000	0	20,550,000	0	20,550,000	99.94 %	12,000
	000419. Penggandaan Bahan Rapat	5,264,000	0	5,263,200	0	5,263,200	99.98 %	800
	000420. Spanduk	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000421. ATK	2,988,000	0	2,987,010	0	2,987,010	99.97 %	990
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64,587,000	0	64,586,500	0	64,586,500	100.00	500
	000451. Uang Harian Narasumber	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
	000452. Uang Harian Halfday	190,000	0	190,000	0	190,000	100.00	0
	000453. Biaya Penginapan Eselon II/III	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000454. Biaya Penginapan Eselon IV	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000456. Transport	957,000	0	956,500	0	956,500	99.95 %	500
	000457. Uang Harian Halfday	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	100.00	0
	000458. Uang Harian Panitia	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000	100.00	0
	000459. Biaya Penginapan Panitia	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
	000461. Transport Lokal Peserta	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
	000464. Uang Harian Halfday	190,000	0	190,000	0	190,000	100.00	0
	000465. Uang Harian Moderator	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
	000466. Biaya Penginapan Moderator	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000468. Paket Meeting Halfday	27,740,000	0	27,740,000	0	27,740,000	100.00	0
051.0E	Pelantikan Notaris dan Sosialisasi PMPJ Bagi Notaris	106,721,000	0	100,000,000	6,720,360	106,720,360	100.00	640
521211	Belanja Bahan	3,571,000	0	0	3,570,360	3,570,360	99.98 %	640
	000523. ATK	2,971,000	0	0	2,970,360	2,970,360	99.98 %	640
	000524. Spanduk	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	103,150,000	0	100,000,000	3,150,000	103,150,000	100.00	0
	000534. Transport	3,150,000	0	0	3,150,000	3,150,000	100.00	0
	000535. Paket Meeting Fullday/Fullboard	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
052	Pembinaan, Pengawasan dan penanganan permasalahan kenotariatan pada MPD	1,529,251,000	0	1,302,486,730	226,600,000	1,529,086,730	99.99 %	164,270
052.0A	Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPD	1,522,151,000	0	1,295,386,730	226,600,000	1,521,986,730	99.99 %	164,270
521211	Belanja Bahan	16,544,000	0	16,500,000	0	16,500,000	99.73 %	44,000
	000443. Spanduk	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000	100.00	0
	000444. Makan	605,000	0	600,000	0	600,000	99.17 %	5,000
	000445. Kudapan	339,000	0	300,000	0	300,000	88.50 %	39,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,359,132,000	0	1,132,450,000	226,600,000	1,359,050,000	99.99 %	82,000
	000374. Ketua	153,000,000	0	128,500,000	24,500,000	153,000,000	100.00	0
	000375. Wakil Ketua	275,094,000	0	228,150,000	46,900,000	275,050,000	99.98 %	44,000
	000376. Anggota	744,400,000	0	620,400,000	124,000,000	744,400,000	100.00	0
	000378. Sekretaris	93,319,000	0	77,700,000	15,600,000	93,300,000	99.98 %	19,000
	000379. Anggota	93,319,000	0	77,700,000	15,600,000	93,300,000	99.98 %	19,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	83,200,000	0	83,196,230	0	83,196,230	100.00	3,770
	000446. Biaya Papan Plang MPD	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	100.00	0
	000447. ATK	18,200,000	0	18,196,230	0	18,196,230	99.98 %	3,770
522191	Belanja Jasa Lainnya	40,255,000	0	40,237,500	0	40,237,500	99.96 %	17,500
	000448. Jasa Peresmian Tempat Sekretariat MPD	40,255,000	0	40,237,500	0	40,237,500	99.96 %	17,500

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Satuan Kerja : 408743 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,020,000	0	23,003,000	0	23,003,000	99.93 %	17,000
000381. Transport	2,880,000	0	2,864,000	0	2,864,000	99.44 %	16,000
000382. Uang Harian	13,320,000	0	13,320,000	0	13,320,000	100.00	0
000384. Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
000385. Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III	2,620,000	0	2,619,000	0	2,619,000	99.96 %	1,000
052.0B Pelantikan MPD	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	100.00	0
000388. Makan	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	100.00	0
000389. Kudapan	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
053 Penanganan permasalahan kenotariatan pada MKNW	34,400,000	0	29,000,000	5,400,000	34,400,000	100.00	0
053.0A Penanganan permasalahan kenotariatan pada MKNW	34,400,000	0	29,000,000	5,400,000	34,400,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	34,400,000	0	29,000,000	5,400,000	34,400,000	100.00	0
000402. Anggota	20,000,000	0	17,000,000	3,000,000	20,000,000	100.00	0
000404. Sekretaris	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
000405. Anggota	10,800,000	0	9,000,000	1,800,000	10,800,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**6,151,171,000**	**0**	**5,349,191,527**	**771,507,211**	**6,120,698,738**	**99.50 %**	**30,472,262**
BB Program Pembentukan Regulasi	166,601,000	0	139,844,705	26,264,000	166,108,705	99.70 %	492,295
BB.5256 Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	166,601,000	0	139,844,705	26,264,000	166,108,705	99.70 %	492,295
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	37,289,000	0	32,658,780	4,579,000	37,237,780	99.86 %	51,220
ABD.001 Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	37,289,000	0	32,658,780	4,579,000	37,237,780	99.86 %	51,220
051 Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum	6,760,000	0	6,734,130	0	6,734,130	99.62 %	25,870
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	6,760,000	0	6,734,130	0	6,734,130	99.62 %	25,870
521211 Belanja Bahan	6,310,000	0	6,284,130	0	6,284,130	99.59 %	25,870
000001. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	160,000	0	157,500	0	157,500	98.44 %	2,500
000002. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	550,000	0	540,000	0	540,000	98.18 %	10,000
000004. PEMBELIAN ATK	5,600,000	0	5,586,630	0	5,586,630	99.76 %	13,370
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000005. BIAYA TRANSPORT LOKAL	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum	25,470,000	0	21,314,650	4,130,000	25,444,650	99.90 %	25,350
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	25,470,000	0	21,314,650	4,130,000	25,444,650	99.90 %	25,350
521211 Belanja Bahan	11,200,000	0	11,191,070	0	11,191,070	99.92 %	8,930
000006. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000007. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	100.00	0
000009. BIAYA PEMBELIAN ATK	5,600,000	0	5,591,070	0	5,591,070	99.84 %	8,930
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000010. HONOR KETUA POKJA (EKSTERNAL)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000011. HONOR ANGGOTA POKJA (EKSTERNAL)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,120,000	0	6,973,580	4,130,000	11,103,580	99.85 %	16,420
000014. TIKET PP	2,070,000	0	2,070,000	0	2,070,000	100.00	0
000015. BIAYA UANG HARIAN	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000016. BIAYA UANG TAKSI JAKARTA	300,000	0	283,580	0	283,580	94.53 %	16,420
000018. BIAYA PENGINAPAN SETARA ESELON III	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000271. BIAYA UANG HARIAN	3,330,000	0	0	3,330,000	3,330,000	100.00	0
000272. BIAYA TRANSPORTASI	800,000	0	0	800,000	800,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000019. BIAYA TRANSPORT LOKAL	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
053 Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	5,059,000	0	4,610,000	449,000	5,059,000	100.00	0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	5,059,000	0	4,610,000	449,000	5,059,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,159,000	0	710,000	449,000	1,159,000	100.00	0
000020. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	160,000	0	160,000	0	160,000	100.00	0
000021. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	550,000	0	550,000	0	550,000	100.00	0
000273. BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	449,000	0	0	449,000	449,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000023. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL SETARA ESELON III	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000024. BIAYA TRANSPORT LOKAL	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	129,312,000	0	107,185,925	21,685,000	128,870,925	99.66 %	441,075
BDB.001 Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	129,312,000	0	107,185,925	21,685,000	128,870,925	99.66 %	441,075
051 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	50,265,000	0	49,279,500	705,000	49,984,500	99.44 %	280,500
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	50,265,000	0	49,279,500	705,000	49,984,500	99.44 %	280,500
521211 Belanja Bahan	3,505,000	0	2,791,500	705,000	3,496,500	99.76 %	8,500
000025. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	800,000	0	791,500	0	791,500	98.94 %	8,500
000026. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000027. BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	705,000	0	0	705,000	705,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,760,000	0	46,488,000	0	46,488,000	99.42 %	272,000
000029. BIAYA UANG HARIAN	23,680,000	0	23,680,000	0	23,680,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000030. BIAYA PENGINAPAN GOL III / IV	15,400,000	0	15,128,000	0	15,128,000	98.23 %	272,000
000031. BIAYA TRANSPORTASI	7,680,000	0	7,680,000	0	7,680,000	100.00	0
052 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah	69,120,000	0	47,991,475	20,980,000	68,971,475	99.79 %	148,525
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	69,120,000	0	47,991,475	20,980,000	68,971,475	99.79 %	148,525
521211 Belanja Bahan	8,440,000	0	5,644,400	2,740,000	8,384,400	99.34 %	55,600
000032. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,920,000	0	1,546,900	320,000	1,866,900	97.23 %	53,100
000033. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	3,600,000	0	2,800,000	800,000	3,600,000	100.00	0
000035. BIAYA PEMBELIAN ATK	1,300,000	0	1,297,500	0	1,297,500	99.81 %	2,500
000274. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	480,000	0	0	480,000	480,000	100.00	0
000275. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	1,140,000	0	0	1,140,000	1,140,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0
000244. Honor Anggota Tim (Eksternal)	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
000245. Honor Narasumber Eksternal	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,680,000	0	42,347,075	9,240,000	51,587,075	99.82 %	92,925
000037. BIAYA UANG HARIAN	19,980,000	0	17,020,000	2,960,000	19,980,000	100.00	0
000038. BIAYA PENGINAPAN GOL III / IV	8,460,000	0	8,450,775	0	8,450,775	99.89 %	9,225
000039. BIAYA TRANSPORTASI	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000	100.00	0
000240. UANG HARIAN	5,920,000	0	5,920,000	0	5,920,000	100.00	0
000241. BIAYA PENGINAPAN ESELON IV/GOL III	3,600,000	0	3,516,300	0	3,516,300	97.68 %	83,700
000243. BIAYA TRANSPORTASI	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	100.00	0
000276. BIAYA UANG HARIAN	1,480,000	0	0	1,480,000	1,480,000	100.00	0
000277. BIAYA PENGINAPAN	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	100.00	0
053 Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan/atau Naskah Akademik	9,927,000	0	9,914,950	0	9,914,950	99.88 %	12,050
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	9,927,000	0	9,914,950	0	9,914,950	99.88 %	12,050
521211 Belanja Bahan	3,655,000	0	3,654,220	0	3,654,220	99.98 %	780

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000040. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	100.00	0
000041. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000044. BIAYA PEMBELIAN ATK	1,335,000	0	1,334,220	0	1,334,220	99.94 %	780
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000045. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL SETARA ESELON III	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,472,000	0	4,460,730	0	4,460,730	99.75 %	11,270
000046. TIKET PP NARASUMBER	2,132,000	0	2,129,730	0	2,129,730	99.89 %	2,270
000047. BIAYA UANG HARIAN	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
000048. BIAYA UANG TAKSI JAKARTA	30,000	0	21,000	0	21,000	70.00 %	9,000
000050. BIAYA PENGINAPAN SETARA ESELON III	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5,984,570,000	0	5,209,346,822	745,243,211	5,954,590,033	99.50 %	29,979,967
BF.4841 Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	5,984,570,000	0	5,209,346,822	745,243,211	5,954,590,033	99.50 %	29,979,967
BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	187,500,000	0	141,167,556	44,458,200	185,625,756	99.00 %	1,874,244
BDD.001 Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	111,541,000	0	96,332,896	14,713,500	111,046,396	99.56 %	494,604
051 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	85,936,000	0	71,209,896	14,263,500	85,473,396	99.46 %	462,604
051.0A TEMU SADAR HUKUM PADA KELOMPOK KADARKUM	25,304,000	0	25,296,885	0	25,296,885	99.97 %	7,115
521211 Belanja Bahan	19,448,000	0	19,446,885	0	19,446,885	99.99 %	1,115
000098. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
000099. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000	100.00	0
000101. BIAYA PEMBUATAN SPANDUK	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000102. BIAYA PEMBELIAN ATK	4,433,000	0	4,432,785	0	4,432,785	100.00	215
000103. BAHAN KOMPUTER	2,565,000	0	2,564,100	0	2,564,100	99.96 %	900
000217. BIAYA PEMBELIAN SEMINAT KIT	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,256,000	0	5,250,000	0	5,250,000	99.89 %	6,000
000218. Biaya Uang Harian	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000219. Biaya Transport Darat	816,000	0	810,000	0	810,000	99.26 %	6,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000104. BIAYA TRANSPORT LOKAL	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
051.0B	PEMBINAAN/PEMBENTUKAN KELOMPOK KADARKUM/DESA/KELURAHAN BINAAN	52,150,000	0	38,513,830	13,213,500	51,727,330	99.19 %	422,670
521211	Belanja Bahan	11,380,000	0	9,867,620	1,498,500	11,366,120	99.88 %	13,880
	000105. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000106. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	980,000	0	980,000	0	980,000	100.00	0
	000107. BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	3,000,000	0	2,989,620	0	2,989,620	99.65 %	10,380
	000230. BIAYA PEMBUATAN/ PERCETAKAN POSTER/LEAFLET/BANNER	5,000,000	0	3,498,000	1,498,500	4,996,500	99.93 %	3,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,770,000	0	20,846,210	10,815,000	31,661,210	99.66 %	108,790
	000221. Biaya Uang Harian	14,800,000	0	6,660,000	8,040,000	14,700,000	99.32 %	100,000
	000223. Biaya Transportasi Darat	5,800,000	0	3,025,000	2,775,000	5,800,000	100.00	0
	000225. Biaya Uang Harian	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	100.00	0
	000226. Biaya Penginapan Gol III/IV	1,370,000	0	1,370,000	0	1,370,000	100.00	0
	000227. Tiket PP	1,450,000	0	1,446,210	0	1,446,210	99.74 %	3,790
	000228. Biaya Uang Taksi Jakarta	180,000	0	176,000	0	176,000	97.78 %	4,000
	000234. Biaya Uang Harian	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000	100.00	0
	000235. Biaya Penginapan	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	100.00	0
	000236. Biaya Transport Darat SMG- JKT PP	1,960,000	0	1,959,000	0	1,959,000	99.95 %	1,000
	000237. Uang Representatif Eselon II	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0	7,800,000	900,000	8,700,000	96.67 %	300,000
	000112. BIAYA TRANSPORT LOKAL	9,000,000	0	7,800,000	900,000	8,700,000	96.67 %	300,000
051.0C	Pembinaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	8,482,000	0	7,399,181	1,050,000	8,449,181	99.61 %	32,819
521211	Belanja Bahan	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	100.00	0
	000262. Biaya Konsumsi Snack Rapat	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,432,000	0	7,399,181	0	7,399,181	99.56 %	32,819
000264. Tiket Pesawat Jakarta- Semarang	3,848,000	0	3,847,480	0	3,847,480	99.99 %	520
000265. Biaya Penginapan Eselon I	3,584,000	0	3,551,701	0	3,551,701	99.10 %	32,299
052 Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	6,330,000	0	6,301,500	0	6,301,500	99.55 %	28,500
052.0A VERIFIKASI USULAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	6,330,000	0	6,301,500	0	6,301,500	99.55 %	28,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,180,000	0	3,151,500	0	3,151,500	99.10 %	28,500
000212. Biaya Uang Harian	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
000213. Biaya Transport Darat	960,000	0	931,500	0	931,500	97.03 %	28,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
000116. BIAYA TRANSPORT LOKAL	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
053 Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	19,275,000	0	18,821,500	450,000	19,271,500	99.98 %	3,500
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,275,000	0	18,821,500	450,000	19,271,500	99.98 %	3,500
521211 Belanja Bahan	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
000126. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000127. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,275,000	0	9,271,500	0	9,271,500	99.96 %	3,500
000214. Biaya Uang Harian	5,180,000	0	5,180,000	0	5,180,000	100.00	0
000215. Biaya Penginapan Gol III/IV	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000	100.00	0
000216. Biaya Transport Darat	1,575,000	0	1,571,500	0	1,571,500	99.78 %	3,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000	0	7,050,000	450,000	7,500,000	100.00	0
000128. BIAYA TRANSPORT LOKAL	7,500,000	0	7,050,000	450,000	7,500,000	100.00	0
BDD.002 Layanan Penyuluhan Hukum	75,959,000	0	44,834,660	29,744,700	74,579,360	98.18 %	1,379,640
051 Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum	10,910,000	0	10,884,660	0	10,884,660	99.77 %	25,340
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	10,910,000	0	10,884,660	0	10,884,660	99.77 %	25,340
521211 Belanja Bahan	10,910,000	0	10,884,660	0	10,884,660	99.77 %	25,340
000052. BAHAN KOMPUTER	650,000	0	632,700	0	632,700	97.34 %	17,300

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000055. BIAYA PEMBELIAN ATK	2,760,000	0	2,759,460	0	2,759,460	99.98 %	540
000056. BIAYA PEMBUATAN/PENCETAKAN POSTER/LEAFLET/BANNER	7,500,000	0	7,492,500	0	7,492,500	99.90 %	7,500
052 Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum	65,049,000	0	33,950,000	29,744,700	63,694,700	97.92 %	1,354,300
052.0A PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG	34,304,000	0	29,450,000	4,415,000	33,865,000	98.72 %	439,000
521211 Belanja Bahan	21,200,000	0	21,200,000	0	21,200,000	100.00	0
000060. BIAYA PEMBUATAN STAND/LAYOUT	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000062. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000064. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000065. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000231. BIAYA PEMBELIAN SEMINAR KIT	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000248. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	100.00	0
000249. PEMBUATAN SPANDUK	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000250. PEMBELIAN SEMINAR KIT	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
000251. BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000073. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL SETARA ESELON III	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,054,000	0	0	2,915,000	2,915,000	95.45 %	139,000
000266. Biaya Uang Harian	2,220,000	0	0	2,220,000	2,220,000	100.00	0
000267. Biaya Transport Darat	834,000	0	0	695,000	695,000	83.33 %	139,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,250,000	0	6,450,000	1,500,000	7,950,000	96.36 %	300,000
000077. BIAYA TRANSPORT LOKAL	5,100,000	0	3,300,000	1,500,000	4,800,000	94.12 %	300,000
000079. BIAYA TRANSPORT LOKAL	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
052.0B PENYULUHAN HUKUM TIDAK LANGSUNG	30,745,000	0	4,500,000	25,329,700	29,829,700	97.02 %	915,300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14,500,000	0	4,500,000	9,734,700	14,234,700	98.17 %	265,300
000083. BIAYA PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM DI TELEVISI	2,000,000	0	0	1,734,700	1,734,700	86.74 %	265,300

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000085. BIAYA PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM DI MEDIA DIGITAL	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
	000259. BIAYA PELAKSANAAN DIALOG INTERAKTIF DI TELEVISI	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	0	0	1,800,000	1,800,000	90.00 %	200,000
	000087. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL SETARA ESELON III	2,000,000	0	0	1,800,000	1,800,000	90.00 %	200,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,800,000	0	0	6,800,000	6,800,000	100.00	0
	000089. BIAYA PRODUKSI FILM	6,800,000	0	0	6,800,000	6,800,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,245,000	0	0	6,245,000	6,245,000	100.00	0
	000268. Biaya Uang Harian	5,550,000	0	0	5,550,000	5,550,000	100.00	0
	000269. Biaya Transport Darat	695,000	0	0	695,000	695,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	0	750,000	750,000	62.50 %	450,000
	000093. BIAYA TRANSPORT LOKAL KOORDINASI DAN KEGIATAN	1,200,000	0	0	750,000	750,000	62.50 %	450,000
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	140,144,000	0	109,009,100	27,798,861	136,807,961	97.62 %	3,336,039
BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	140,144,000	0	109,009,100	27,798,861	136,807,961	97.62 %	3,336,039
051	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah	75,424,000	0	72,346,970	3,046,950	75,393,920	99.96 %	30,080
051.0A	KOORDINASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TINGKAT DAERAH	56,692,000	0	53,615,640	3,046,950	56,662,590	99.95 %	29,410
521211	Belanja Bahan	56,692,000	0	53,615,640	3,046,950	56,662,590	99.95 %	29,410
	000129. BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	5,000,000	0	4,995,000	0	4,995,000	99.90 %	5,000
	000130. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
	000131. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000	100.00	0
	000133. BIAYA PENCETAKAN SPANDUK/BANNER/LEAFLET/POSTER	42,500,000	0	39,893,400	2,597,400	42,490,800	99.98 %	9,200
	000134. PEMBELIAN ATK	3,000,000	0	2,995,890	0	2,995,890	99.86 %	4,110
	000135. BAHAN KOMPUTER	2,442,000	0	1,981,350	449,550	2,430,900	99.55 %	11,100
051.0B	DISEMINASI PENJARINGAN DAN PENGINDENTIFIKASIAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2025 SD 2027	14,982,000	0	14,981,330	0	14,981,330	100.00	670
521211	Belanja Bahan	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000140. BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
	000141. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
	000142. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,582,000	0	4,581,330	0	4,581,330	99.99 %	670
	000144. TIKET PP	1,672,000	0	1,671,330	0	1,671,330	99.96 %	670
	000145. BIAYA PENGINAPAN SETARA ESELON III	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000146. BIAYA UANG HARIAN	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
051.0C	ASISTENSI IMPLEMENTASI STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000	100.00	0
	000150. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
	000151. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000	100.00	0
052	Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah	64,720,000	0	36,662,130	24,751,911	61,414,041	94.89 %	3,305,959
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN	64,720,000	0	36,662,130	24,751,911	61,414,041	94.89 %	3,305,959
521211	Belanja Bahan	13,090,000	0	2,978,130	9,933,911	12,912,041	98.64 %	177,959
	000152. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	3,000,000	0	0	2,947,000	2,947,000	98.23 %	53,000
	000153. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	4,200,000	0	0	4,091,031	4,091,031	97.41 %	108,969
	000154. BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
	000155. BIAYA PEMBELIAN ATK	3,000,000	0	1,995,780	1,002,330	2,998,110	99.94 %	1,890
	000156. BAHAN KOMPUTER	1,890,000	0	982,350	893,550	1,875,900	99.25 %	14,100
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
	000157. HONOR PANITIA PENGAWAS DAERAH DARI LUAR KANWIL	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,380,000	0	32,034,000	4,768,000	36,802,000	98.45 %	578,000
	000159. BIAYA UANG HARIAN	24,840,000	0	21,830,000	2,960,000	24,790,000	99.80 %	50,000
	000160. BIAYA PENGINAPAN GOL III/IV	7,920,000	0	6,105,000	1,330,000	7,435,000	93.88 %	485,000
	000161. BIAYA TRANSPORT	4,620,000	0	4,099,000	478,000	4,577,000	99.07 %	43,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,250,000	0	1,650,000	7,050,000	8,700,000	77.33 %	2,550,000
000162. BIAYA TRANSPORTASI LOKAL	11,250,000	0	1,650,000	7,050,000	8,700,000	77.33 %	2,550,000
BMA Data dan Informasi Publik	120,183,000	0	112,021,216	7,732,650	119,753,866	99.64 %	429,134
BMA.001 Fasilitasi JDIHN	73,183,000	0	67,074,836	5,720,220	72,795,056	99.47 %	387,944
051 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	51,578,000	0	50,832,428	723,720	51,556,148	99.96 %	21,852
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	51,578,000	0	50,832,428	723,720	51,556,148	99.96 %	21,852
521211 Belanja Bahan	19,645,000	0	18,912,400	723,720	19,636,120	99.95 %	8,880
000168. BIAYA KONSUMSI SNACK RAPAT	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000	100.00	0
000169. BIAYA KONSUMSI MAKAN RAPAT	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	100.00	0
000170. BIAYA SEMINAR KIT	12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	100.00	0
000172. BIAYA PEMBELIAN ATK	1,620,000	0	893,550	723,720	1,617,270	99.83 %	2,730
000173. BAHAN KOMPUTER	600,000	0	593,850	0	593,850	98.98 %	6,150
522151 Belanja Jasa Profesi	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000174. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL SETARA ESELON III	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,483,000	0	19,470,028	0	19,470,028	99.93 %	12,972
000176. TIKET PP	1,800,000	0	1,790,350	0	1,790,350	99.46 %	9,650
000177. BIAYA UANG HARIAN	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
000178. BIAYA PENGINAPAN SETARA ESELON III	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000232. BIAYA UANG REPRESENTATIF ESELON II	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000253. BIAYA UANG HARIAN	6,360,000	0	6,360,000	0	6,360,000	100.00	0
000254. BIAYA PENGINAPAN SETARA ESELON II	955,000	0	954,999	0	954,999	100.00	1
000255. BIAYA PENGINAPAN SETARA ESELON IV	3,372,000	0	3,369,999	0	3,369,999	99.94 %	2,001
000256. TIKET Semarang- Jakarta	505,000	0	505,000	0	505,000	100.00	0
000257. BIAYA UANG TAKSI JAKARTA	81,000	0	80,180	0	80,180	98.99 %	820
000258. BIAYA UANG REPRESENTATIF ESELON II	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000270. Biaya Transport Darat Semarang-Jakarta PP	1,440,000	0	1,439,500	0	1,439,500	99.97 %	500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000	100.00	0
000181. BIAYA TRANSPORT LOKAL	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000	100.00	0
052 Promosi, Penerbitan dan Kerja Sama JDIHN di wilayah	3,500,000	0	0	3,496,500	3,496,500	99.90 %	3,500
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,500,000	0	0	3,496,500	3,496,500	99.90 %	3,500
521211 Belanja Bahan	3,500,000	0	0	3,496,500	3,496,500	99.90 %	3,500
000183. PEMBUATAN BAHAN CETAKAN/LEAFLET/STIKER/POSTER/UMBUL/SPANDUK/LAINNYA UNTUK SOSIALISASI JDIH	3,500,000	0	0	3,496,500	3,496,500	99.90 %	3,500
053 Pengintegrasian JDIHN	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000199. BIAYA TRANSPORT LOKAL	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
054 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	17,805,000	0	16,242,408	1,500,000	17,742,408	99.65 %	62,592
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	17,805,000	0	16,242,408	1,500,000	17,742,408	99.65 %	62,592
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,705,000	0	15,642,408	0	15,642,408	99.60 %	62,592
000204. BIAYA UANG HARIAN	8,172,000	0	8,140,000	0	8,140,000	99.61 %	32,000
000205. BIAYA PENGINAPAN GOL III/IV	6,120,000	0	6,100,000	0	6,100,000	99.67 %	20,000
000206. BIAYA TRANSPORT DARAT	1,413,000	0	1,402,408	0	1,402,408	99.25 %	10,592
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	0	600,000	1,500,000	2,100,000	100.00	0
000207. BIAYA TRANSPORT LOKAL	2,100,000	0	600,000	1,500,000	2,100,000	100.00	0
BMA.002 Layanan Perpustakaan Hukum	47,000,000	0	44,946,380	2,012,430	46,958,810	99.91 %	41,190
051 Pengelolaan Perpustakaan Hukum	47,000,000	0	44,946,380	2,012,430	46,958,810	99.91 %	41,190
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	47,000,000	0	44,946,380	2,012,430	46,958,810	99.91 %	41,190
521211 Belanja Bahan	9,000,000	0	6,946,380	2,012,430	8,958,810	99.54 %	41,190
000163. BIAYA PEMBELIAN ATK	7,500,000	0	5,481,180	2,012,430	7,493,610	99.91 %	6,390
000164. BAHAN KOMPUTER	1,500,000	0	1,465,200	0	1,465,200	97.68 %	34,800

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
000166. BIAYA FUMIGASI DAN PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
536111 Belanja Modal Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000167. BIAYA PEMBELIAN BUKU-BUKU HUKUM	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	4,789,000,000	0	4,239,200,000	537,000,000	4,776,200,000	99.73 %	12,800,000
QBA.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	4,789,000,000	0	4,239,200,000	537,000,000	4,776,200,000	99.73 %	12,800,000
051 Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	4,788,000,000	0	4,239,200,000	536,000,000	4,775,200,000	99.73 %	12,800,000
051.0A Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	4,788,000,000	0	4,239,200,000	536,000,000	4,775,200,000	99.73 %	12,800,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	4,788,000,000	0	4,239,200,000	536,000,000	4,775,200,000	99.73 %	12,800,000
000208. Layanan Bantuan Hukum Litigasi	4,788,000,000	0	4,239,200,000	536,000,000	4,775,200,000	99.73 %	12,800,000
052 Upaya Hukum Luar Biasa	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
052.0A Tahap Peninjauan Kembali	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
000209. Layanan Bantuan Hukum Litigasi	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
QBC Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	747,743,000	0	607,948,950	128,253,500	736,202,450	98.46 %	11,540,550
QBC.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	747,743,000	0	607,948,950	128,253,500	736,202,450	98.46 %	11,540,550
051 Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar Pengadilan	741,743,000	0	605,148,950	127,753,500	732,902,450	98.81 %	8,840,550
051.0A Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara	741,743,000	0	605,148,950	127,753,500	732,902,450	98.81 %	8,840,550
522131 Belanja Jasa Konsultan	741,743,000	0	605,148,950	127,753,500	732,902,450	98.81 %	8,840,550
000210. Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	732,900,000	0	605,148,950	120,582,500	725,731,450	99.02 %	7,168,550
000261. Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	8,843,000	0	0	7,171,000	7,171,000	81.09 %	1,672,000
052 Konseling	6,000,000	0	2,800,000	500,000	3,300,000	55.00 %	2,700,000
052.0A Konsultasi Hukum	6,000,000	0	2,800,000	500,000	3,300,000	55.00 %	2,700,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	6,000,000	0	2,800,000	500,000	3,300,000	55.00 %	2,700,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Satuan Kerja : 408749 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000211. Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	6,000,000	0	2,800,000	500,000	3,300,000	55.00 %	2,700,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

Satuan Kerja : 408750 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**200,351,000**	**0**	**190,169,955**	**10,155,000**	**200,324,955**	**99.99 %**	**26,045**
WA Program Dukungan Manajemen	200,351,000	0	190,169,955	10,155,000	200,324,955	99.99 %	26,045
WA.5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	200,351,000	0	190,169,955	10,155,000	200,324,955	99.99 %	26,045
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	200,351,000	0	190,169,955	10,155,000	200,324,955	99.99 %	26,045
ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	178,873,000	0	168,694,675	10,155,000	178,849,675	99.99 %	23,325
051 Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	44,638,000	0	40,854,815	3,782,500	44,637,315	100.00	685
051.0B Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	44,638,000	0	40,854,815	3,782,500	44,637,315	100.00	685
521211 Belanja Bahan	2,278,000	0	2,277,815	0	2,277,815	99.99 %	185
000013. ATK dan Komputer Suplies	1,295,000	0	1,294,815	0	1,294,815	99.99 %	185
000014. Konsumsi Makan	370,000	0	370,000	0	370,000	100.00	0
000015. Konsumsi Kudapan	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000016. Penggandaan dan Penjilidan	463,000	0	463,000	0	463,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000017. Honorarium Narasumber Eksternal Eselon III ke bawah	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,160,000	0	34,377,000	3,782,500	38,159,500	100.00	500
000018. Transportasi Antar Kota/Kabupaten	2,760,000	0	2,257,500	502,500	2,760,000	100.00	0
000019. Uang Harian	16,280,000	0	14,060,000	2,220,000	16,280,000	100.00	0
000020. Biaya Penginapan Golongan III ke bawah	6,540,000	0	5,480,000	1,060,000	6,540,000	100.00	0
000062. Tiket	3,780,000	0	3,780,000	0	3,780,000	100.00	0
000063. Biaya Taksi Jakarta	130,000	0	129,500	0	129,500	99.62 %	500
000064. Uang Harian	4,770,000	0	4,770,000	0	4,770,000	100.00	0
000065. Biaya Penginapan Golongan III ke bawah	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000021. Transport Lokal Konsultasi dan Koordinasi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000022. Transport Lokal Peserta	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

Satuan Kerja : 408750 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052	Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan (SIPKUMHAM)	73,958,000	0	67,579,090	6,372,500	73,951,590	99.99 %	6,410
052.0A	Analisis kebijakan dengan pemanfaatan (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	73,958,000	0	67,579,090	6,372,500	73,951,590	99.99 %	6,410
521211	Belanja Bahan	2,247,000	0	2,246,290	0	2,246,290	99.97 %	710
	000023. ATK dan Komputer Suplies	1,487,000	0	1,486,290	0	1,486,290	99.95 %	710
	000025. Konsumsi Kudapan Rapat Persiapan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan (SIPKUMHAM)	240,000	0	240,000	0	240,000	100.00	0
	000026. Konsumsi Makan Rapat Pelaksanaan Penyusunan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan (SIPKUMHAM)	370,000	0	370,000	0	370,000	100.00	0
	000027. Konsumsi Kudapan Rapat Pelaksanaan Penyusunan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan (SIPKUMHAM)	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	5,400,000	1,800,000	7,200,000	100.00	0
	000031. Honorarium Narasumber Eksternal Eselon III ke bawah	7,200,000	0	5,400,000	1,800,000	7,200,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,711,000	0	58,132,800	4,572,500	62,705,300	99.99 %	5,700
	000033. Biaya Penginapan Golongan III ke bawah	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	100.00	0
	000035. Transportasi Antar Kota/Kabupaten	3,060,000	0	2,607,500	452,500	3,060,000	100.00	0
	000036. Uang Harian	26,640,000	0	24,420,000	2,220,000	26,640,000	100.00	0
	000037. Biaya Penginapan Golongan III ke bawah	16,490,000	0	14,590,000	1,900,000	16,490,000	100.00	0
	000039. Tiket	4,566,000	0	4,563,800	0	4,563,800	99.95 %	2,200
	000040. Biaya Taksi Jakarta	123,000	0	121,000	0	121,000	98.37 %	2,000
	000041. Biaya Taksi Semarang	272,000	0	270,500	0	270,500	99.45 %	1,500
	000042. Uang Harian	6,360,000	0	6,360,000	0	6,360,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000043. Transport Lokal Konsultasi dan Koordinasi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
053	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM	60,277,000	0	60,260,770	0	60,260,770	99.97 %	16,230
053.0A	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM)	60,277,000	0	60,260,770	0	60,260,770	99.97 %	16,230
521211	Belanja Bahan	1,547,000	0	1,545,270	0	1,545,270	99.89 %	1,730

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

Satuan Kerja : 408750 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000045. ATK dan Komputer Suplies	1,397,000	0	1,395,270	0	1,395,270	99.88 %	1,730
	000047. Konsumsi Kudapan	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58,730,000	0	58,715,500	0	58,715,500	99.98 %	14,500
	000050. Transportasi Antar Kota/Kabupaten	4,030,000	0	4,025,500	0	4,025,500	99.89 %	4,500
	000051. Uang Harian	28,860,000	0	28,860,000	0	28,860,000	100.00	0
	000052. Biaya Penginapan Eselon III ke bawah	14,760,000	0	14,750,000	0	14,750,000	99.93 %	10,000
	000071. Transportasi Antar Kota/Kabupaten	950,000	0	950,000	0	950,000	100.00	0
	000072. Uang Harian	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	100.00	0
	000073. Biaya Penginapan Golongan III ke Bawah	4,580,000	0	4,580,000	0	4,580,000	100.00	0
ABD.002	Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	21,478,000	0	21,475,280	0	21,475,280	99.99 %	2,720
051	Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	21,478,000	0	21,475,280	0	21,475,280	99.99 %	2,720
051.0A	Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	21,478,000	0	21,475,280	0	21,475,280	99.99 %	2,720
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	505,000	0	503,000	0	503,000	99.60 %	2,000
	000001. Biaya Pembelian Lisensi Aplikasi Video Teleconference (Zoom Meeting)	505,000	0	503,000	0	503,000	99.60 %	2,000
521211	Belanja Bahan	3,133,000	0	3,132,280	0	3,132,280	99.98 %	720
	000002. ATK dan Komputer Suplies	1,053,000	0	1,052,280	0	1,052,280	99.93 %	720
	000007. Konsumsi Makan Kegiatan Sosialisasi OPINI	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
	000009. Konsumsi Kudapan Kegiatan Sosialisasi OPINI	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
	000054. Doorprize untuk peserta Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	100.00	0
	000010. Honorarium Narasumber Eksternal Eselon III ke bawah	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	000011. Honorarium Moderator Eksternal	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,040,000	0	12,040,000	0	12,040,000	100.00	0
	000056. Tiket	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

Satuan Kerja : 408750 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000057. Biaya Taksi Jakarta	123,000	0	123,000	0	123,000	100.00	0
000058. Uang Harian	4,770,000	0	4,770,000	0	4,770,000	100.00	0
000059. Biaya Penginapan Golongan III ke bawah	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0
000067. Uang harian dalam rangka Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hasil Survei Online	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000068. Transport Antar Kota/Kabupaten dalam rangka Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hasil Survei Online	97,000	0	97,000	0	97,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**315,238,000**	**0**	**306,592,675**	**7,926,810**	**314,519,485**	**99.77 %**	**718,515**
BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM	315,238,000	0	306,592,675	7,926,810	314,519,485	99.77 %	718,515
BG.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	315,238,000	0	306,592,675	7,926,810	314,519,485	99.77 %	718,515
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	29,230,000	0	28,430,285	717,000	29,147,285	99.72 %	82,715
ABD.003 Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah	29,230,000	0	28,430,285	717,000	29,147,285	99.72 %	82,715
051 Persiapan Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah	7,641,000	0	7,638,335	0	7,638,335	99.97 %	2,665
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,641,000	0	7,638,335	0	7,638,335	99.97 %	2,665
521211 Belanja Bahan	1,497,000	0	1,496,835	0	1,496,835	99.99 %	165
000001. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,497,000	0	1,496,835	0	1,496,835	99.99 %	165
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,244,000	0	5,241,500	0	5,241,500	99.95 %	2,500
000156. UANG HARIAN	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
000157. PENGINAPAN	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
000158. TRANSPORT PETUGAS	384,000	0	381,500	0	381,500	99.35 %	2,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000006. TRANSPORT LOKAL	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Hasil Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah	18,523,000	0	17,726,450	717,000	18,443,450	99.57 %	79,550
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	18,523,000	0	17,726,450	717,000	18,443,450	99.57 %	79,550
521211 Belanja Bahan	2,276,000	0	2,268,450	0	2,268,450	99.67 %	7,550
000007. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,496,000	0	1,495,150	0	1,495,150	99.94 %	850
000011. KUDAPAN RAPAT	210,000	0	203,300	0	203,300	96.81 %	6,700
000012. MAKAN RAPAT	570,000	0	570,000	0	570,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
000013. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,447,000	0	11,958,000	417,000	12,375,000	99.42 %	72,000
000014. UANG HARIAN	6,660,000	0	6,290,000	370,000	6,660,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000159. PENGINAPAN	4,275,000	0	4,270,000	0	4,270,000	99.88 %	5,000
000160. TRANSPORT PETUGAS	1,512,000	0	1,398,000	47,000	1,445,000	95.57 %	67,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	300,000	300,000	600,000	100.00	0
000015. TRANSPORT LOKAL	600,000	0	300,000	300,000	600,000	100.00	0
053 Monev dan Pelaporan Hasil Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah	3,066,000	0	3,065,500	0	3,065,500	99.98 %	500
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,066,000	0	3,065,500	0	3,065,500	99.98 %	500
521211 Belanja Bahan	304,000	0	304,000	0	304,000	100.00	0
000018. PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN LAPORAN	304,000	0	304,000	0	304,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,762,000	0	2,761,500	0	2,761,500	99.98 %	500
000186. UANG HARIAN	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000	100.00	0
000187. PENGINAPAN	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000188. TRANSPORT PETUGAS	282,000	0	281,500	0	281,500	99.82 %	500
BAH Pelayanan Publik Lainnya	57,382,000	0	54,086,430	3,241,240	57,327,670	99.91 %	54,330
BAH.001 Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di wilayah	57,382,000	0	54,086,430	3,241,240	57,327,670	99.91 %	54,330
051 Persiapan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	6,393,000	0	6,387,890	0	6,387,890	99.92 %	5,110
051.0A PERSIAPAN FASILITASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI WILAYAH	6,393,000	0	6,387,890	0	6,387,890	99.92 %	5,110
521211 Belanja Bahan	1,500,000	0	1,497,390	0	1,497,390	99.83 %	2,610
000021. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,500,000	0	1,497,390	0	1,497,390	99.83 %	2,610
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,993,000	0	3,990,500	0	3,990,500	99.94 %	2,500
000161. UANG HARIAN	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
000162. PENGINAPAN	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000163. TRANSPORT PETUGAS	273,000	0	270,500	0	270,500	99.08 %	2,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000026. TRANSPORT LOKAL	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	48,848,000	0	47,098,540	1,705,000	48,803,540	99.91 %	44,460

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A	PELAKSANAAN FASILITASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI WILAYAH	38,031,000	0	37,990,260	0	37,990,260	99.89 %	40,740
521211	Belanja Bahan	2,481,000	0	2,480,070	0	2,480,070	99.96 %	930
	000027. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,485,000	0	1,484,070	0	1,484,070	99.94 %	930
	000029. PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	246,000	0	246,000	0	246,000	100.00	0
	000031. KUDAPAN RAPAT	210,000	0	210,000	0	210,000	100.00	0
	000032. MAKAN RAPAT	540,000	0	540,000	0	540,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000033. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,400,000	0	32,360,190	0	32,360,190	99.88 %	39,810
	000034. UANG HARIAN	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000	100.00	0
	000035. PENGINAPAN	9,900,000	0	9,878,690	0	9,878,690	99.78 %	21,310
	000036. TRANSPORT PETUGAS	4,000,000	0	3,981,500	0	3,981,500	99.54 %	18,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
	000037. TRANSPORT LOKAL	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
052.0B	RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN POS YANKOMAS	10,817,000	0	9,108,280	1,705,000	10,813,280	99.97 %	3,720
521211	Belanja Bahan	1,500,000	0	1,496,280	0	1,496,280	99.75 %	3,720
	000038. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,500,000	0	1,496,280	0	1,496,280	99.75 %	3,720
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,317,000	0	7,612,000	1,705,000	9,317,000	100.00	0
	000189. UANG HARIAN	5,180,000	0	4,440,000	740,000	5,180,000	100.00	0
	000190. PENGINAPAN	3,465,000	0	2,500,000	965,000	3,465,000	100.00	0
	000191. TRANSPORT PETUGAS	672,000	0	672,000	0	672,000	100.00	0
053	Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	2,141,000	0	600,000	1,536,240	2,136,240	99.78 %	4,760
053.0A	EVALUASI DAN PELAPORAN FASILITASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI WILAYAH	2,141,000	0	600,000	1,536,240	2,136,240	99.78 %	4,760
521211	Belanja Bahan	1,541,000	0	0	1,536,240	1,536,240	99.69 %	4,760
	000042. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,541,000	0	0	1,536,240	1,536,240	99.69 %	4,760

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000048. TRANSPORT LOKAL	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	149,270,000	0	145,016,950	3,698,570	148,715,520	99.63 %	554,480
BDB.002	Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	149,270,000	0	145,016,950	3,698,570	148,715,520	99.63 %	554,480
051	Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	36,552,000	0	36,255,655	0	36,255,655	99.19 %	296,345
051.0A	PERSIAPAN PEMBINAAN LEMBAGA PUBLIK BERBASIS HAM DI WILAYAH	6,192,000	0	6,190,335	0	6,190,335	99.97 %	1,665
521211	Belanja Bahan	1,497,000	0	1,496,835	0	1,496,835	99.99 %	165
	000049. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,497,000	0	1,496,835	0	1,496,835	99.99 %	165
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,795,000	0	3,793,500	0	3,793,500	99.96 %	1,500
	000164. UANG HARIAN	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
	000165. PENGINAPAN	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
	000166. TRANSPORT PETUGAS	225,000	0	223,500	0	223,500	99.33 %	1,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
	000054. TRANSPORT LOKAL	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
051.0B	PELAKSANAAN PEMBINAAN LEMBAGA PUBLIK BERBASIS HAM DI WILAYAH	23,938,000	0	23,923,390	0	23,923,390	99.94 %	14,610
521211	Belanja Bahan	2,293,000	0	2,292,390	0	2,292,390	99.97 %	610
	000055. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,498,000	0	1,497,390	0	1,497,390	99.96 %	610
	000058. KUDAPAN RAPAT	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00	0
	000059. MAKAN RAPAT	570,000	0	570,000	0	570,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000060. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,845,000	0	19,831,000	0	19,831,000	99.93 %	14,000
	000061. UANG HARIAN	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000	100.00	0
	000062. PENGINAPAN	7,470,000	0	7,470,000	0	7,470,000	100.00	0
	000063. TRANSPORT ANTAR KAB/KOTA	1,275,000	0	1,261,000	0	1,261,000	98.90 %	14,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0C	MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN LEMBAGA PUBLIK BERBASIS HAM DI WILAYAH	6,422,000	0	6,141,930	0	6,141,930	95.64 %	280,070
521211	Belanja Bahan	1,652,000	0	1,651,930	0	1,651,930	100.00	70
	000065. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,402,000	0	1,401,930	0	1,401,930	100.00	70
	000067. PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,320,000	0	4,040,000	0	4,040,000	93.52 %	280,000
	000192. UANG HARIAN	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
	000193. PENGINAPAN	1,500,000	0	1,455,000	0	1,455,000	97.00 %	45,000
	000194. TRANSPORT ANTAR KOTA/KAB	600,000	0	365,000	0	365,000	60.83 %	235,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
	000070. TRANSPORT LOKAL	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
052	Koordinasi Implementasi Aksi HAM di Wilayah	95,586,000	0	95,050,185	300,000	95,350,185	99.75 %	235,815
052.0A	PERSIAPAN KOORDINASI AKSI HAM PEMERINTAH DAERAH	5,038,000	0	5,037,950	0	5,037,950	100.00	50
521211	Belanja Bahan	2,288,000	0	2,287,950	0	2,287,950	100.00	50
	000071. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,493,000	0	1,492,950	0	1,492,950	100.00	50
	000074. KUDAPAN RAPAT	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00	0
	000075. MAKAN RAPAT	570,000	0	570,000	0	570,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	100.00	0
	000167. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000168. HONOR MODERATOR EKSTERNAL	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
	000076. TRANSPORT LOKAL	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
052.0B	PELAKSANAAN KOORDINASI AKSI HAM PEMERINTAH DAERAH DAN KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM DI WILAYAH	68,925,000	0	68,596,755	300,000	68,896,755	99.96 %	28,245
521211	Belanja Bahan	4,506,000	0	4,498,755	0	4,498,755	99.84 %	7,245
	000078. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,446,000	0	1,439,670	0	1,439,670	99.56 %	6,330
	000081. KUDAPAN RAPAT	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000082. MAKAN RAPAT	570,000	0	570,000	0	570,000	100.00	0
	000083. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,470,000	0	1,469,085	0	1,469,085	99.94 %	915
	000087. KUDAPAN RAPAT	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00	0
	000088. MAKAN RAPAT	570,000	0	570,000	0	570,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	000091. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,919,000	0	59,898,000	0	59,898,000	99.96 %	21,000
	000094. TAKSI DAERAH TUJUAN	255,000	0	252,500	0	252,500	99.02 %	2,500
	000096. UANG HARIAN	8,880,000	0	8,880,000	0	8,880,000	100.00	0
	000097. PENGINAPAN	5,892,000	0	5,890,000	0	5,890,000	99.97 %	2,000
	000098. TRANSPORT ANTAR KOTA/KAB	1,704,000	0	1,700,500	0	1,700,500	99.79 %	3,500
	000100. TIKET PP	8,796,000	0	8,795,000	0	8,795,000	99.99 %	1,000
	000101. UANG HARIAN	19,080,000	0	19,080,000	0	19,080,000	100.00	0
	000102. PENGINAPAN	15,312,000	0	15,300,000	0	15,300,000	99.92 %	12,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	600,000	300,000	900,000	100.00	0
	000103. TRANSPORT LOKAL	900,000	0	600,000	300,000	900,000	100.00	0
052.0C	MONITORING DAN EVALUASI AKSI HAM PEMERINTAH DAERAH	21,623,000	0	21,415,480	0	21,415,480	99.04 %	207,520
521211	Belanja Bahan	1,463,000	0	1,462,980	0	1,462,980	100.00	20
	000104. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,463,000	0	1,462,980	0	1,462,980	100.00	20
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,160,000	0	19,952,500	0	19,952,500	98.97 %	207,500
	000170. UANG HARIAN	5,920,000	0	5,920,000	0	5,920,000	100.00	0
	000171. PENGINAPAN	3,632,000	0	3,632,000	0	3,632,000	100.00	0
	000172. TRANSPORT ANTAR KOTA/KAB	1,200,000	0	1,192,500	0	1,192,500	99.38 %	7,500
	000197. TIKET PP	3,078,000	0	3,078,000	0	3,078,000	100.00	0
	000198. UANG HARIAN	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	100.00	0
	000199. PENGINAPAN	2,500,000	0	2,300,000	0	2,300,000	92.00 %	200,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000200. UANG REPRESENTATIF	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000201. TAKSI DAERAH TUJUAN	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
053 Pengelolaan data dan Informasi Pemajuan HAM di wilayah	17,132,000	0	13,711,110	3,398,570	17,109,680	99.87 %	22,320
053.0A IDENTIFIKASI BAHAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HAM	7,182,000	0	7,180,110	0	7,180,110	99.97 %	1,890
521211 Belanja Bahan	2,490,000	0	2,489,610	0	2,489,610	99.98 %	390
000110. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,500,000	0	1,499,610	0	1,499,610	99.97 %	390
000113. KUDAPAN RAPAT	270,000	0	270,000	0	270,000	100.00	0
000114. MAKAN RAPAT	720,000	0	720,000	0	720,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,092,000	0	4,090,500	0	4,090,500	99.96 %	1,500
000174. UANG HARIAN	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00	0
000175. PENGINAPAN	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000176. TRANSPORT ANTAR KOTA/KAB	372,000	0	370,500	0	370,500	99.60 %	1,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000173. TRANSPORT LOKAL	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
053.0B PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA	8,310,000	0	6,531,000	1,779,000	8,310,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,710,000	0	5,931,000	1,779,000	7,710,000	100.00	0
000178. UANG HARIAN	4,440,000	0	3,700,000	740,000	4,440,000	100.00	0
000179. PENGINAPAN	2,400,000	0	1,410,000	990,000	2,400,000	100.00	0
000180. TRANSPORT ANTAR KOTA/KAB	870,000	0	821,000	49,000	870,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000177. TRANSPORT LOKAL	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
053.0C PENYUSUNAN LAPORAN PROGRAM PEMAJUAN HAM	1,640,000	0	0	1,619,570	1,619,570	98.75 %	20,430
521211 Belanja Bahan	1,640,000	0	0	1,619,570	1,619,570	98.75 %	20,430
000120. ATK DAN BAHAN KOMPUTER	1,380,000	0	0	1,373,070	1,373,070	99.50 %	6,930
000122. PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	260,000	0	0	246,500	246,500	94.81 %	13,500
FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	79,356,000	0	79,059,010	270,000	79,329,010	99.97 %	26,990

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
FBA.001 Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM	79,356,000	0	79,059,010	270,000	79,329,010	99.97 %	26,990
051 Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	28,920,000	0	28,913,510	0	28,913,510	99.98 %	6,490
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	28,920,000	0	28,913,510	0	28,913,510	99.98 %	6,490
521211 Belanja Bahan	3,732,000	0	3,726,510	0	3,726,510	99.85 %	5,490
000125. ATK	2,000,000	0	1,999,110	0	1,999,110	99.96 %	890
000126. BAHAN KOMPUTER	937,000	0	932,400	0	932,400	99.51 %	4,600
000129. KUDAPAN RAPAT	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00	0
000130. MAKAN RAPAT	570,000	0	570,000	0	570,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000131. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,688,000	0	20,687,000	0	20,687,000	100.00	1,000
000132. UANG HARIAN	11,840,000	0	11,840,000	0	11,840,000	100.00	0
000133. PENGINAPAN	7,360,000	0	7,360,000	0	7,360,000	100.00	0
000134. TRANSPORT ANTAR KAB/KOTA	1,488,000	0	1,487,000	0	1,487,000	99.93 %	1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000135. TRANSPORT LOKAL	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
052 Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	30,096,000	0	30,075,500	0	30,075,500	99.93 %	20,500
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	30,096,000	0	30,075,500	0	30,075,500	99.93 %	20,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,096,000	0	30,075,500	0	30,075,500	99.93 %	20,500
000143. UANG HARIAN	17,760,000	0	17,760,000	0	17,760,000	100.00	0
000144. PENGINAPAN	9,600,000	0	9,595,000	0	9,595,000	99.95 %	5,000
000145. TRANSPORT ANTAR KAB/KOTA	2,736,000	0	2,720,500	0	2,720,500	99.43 %	15,500
053 Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM	20,340,000	0	20,070,000	270,000	20,340,000	100.00	0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	20,340,000	0	20,070,000	270,000	20,340,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000153. HONOR NARASUMBER EKSTERNAL	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Satuan Kerja : 408748 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,520,000	0	17,520,000	0	17,520,000	100.00	0
	000183. UANG HARIAN	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000	100.00	0
	000184. PENGINAPAN	5,355,000	0	5,355,000	0	5,355,000	100.00	0
	000185. TRANSPORT ANTAR KAB/KOTA	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,020,000	0	750,000	270,000	1,020,000	100.00	0
	000154. TRANSPORT LOKAL	1,020,000	0	750,000	270,000	1,020,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI

Satuan Kerja : 408745 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**1,497,828,000**	**0**	**1,396,869,204**	**99,271,441**	**1,496,140,645**	**99.89 %**	**1,687,355**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,497,828,000	0	1,396,869,204	99,271,441	1,496,140,645	99.89 %	1,687,355
BF.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,497,828,000	0	1,396,869,204	99,271,441	1,496,140,645	99.89 %	1,687,355
AEA Koordinasi	1,037,014,000	0	976,585,927	59,299,941	1,035,885,868	99.89 %	1,128,132
AEA.002 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	1,037,014,000	0	976,585,927	59,299,941	1,035,885,868	99.89 %	1,128,132
051 Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian dan Satuan Kerja Imigrasi	960,296,000	0	901,946,857	57,415,941	959,362,798	99.90 %	933,202
051.0A Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	415,208,000	0	414,837,107	0	414,837,107	99.91 %	370,893
521211 Belanja Bahan	9,832,000	0	9,814,385	0	9,814,385	99.82 %	17,615
000001. ATK	3,840,000	0	3,838,935	0	3,838,935	99.97 %	1,065
000002. Penggandaan dan Penjilidan	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000003. Suplies Komputer	3,992,000	0	3,990,450	0	3,990,450	99.96 %	1,550
000005. Kudapan Rapat Biasa	1,500,000	0	1,485,000	0	1,485,000	99.00 %	15,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	0	49,994,400	0	49,994,400	99.99 %	5,600
000006. Biaya Pelatihan Menembak (Biaya Latihan dan Perlengkapan Latihan)	50,000,000	0	49,994,400	0	49,994,400	99.99 %	5,600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	350,276,000	0	349,928,322	0	349,928,322	99.90 %	347,678
000007. Tiket PP	62,640,000	0	62,620,037	0	62,620,037	99.97 %	19,963
000008. Taksi Asal	1,560,000	0	1,554,020	0	1,554,020	99.62 %	5,980
000009. Taksi Tujuan	5,328,000	0	5,315,650	0	5,315,650	99.77 %	12,350
000010. Uang Harian	115,440,000	0	115,280,000	0	115,280,000	99.86 %	160,000
000011. Uang Penginapan	121,680,000	0	121,620,600	0	121,620,600	99.95 %	59,400
000012. Biaya Transportasi Kota/Kab	29,808,000	0	29,718,015	0	29,718,015	99.70 %	89,985
000013. Uang Representasi Pejabat Eselon II	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
000136. Uang Harian Jakarta	10,600,000	0	10,600,000	0	10,600,000	100.00	0
000137. Uang Harian	370,000	0	370,000	0	370,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI

Satuan Kerja : 408745 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000014. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
	000138. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
051.0B	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	545,088,000	0	487,109,750	57,415,941	544,525,691	99.90 %	562,309
521211	Belanja Bahan	5,072,000	0	5,066,340	0	5,066,340	99.89 %	5,660
	000015. ATK	1,328,000	0	1,325,340	0	1,325,340	99.80 %	2,660
	000017. Suplies Komputer	2,744,000	0	2,741,000	0	2,741,000	99.89 %	3,000
	000018. Spanduk	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	523,836,000	0	470,856,410	52,461,441	523,317,851	99.90 %	518,149
	000021. Tiket PP	62,610,000	0	50,203,017	12,381,725	62,584,742	99.96 %	25,258
	000022. Taksi Asal	1,944,000	0	1,860,420	70,800	1,931,220	99.34 %	12,780
	000023. Taksi Tujuan	2,976,000	0	2,840,740	116,500	2,957,240	99.37 %	18,760
	000024. Uang Harian	166,500,000	0	166,420,000	0	166,420,000	99.95 %	80,000
	000025. Uang Penginapan	190,400,000	0	176,301,400	13,907,000	190,208,400	99.90 %	191,600
	000026. Biaya Transportasi Kota/Kab	60,250,000	0	52,200,833	7,859,416	60,060,249	99.69 %	189,751
	000027. Uang Representasi Pejabat Eselon II	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	100.00	0
	000139. Uang Harian	35,856,000	0	17,730,000	18,126,000	35,856,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
	000028. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,180,000	0	2,187,000	4,954,500	7,141,500	99.46 %	38,500
	000129. Uang Harian	700,000	0	670,000	0	670,000	95.71 %	30,000
	000130. Uang Representasi Pejabat Eselon II	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
	000131. Uang Harian Fullboard Di Luar Kota	520,000	0	520,000	0	520,000	100.00	0
	000132. Uang Transportasi Kota/Kab	3,280,000	0	847,000	2,424,500	3,271,500	99.74 %	8,500
	000142. Uang Harian Jakarta	530,000	0	0	530,000	530,000	100.00	0
	000143. Uang Penginapan Jakarta	1,280,000	0	0	1,280,000	1,280,000	100.00	0
	000144. Uang Harian Fullboard Jakarta	720,000	0	0	720,000	720,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI

Satuan Kerja : 408745 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052 Penilaian Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian	39,786,000	0	39,709,610	0	39,709,610	99.81 %	76,390
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	39,786,000	0	39,709,610	0	39,709,610	99.81 %	76,390
521211 Belanja Bahan	1,980,000	0	1,922,200	0	1,922,200	97.08 %	57,800
000034. Makan Rapat Biasa	836,000	0	825,000	0	825,000	98.68 %	11,000
000035. Kudapan Rapat Biasa	1,144,000	0	1,097,200	0	1,097,200	95.91 %	46,800
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	100.00	0
000036. Ketua	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000037. Sekretaris	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000038. Anggota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,006,000	0	30,987,410	0	30,987,410	99.94 %	18,590
000039. Uang Harian	7,950,000	0	7,950,000	0	7,950,000	100.00	0
000040. Uang Penginapan	7,820,000	0	7,820,000	0	7,820,000	100.00	0
000133. Tiket PP	13,656,000	0	13,649,950	0	13,649,950	99.96 %	6,050
000134. Taksi Asal	480,000	0	474,320	0	474,320	98.82 %	5,680
000135. Taksi Tujuan	1,100,000	0	1,093,140	0	1,093,140	99.38 %	6,860
053 Pelaporan	36,932,000	0	34,929,460	1,884,000	36,813,460	99.68 %	118,540
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	36,932,000	0	34,929,460	1,884,000	36,813,460	99.68 %	118,540
521211 Belanja Bahan	36,932,000	0	34,929,460	1,884,000	36,813,460	99.68 %	118,540
000042. ATK	11,952,000	0	11,944,390	0	11,944,390	99.94 %	7,610
000043. Penggandaan dan Penjilidan	1,592,000	0	1,588,500	0	1,588,500	99.78 %	3,500
000044. Suplies Komputer	11,868,000	0	9,975,570	1,884,000	11,859,570	99.93 %	8,430
000046. Kudapan Rapat Biasa	1,300,000	0	1,280,000	0	1,280,000	98.46 %	20,000
000120. Pencetakan	10,220,000	0	10,141,000	0	10,141,000	99.23 %	79,000
BHB Operasi Bidang Keamanan	411,574,000	0	371,047,227	39,971,500	411,018,727	99.87 %	555,273
BHB.U01 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	243,880,000	0	223,413,840	20,305,000	243,718,840	99.93 %	161,160
051 Pengumpulan Data dan Informasi	243,878,000	0	223,413,840	20,305,000	243,718,840	99.93 %	159,160

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI

Satuan Kerja : 408745 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	243,878,000	0	223,413,840	20,305,000	243,718,840	99.93 %	159,160
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	243,878,000	0	223,413,840	20,305,000	243,718,840	99.93 %	159,160
000047. Biaya Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penjejakan	224,168,000	0	203,703,840	20,305,000	224,008,840	99.93 %	159,160
000121. Perlengkapan Penunjang Kegiatan	19,710,000	0	19,710,000	0	19,710,000	100.00	0
052 Penyajian Laporan	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
000051. Biaya laporan	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah	147,642,000	0	147,633,387	0	147,633,387	99.99 %	8,613
051 Pelaksanaan Pengawasan	147,640,000	0	147,633,387	0	147,633,387	100.00	6,613
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	147,640,000	0	147,633,387	0	147,633,387	100.00	6,613
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	147,640,000	0	147,633,387	0	147,633,387	100.00	6,613
000099. Biaya Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penjejakan	147,640,000	0	147,633,387	0	147,633,387	100.00	6,613
052 Penyusunan Laporan dan Evaluasi	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
000103. Biaya Pelaporan	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah	19,994,000	0	0	19,666,500	19,666,500	98.36 %	327,500
051 Persiapan Rencana Kegiatan	1,775,000	0	0	1,775,000	1,775,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,775,000	0	0	1,775,000	1,775,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,775,000	0	0	1,775,000	1,775,000	100.00	0
000085. Kudapan Rapat Biasa	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00	0
000086. Makan Rapat Biasa	1,375,000	0	0	1,375,000	1,375,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Pengawasan	16,930,000	0	0	16,613,500	16,613,500	98.13 %	316,500

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI

Satuan Kerja : 408745 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	16,930,000	0	0	16,613,500	16,613,500	98.13 %	316,500
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	7,300,000	0	0	7,000,000	7,000,000	95.89 %	300,000
000087. Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
000088. Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)	800,000	0	0	800,000	800,000	100.00	0
000089. Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
000090. Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)	5,400,000	0	0	5,100,000	5,100,000	94.44 %	300,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,630,000	0	0	9,613,500	9,613,500	99.83 %	16,500
000091. Biaya Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penjejakan	9,630,000	0	0	9,613,500	9,613,500	99.83 %	16,500
053 Penyusunan Laporan dan Evaluasi	1,289,000	0	0	1,278,000	1,278,000	99.15 %	11,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,289,000	0	0	1,278,000	1,278,000	99.15 %	11,000
521211 Belanja Bahan	1,278,000	0	0	1,278,000	1,278,000	100.00	0
000096. Kudapan rapat biasa	288,000	0	0	288,000	288,000	100.00	0
000097. Makan rapat biasa	990,000	0	0	990,000	990,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,000	0	0	0	0	0.00 %	11,000
000098. Biaya pelaporan	11,000	0	0	0	0	0.00 %	11,000
BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	58,000	0	0	0	0	0.00 %	58,000
051 Prapenyidikan	26,000	0	0	0	0	0.00 %	26,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	26,000	0	0	0	0	0.00 %	26,000
521211 Belanja Bahan	20,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000
000053. Makan rapat biasa	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000054. Kudapan rapat biasa	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000056. Makan rapat biasa	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
000057. Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI

Satuan Kerja : 408745 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000058. Biaya Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan Keterangan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000059. Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000060. Biaya Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penjejakan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522151 Belanja Jasa Profesi	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
000061. Penterjemah Bahasa Asing	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000062. Honorarium Pembahas/Ahli	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
052 Penyidikan	32,000	0	0	0	0	0.00 %	32,000
052.0A Permulaan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000063. Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
052.0B Olah TKP	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
000064. Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000065. Biaya Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan Keterangan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522151 Belanja Jasa Profesi	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
000066. Penterjemah Bahasa Asing	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000067. Honorarium Pembahas/Ahli	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
052.0C Upaya Paksa	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000068. Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000069. Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000070. Biaya Operasional Penangkapan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000071. Biaya Operasional Penahanan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000072. Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
052.0D Pemeriksaan	19,000	0	0	0	0	0.00 %	19,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI

Satuan Kerja : 408745 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
000074. Makan Rapat Biasa	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000075. Kudapan Rapat Biasa	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000077. Makan Rapat Biasa	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000
000078. Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000079. Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000080. Biaya Penasehat Hukum	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000081. Penterjemah Bahasa Asing	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
052.0E Penyerahan Berkas Perkara	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
000082. Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000083. Biaya Pemberkasan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
052.0F Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000084. Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	49,240,000	0	49,236,050	0	49,236,050	99.99 %	3,950
BKA.001 Pengawasan Orang Asing	49,240,000	0	49,236,050	0	49,236,050	99.99 %	3,950
051 Persiapan Tim PORA	19,000,000	0	18,996,050	0	18,996,050	99.98 %	3,950
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,000,000	0	18,996,050	0	18,996,050	99.98 %	3,950
521211 Belanja Bahan	19,000,000	0	18,996,050	0	18,996,050	99.98 %	3,950
000106. Penggandaan dan Penjilidan	2,500,000	0	2,497,500	0	2,497,500	99.90 %	2,500
000107. Spanduk	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000108. Perlengkapan	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
000141. Supplies Komputer	7,000,000	0	6,998,550	0	6,998,550	99.98 %	1,450

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI

Satuan Kerja : 408745 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052 Pelaksanaan Tim PORA	30,240,000	0	30,240,000	0	30,240,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	30,240,000	0	30,240,000	0	30,240,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
000109. Sekretaris (eksternal)	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000110. Anggota (instansi eksternal)	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,550,000	0	8,550,000	0	8,550,000	100.00	0
000116. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota	8,550,000	0	8,550,000	0	8,550,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16,290,000	0	16,290,000	0	16,290,000	100.00	0
000117. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar Kantor	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000	100.00	0
000118. Uang Harian Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota	3,990,000	0	3,990,000	0	3,990,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**1,863,881,000**	**0**	**1,699,275,856**	**155,127,951**	**1,854,403,807**	**99.49 %**	**9,477,193**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,863,881,000	0	1,699,275,856	155,127,951	1,854,403,807	99.49 %	9,477,193
BF.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1,863,881,000	0	1,699,275,856	155,127,951	1,854,403,807	99.49 %	9,477,193
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1,539,353,000	0	1,474,240,316	59,159,470	1,533,399,786	99.61 %	5,953,214
BDC.001 Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	477,432,000	0	473,299,562	3,146,000	476,445,562	99.79 %	986,438
051 Persiapan Pemberdayaan KI di Wilayah	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
051.0A Tanpa Sub Komponen	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
521211 Belanja Bahan	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000309. ATK	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
052 Pelaksanaan Pemberdayaan KI di Wilayah	477,426,000	0	473,299,562	3,146,000	476,445,562	99.79 %	980,438
052.0A Promosi dan Diseminasi Merek	125,902,000	0	125,777,800	0	125,777,800	99.90 %	124,200
521211 Belanja Bahan	23,910,000	0	23,905,620	0	23,905,620	99.98 %	4,380
000003. ATK	7,710,000	0	7,705,620	0	7,705,620	99.94 %	4,380
000004. Backdrop / Spanduk / Banner	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000005. Seminar Kit	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
000007. Honorarium Narasumber Eselon II Eksternal	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58,296,000	0	58,176,180	0	58,176,180	99.79 %	119,820
000008. Uang Harian	26,640,000	0	26,530,000	0	26,530,000	99.59 %	110,000
000009. Penginapan Eselon II	3,255,000	0	3,255,000	0	3,255,000	100.00	0
000010. Penginapan Eselon III / Golongan IV	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	100.00	0
000011. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	15,652,000	0	15,643,220	0	15,643,220	99.94 %	8,780
000012. Uang Representasi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000013. Transportasi Darat Antar Kabupaten	6,349,000	0	6,347,960	0	6,347,960	99.98 %	1,040
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,050,000	0	13,050,000	0	13,050,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000014. Transport Peserta Rapat	13,050,000	0	13,050,000	0	13,050,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27,846,000	0	27,846,000	0	27,846,000	100.00	0
	000016. Uang Harian Narasumber Internal Eselon III	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
	000017. Uang Harian Fullday Narasumber Internal Eselon III	95,000	0	95,000	0	95,000	100.00	0
	000018. Penginapan Narasumber Internal Eselon III	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000021. Tiket Narasumber Internal Eselon III (PP)	911,000	0	911,000	0	911,000	100.00	0
	000022. Paket Meeting Fullday	24,300,000	0	24,300,000	0	24,300,000	100.00	0
052.0B	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal	170,272,000	0	168,047,426	1,398,000	169,445,426	99.51 %	826,574
521211	Belanja Bahan	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000	100.00	0
	000031. Backdrop / Spanduk / Banner	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000032. Seminar Kit	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
	000034. Honorarium Narasumber Eselon II Eksternal	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106,616,000	0	105,121,926	1,398,000	106,519,926	99.91 %	96,074
	000035. Uang Harian	39,960,000	0	38,990,000	960,000	39,950,000	99.97 %	10,000
	000036. Penginapan Eselon II	3,207,000	0	3,205,000	0	3,205,000	99.94 %	2,000
	000037. Penginapan Eselon III / Golongan IV	5,400,000	0	5,397,207	0	5,397,207	99.95 %	2,793
	000038. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	18,560,000	0	18,542,099	0	18,542,099	99.90 %	17,901
	000039. Uang Representasi	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
	000040. Transportasi Darat Antar Kabupaten	18,634,000	0	18,133,360	438,000	18,571,360	99.66 %	62,640
	000291. Uang Harian	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	100.00	0
	000292. Uang Harian	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000293. Tiket Jogya-Denpasar (PP)	12,988,000	0	12,987,260	0	12,987,260	99.99 %	740
	000294. Penginapan	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
	000295. Penginapan	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
	000296. Taksi Bandara - Hotel	147,000	0	147,000	0	147,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000297. Transportasi Darat Antar Kabupaten	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49,956,000	0	49,225,500	0	49,225,500	98.54 %	730,500
	000049. Paket Meeting Fullday	19,250,000	0	19,250,000	0	19,250,000	100.00	0
	000051. Paket Meeting Fullday	1,925,000	0	1,925,000	0	1,925,000	100.00	0
	000052. Uang Harian	7,400,000	0	6,680,000	0	6,680,000	90.27 %	720,000
	000053. Penginapan	10,206,000	0	10,200,000	0	10,200,000	99.94 %	6,000
	000054. Uang Transport	900,000	0	895,500	0	895,500	99.50 %	4,500
	000056. Paket Meeting Fullday	825,000	0	825,000	0	825,000	100.00	0
	000216. Transport Peserta	9,450,000	0	9,450,000	0	9,450,000	100.00	0
052.0C	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya	91,698,000	0	89,930,264	1,748,000	91,678,264	99.98 %	19,736
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,106,000	0	62,338,264	1,748,000	64,086,264	99.97 %	19,736
	000062. Uang Harian	32,560,000	0	31,460,000	1,095,000	32,555,000	99.98 %	5,000
	000063. Penginapan Eselon II	555,000	0	555,000	0	555,000	100.00	0
	000064. Penginapan Eselon III / Golongan IV	3,280,000	0	3,276,746	0	3,276,746	99.90 %	3,254
	000065. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	15,741,000	0	15,729,600	0	15,729,600	99.93 %	11,400
	000066. Uang Representasi	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
	000067. Transportasi Darat Antar Kabupaten	11,520,000	0	10,866,918	653,000	11,519,918	100.00	82
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27,592,000	0	27,592,000	0	27,592,000	100.00	0
	000071. Uang Harian Moderator Internal	370,000	0	370,000	0	370,000	100.00	0
	000074. Penginapan Moderator Internal	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000076. Paket Meeting Fullday	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.00	0
	000078. Paket Meeting Fullday	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
	000079. Uang Harian	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
	000080. Penginapan	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
	000081. Uang Transport	512,000	0	512,000	0	512,000	100.00	0
	000083. Paket Meeting Fullday	825,000	0	825,000	0	825,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000220. Transport Peserta Rapat	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	100.00	0
000221. Uang Harian Fullday	380,000	0	380,000	0	380,000	100.00	0
000223. Uang Harian Fullday Moderator Internal	95,000	0	95,000	0	95,000	100.00	0
052.0D Sosialisasi dan Inventarisasi KI	89,554,000	0	89,544,072	0	89,544,072	99.99 %	9,928
521211 Belanja Bahan	43,497,000	0	43,497,000	0	43,497,000	100.00	0
000265. Konsumsi Makan	20,750,000	0	20,750,000	0	20,750,000	100.00	0
000266. Konsumsi Snack	7,750,000	0	7,750,000	0	7,750,000	100.00	0
000268. Konsumsi Snack Peserta	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
000269. Leaflet	2,997,000	0	2,997,000	0	2,997,000	100.00	0
000287. Konsumsi Makan Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000270. Honorarium Narasumber Eksternal	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,957,000	0	37,947,072	0	37,947,072	99.97 %	9,928
000271. Uang Harian	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000	100.00	0
000272. Penginapan Eselon III / Golongan IV	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
000273. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	8,445,000	0	8,437,072	0	8,437,072	99.91 %	7,928
000274. Transportasi Darat Antar Kabupaten Transportasi Darat Antar Kabupaten 3 ORG x 8 KALI	5,412,000	0	5,410,000	0	5,410,000	99.96 %	2,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
000276. Transport dalam Kota	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
053 Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KI di Wilayah	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
053.0A Tanpa Sub Komponen	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000090. Transport Peserta Rapat	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
BDC.002 Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	205,913,000	0	203,851,248	1,577,000	205,428,248	99.76 %	484,752
051 Persiapan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A	Tanpa Sub Komponen	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521211	Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000138. Penggandaan/Penjilidan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
052	Pelaksanaan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	205,912,000	0	203,851,248	1,577,000	205,428,248	99.77 %	483,752
052.0A	Edukasi / Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran HKI dengan Instansi Terkait	205,912,000	0	203,851,248	1,577,000	205,428,248	99.77 %	483,752
521211	Belanja Bahan	33,486,000	0	33,485,915	0	33,485,915	100.00	85
	000139. ATK	10,186,000	0	10,185,915	0	10,185,915	100.00	85
	000140. Backdrop / Spanduk / Banner	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
	000141. Seminar Kit	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
	000143. Honorarium Narasumber Eselon II Eksternal	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,601,000	0	61,897,897	1,577,000	63,474,897	99.80 %	126,103
	000144. Uang Harian	33,300,000	0	32,590,000	710,000	33,300,000	100.00	0
	000145. Penginapan Eselon II	2,955,000	0	2,955,000	0	2,955,000	100.00	0
	000146. Penginapan Eselon III / Golongan IV	7,460,000	0	7,460,000	0	7,460,000	100.00	0
	000147. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	11,036,000	0	11,034,427	0	11,034,427	99.99 %	1,573
	000148. Uang Representasi	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
	000149. Transportasi Darat Antar Kabupaten	7,800,000	0	6,808,470	867,000	7,675,470	98.40 %	124,530
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	102,825,000	0	102,467,436	0	102,467,436	99.65 %	357,564
	000152. Uang Harian Narasumber Internal Eselon III	740,000	0	465,000	0	465,000	62.84 %	275,000
	000156. Penginapan Narasumber Internal Eselon III	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000158. Paket Meeting Fullday	41,250,000	0	41,230,000	0	41,230,000	99.95 %	20,000
	000160. Paket Meeting Fullday	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000	100.00	0
	000161. Uang Harian	9,250,000	0	9,195,000	0	9,195,000	99.41 %	55,000
	000162. Penginapan	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000163. Uang Transport	2,535,000	0	2,527,436	0	2,527,436	99.70 %	7,564
000165. Paket Meeting Fullday	810,000	0	810,000	0	810,000	100.00	0
000210. Uang Transport Peserta	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
000211. Uang Harian Fullday	14,250,000	0	14,250,000	0	14,250,000	100.00	0
BDC.003 Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	856,008,000	0	797,089,506	54,436,470	851,525,976	99.48 %	4,482,024
051 Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	856,008,000	0	797,089,506	54,436,470	851,525,976	99.48 %	4,482,024
051.0A Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual	95,960,000	0	83,593,655	11,271,980	94,865,635	98.86 %	1,094,365
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95,960,000	0	83,593,655	11,271,980	94,865,635	98.86 %	1,094,365
000092. Uang Harian DKI Jakarta	21,200,000	0	20,190,000	370,000	20,560,000	96.98 %	640,000
000093. Penginapan Eselon II	5,476,000	0	5,475,600	0	5,475,600	99.99 %	400
000094. Penginapan Eselon III / Golongan IV	6,488,000	0	6,484,000	0	6,484,000	99.94 %	4,000
000095. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	12,033,000	0	12,029,004	0	12,029,004	99.97 %	3,996
000096. Tiket Semarang - Jakarta (PP)	6,784,000	0	6,780,191	0	6,780,191	99.94 %	3,809
000097. Taksi Jakarta (PP)	186,000	0	185,900	0	185,900	99.95 %	100
000098. Taksi Semarang (PP)	388,000	0	385,960	0	385,960	99.47 %	2,040
000099. Uang Representasi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000100. Transportasi Darat	10,720,000	0	10,720,000	0	10,720,000	100.00	0
000214. Uang Harian	16,650,000	0	11,470,000	5,180,000	16,650,000	100.00	0
000215. Transportasi Darat	10,575,000	0	7,423,000	3,117,480	10,540,480	99.67 %	34,520
000298. Penginapan	4,560,000	0	1,550,000	2,604,500	4,154,500	91.11 %	405,500
051.0B Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	219,342,000	0	188,618,812	29,566,530	218,185,342	99.47 %	1,156,658
521211 Belanja Bahan	24,280,000	0	18,005,000	6,208,500	24,213,500	99.73 %	66,500
000101. Konsumsi Makan Rapat	13,170,000	0	11,150,000	2,000,000	13,150,000	99.85 %	20,000
000102. Konsumsi Snack	8,140,000	0	6,855,000	1,240,000	8,095,000	99.45 %	45,000
000312. Konsumsi Snack Rapat	2,072,000	0	0	2,071,000	2,071,000	99.95 %	1,000
000313. Seminar Kit	898,000	0	0	897,500	897,500	99.94 %	500

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	193,712,000	0	169,263,812	23,358,030	192,621,842	99.44 %	1,090,158
	000105. Uang Harian	97,680,000	0	85,730,000	11,840,000	97,570,000	99.89 %	110,000
	000107. Penginapan Eselon III / Golongan IV	2,622,000	0	2,620,000	0	2,620,000	99.92 %	2,000
	000108. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	56,580,000	0	47,998,536	7,865,530	55,864,066	98.73 %	715,934
	000109. Uang Representasi	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000	100.00	0
	000110. Transportasi Darat Antar Kabupaten	35,790,000	0	31,875,276	3,652,500	35,527,776	99.27 %	262,224
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
	000111. Transport dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
051.0C	Koordinasi dengan Instansi Terkait	156,576,000	0	140,801,589	13,597,960	154,399,549	98.61 %	2,176,451
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	156,576,000	0	140,801,589	13,597,960	154,399,549	98.61 %	2,176,451
	000115. Uang Harian DKI Jakarta	47,700,000	0	46,350,000	0	46,350,000	97.17 %	1,350,000
	000116. Penginapan Eselon II	8,204,000	0	8,198,190	0	8,198,190	99.93 %	5,810
	000117. Penginapan Eselon III / Golongan IV	11,368,000	0	11,368,000	0	11,368,000	100.00	0
	000118. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	32,802,000	0	26,783,219	5,952,000	32,735,219	99.80 %	66,781
	000119. Tiket Semarang - Jakarta (PP)	16,980,000	0	14,193,360	2,722,000	16,915,360	99.62 %	64,640
	000120. Taksi Jakarta (PP)	1,000,000	0	637,600	321,420	959,020	95.90 %	40,980
	000121. Taksi Semarang (PP)	680,000	0	506,500	57,540	564,040	82.95 %	115,960
	000122. Uang Representasi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000123. Transportasi Darat	12,432,000	0	12,426,630	0	12,426,630	99.96 %	5,370
	000280. Uang Harian	11,100,000	0	10,860,000	0	10,860,000	97.84 %	240,000
	000281. Penginapan Eselon IV/Pelaksana	3,270,000	0	3,244,000	0	3,244,000	99.20 %	26,000
	000282. Transportasi Darat Antar Kabupaten PP	5,000,000	0	4,434,090	305,000	4,739,090	94.78 %	260,910
	000299. Uang Harian DKI Jakarta	4,240,000	0	0	4,240,000	4,240,000	100.00	0
051.0D	Mobile IP Clinic di Wilayah	384,130,000	0	384,075,450	0	384,075,450	99.99 %	54,550
522151	Belanja Jasa Profesi	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
	000261. Honorarium Narasumber Eksternal	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000262. Honorarium Moderator	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	193,279,000	0	193,278,750	0	193,278,750	100.00	250
	000263. Jasa Event Organizer	193,279,000	0	193,278,750	0	193,278,750	100.00	250
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	177,551,000	0	177,496,700	0	177,496,700	99.97 %	54,300
	000128. Uang Harian Uang Harian 31 ORG x 5 HR x 1 KEG	56,420,000	0	56,380,000	0	56,380,000	99.93 %	40,000
	000129. Penginapan Eselon II	4,368,000	0	4,365,000	0	4,365,000	99.93 %	3,000
	000131. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	70,800,000	0	70,800,000	0	70,800,000	100.00	0
	000132. Uang Representasi	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
	000133. Transportasi Darat Antar Kabupaten	877,000	0	877,000	0	877,000	100.00	0
	000240. Tiket Surakarta - Jakarta (PP)	36,652,000	0	36,650,800	0	36,650,800	100.00	1,200
	000241. Taksi Jakarta	7,684,000	0	7,673,900	0	7,673,900	99.87 %	10,100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
	000264. Transport dalam Kota	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000	100.00	0
	000277. Transport Pendamping dalam Kota	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000	100.00	0
BKB	Pemantauan produk	324,528,000	0	225,035,540	95,968,481	321,004,021	98.91 %	3,523,979
BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	324,528,000	0	225,035,540	95,968,481	321,004,021	98.91 %	3,523,979
051	Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	245,682,000	0	163,862,187	79,423,367	243,285,554	99.02 %	2,396,446
051.0A	Kerjasama Pemantauan / Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait	179,285,000	0	101,601,802	75,843,367	177,445,169	98.97 %	1,839,831
521211	Belanja Bahan	24,390,000	0	11,794,990	12,594,060	24,389,050	100.00	950
	000166. ATK	16,890,000	0	4,294,990	12,594,060	16,889,050	99.99 %	950
	000167. Seminar Kit Seminar Kit	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000169. Honorarium Narasumber Eksternal Eselon II Eksternal	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121,043,000	0	55,955,592	63,249,307	119,204,899	98.48 %	1,838,101
	000170. Uang Harian	32,560,000	0	30,480,000	1,780,000	32,260,000	99.08 %	300,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000172. Penginapan Eselon III / Golongan IV	3,410,000	0	3,410,000	0	3,410,000	100.00	0
	000173. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	12,480,000	0	12,450,000	0	12,450,000	99.76 %	30,000
	000175. Transportasi Darat Antar Kabupaten	18,798,000	0	9,615,592	8,528,800	18,144,392	96.52 %	653,608
	000301. Uang Harian	3,280,000	0	0	3,280,000	3,280,000	100.00	0
	000303. Penginapan Eselon III / Golongan IV	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	100.00	0
	000304. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	1,628,000	0	0	1,628,000	1,628,000	100.00	0
	000305. Tiket PP	1,522,000	0	0	1,520,507	1,520,507	99.90 %	1,493
	000306. Uang Representasi	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
	000307. Transportasi Darat Antar Kabupaten	1,833,000	0	0	1,833,000	1,833,000	100.00	0
	000310. Uang Harian	26,640,000	0	0	25,900,000	25,900,000	97.22 %	740,000
	000311. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	16,492,000	0	0	16,379,000	16,379,000	99.31 %	113,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32,052,000	0	32,051,220	0	32,051,220	100.00	780
	000178. Uang Harian Narasumber Internal Eselon III	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
	000179. Uang Harian Moderator Internal	370,000	0	370,000	0	370,000	100.00	0
	000180. Penginapan Narasumber Eksternal Eselon II	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000181. Penginapan Narasumber Internal Eselon III	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
	000182. Penginapan Moderator Internal	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000183. Tiket Pesawat Narasumber Internal Eselon III (PP)	4,204,000	0	4,203,220	0	4,203,220	99.98 %	780
	000184. Paket Meeting Halfday	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000	100.00	0
	000186. Paket Meeting Halfday	1,025,000	0	1,025,000	0	1,025,000	100.00	0
	000187. Uang Harian Halfday	475,000	0	475,000	0	475,000	100.00	0
	000188. Penginapan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000189. Uang Transport	688,000	0	688,000	0	688,000	100.00	0
	000191. Paket Meeting Halfday	615,000	0	615,000	0	615,000	100.00	0
	000245. Transport Peserta	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	100.00	0
	000246. Uang Harian Halfday Narasumber Internal Eselon	190,000	0	190,000	0	190,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satuan Kerja : 408746 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	III	190,000	0	190,000	0			0
	000247. Uang Harian Halfday Moderator Internal	95,000	0	95,000	0	95,000	100.00	0
	000248. Uang Harian	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	100.00	0
051.0B	Pemantauan/Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya	66,397,000	0	62,260,385	3,580,000	65,840,385	99.16 %	556,615
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,347,000	0	58,860,385	2,980,000	61,840,385	99.19 %	506,615
	000194. Uang Harian	33,300,000	0	31,330,000	1,480,000	32,810,000	98.53 %	490,000
	000195. Penginapan Eselon II	6,190,000	0	6,186,697	0	6,186,697	99.95 %	3,303
	000197. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	16,563,000	0	15,357,188	1,200,000	16,557,188	99.96 %	5,812
	000198. Uang Representasi	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
	000199. Transportasi Darat Antar Kabupaten	6,144,000	0	5,836,500	300,000	6,136,500	99.88 %	7,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,050,000	0	3,400,000	600,000	4,000,000	98.77 %	50,000
	000200. Transport pendamping dalam Kota	4,050,000	0	3,400,000	600,000	4,000,000	98.77 %	50,000
052	Pendampingan Penanganan Aduan/ Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	78,846,000	0	61,173,353	16,545,114	77,718,467	98.57 %	1,127,533
052.0A	Koordinasi Penanganan Aduan/Pelanggaran/Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	78,846,000	0	61,173,353	16,545,114	77,718,467	98.57 %	1,127,533
522151	Belanja Jasa Profesi	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
	000202. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,346,000	0	59,673,353	16,545,114	76,218,467	98.54 %	1,127,533
	000203. Uang Harian	35,520,000	0	27,310,000	7,770,000	35,080,000	98.76 %	440,000
	000205. Penginapan Eselon III / Golongan IV	6,804,000	0	6,800,000	0	6,800,000	99.94 %	4,000
	000206. Penginapan Eselon IV / Pelaksana	19,962,000	0	13,000,000	6,380,000	19,380,000	97.08 %	582,000
	000208. Transportasi Darat Antar Kabupaten	15,060,000	0	12,563,353	2,395,114	14,958,467	99.33 %	101,533

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI JAWA TENGAH DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jusman Ali
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Administrasi
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Jusman Ali NIP. 197405102000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI JAWA TENGAH DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%
2.	Terwujudnya pengelolaan keungan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 24.469.502.000,-**
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 24.469.502.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi

Jusman Ali
NIP. 197405102000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI JAWA TENGAH DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jusman Ali
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Administrasi

Jusman Ali
NIP. 197405102000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Bambang Setyabudi NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%
3.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 4.991.122.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 3.902.750.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp. 1.088.372.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 5.923.361.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 5.923.361.000,-
TOTAL	**Rp. 10.914.483.000,-**

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafar Pudji Rochmadi
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah
A. Yuspahruddin	Syafar Pudji Rochmadi
NIP. 196305281985031002	NIP. 196307091987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%
		3. Persentase menurunnya residivis	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70,0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
		2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin	13%
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%
		2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%
		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%

		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
8.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 1.920.260.000,-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.920.260.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Kepala Divisi Pemasyarakatan
Jawa Tengah

Syafar Pudji Rochmadi
NIP. 196307091987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH
DENGAN
Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafar Pudji Rochmadi
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Jawa Tengah

Syafar Pudji Rochmad
NIP. 196307091987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Keimigrasian
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Santosa NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 16.584.614.000,-**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 16.584.614.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 46.015.888.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 46.015.888.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santosa
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Keimigrasian

Santosa
NIP. 196507021987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Bambang Setyabudi NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	600 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 1.080.189.000,-**
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.080.189.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Bambang Setyabudi NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Bambang Setyabudi NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp. 272.000.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 272.000.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Lucky Agung Binarto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Bambang Setyabudi NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	35%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaraan HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	8 Intansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	**Rp. 313.738.000,-**
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 313.738.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Bambang Setyabudi NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegaiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp. 121.147.000,-**
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 121.147.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 5.988.233.000,-**
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 5.988.233.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Bambang Setyabudi NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 197.997.000,-**
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 197.997.000,-

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002	Bambang Setyabudi NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Bambang Setyabudi
NIP. 196911281997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua, Sekretaris Jenderal	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.	A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 25.841.277.000,-**
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 25.841.277.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Direktur Jenderal	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Administrasi Hukum Umum	
Cahyo Rahadian Muzhar	A. Yuspahruddin
NIP. 196909181994031001	NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86%
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 5.327.911.000,-**
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 4.184.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp. 1.143.911.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 7.670.808.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 7.670.808.000,-
TOTAL	**Rp. 12.998.719.000,-**

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Pemasyarakatan	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Reynhard Silitonga NRP. 67090332	A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	81%
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 136.372.301.000,-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	**Rp. 136.372.301.000**
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 340.749.078.000,-**
Dukungan manajemen dan teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	**Rp. 340.749.078.000**
TOTAL	**Rp. 477.121.379.000,-**

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Widodo Ekatjahjana	A. Yuspahruddin
NIP. 197105011993031001	NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 16.146.714.000,-**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 16.146.714.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 50.717.180.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 50.717.180.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 19630528 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Razilu	A. Yuspahruddin
NIP. 196511281991031002	NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	602 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp 1.190.054.000,-**
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.190.054.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.R. Benny Riyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
H.R. Benny Riyanto NIP. 196204101987031003	A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	22 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp. 337.000.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 337.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Mualimin Abdi NIP. 196211211982031001	A. Yuspahruddin NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaraan HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	8 Intansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	5 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	**Rp. 304.738.000,-**
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 304.738.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Mualimin Abdi
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Widodo Ekatjahjana	A. Yuspahruddin
NIP. 197105011993031001	NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegaiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	**Rp. 166.601.000,-**
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 166.601.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**Rp. 6.182.417.000,-**
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 6.182.417.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Puguh Budi Utami
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
Sri Puguh Budi Utami	A. Yuspahruddin
NIP. 196207021987032001	NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 197.997.000,-**
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 197.997.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002